

TUGAS AKHIR PROGRAM MAGISTER (TAPM)

**PERSEPSI MASYARAKAT KECAMATAN KOTA JANTHO
KABUPATEN ACEH BESAR TERHADAP PROGRAM
PENATAAN PEMUKIMAN PENDUDUK DI DESA A WEEK
DAN DESA BUENG**



**TAPM diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
gelar Magister Sains dalam Ilmu Administrasi
Bidang Minat Administrasi Publik**

Disusun oleh :

SETIA BUDI
NIM: 015227648

**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS TERBUKA
JAKARTA
2010**

**ABSTRACT****PERCEPTION OF JANTHO SUB-DISTRICT COMMUNITY
ON THE INHABITANT RESETTLEMENT PROGRAM IN
AWEK AND BUENG VILLAGES ACEH BESAR REGENCY****Setia Budi****Universitas Terbuka****E-Mail: setia_buditrans@yahoo.co.id****Key words: Perception of community, planning and realization, the
Inhabitant Resettlement Program**

It is important to study community perception about inhabitant settlement program due to the fact that some activities have not worked as planned. The study is intended to study the perception of the jantho sub-district community on inhabitant resettlement program in Aweek and Bueng villages, Aceh Besar Regency as well as to analyze realization and obstacles of the program.

Primary data were collected by questionnaires and indepth interview. Fourty-five respondents were selected randomly by cluster random sampling. They include Jantho Communities, Tuha Peut, youths, villages head and his secretary, community public figures and district government officers. This study employes qualitative and quantitative approach.

This study shows that : (1) Resettlement in habitant program has give a little contribution to the improvment of the welfare of the people around the settlement management program location. (2) Road conditions, bridges, and public facilities are not satisfied. (3) there is a lack of community involmment this program has been able to improve the welfare of the people that have been allocated in the area, but it is not significantly affected the surounding community.

Some conclusions can be drawn from this study: (1) The settlement program of inhabitants tend to be exclusive, sentralistic, and did not make the community as a subjects of the program. (2) Infrastructure that has been built in the settlement management program is not have a good quality. (3) The program is project oriented and shorth-term program, which is not sustainable. Involmment of community in the resettlement program of transmigration is required from the beginning of planning process up to the evaluation. The community should be involved as subject in the transmigration development program.

ABSTRAK

PERSEPSI MASYARAKAT KECAMATAN KOTA JANTHO KABUPATEN ACEH BESAR TERHADAP PROGRAM PENATAAN PEMUKIMAN PENDUDUK DI DESA AWEEK DAN DESA BUENG

Setia Budi

Universitas Terbuka

E-Mail: setia_buditrans@yahoo.co.id

Kata Kunci: persepsi masyarakat, rencana dan realisasi, program penataan pemukiman penduduk

Studi mengenai persepsi masyarakat tentang program pemukiman penduduk penting disebabkan karena banyak kegiatan program yang tidak berjalan sesuai rencana. Tujuan penelitian adalah menganalisis persepsi masyarakat Kecamatan Kota Jantho terhadap program penataan pemukiman penduduk di Desa Aweek dan Desa Bueng, menganalisis realisasi program, dan menganalisis kendala selama program dilaksanakan.

Penelitian ini menggunakan teknik Cluster Random Sampling yang terdiri dari masyarakat biasa, Tuha Peut, pemuda/i, Perangkat Desa, Tokoh masyarakat, dan Pejabat Struktural pemerintah. Jumlah seluruh sample 45 responden. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif.

Sebahagian besar responden berpendapat bahwa: (1) program pemukiman sedikit sekali memberikan manfaat dalam mensejahterakan penduduk sekitar lokasi program penataan pemukiman. (2) kondisi jalan penghubung, jembatan, dan fasilitas umum relatif kurang baik. (3) Peran serta masyarakat sekitar sangat kurang. Program penataan pemukiman ini telah mampu mensejahterakan masyarakat yang ditempatkan tetapi belum berdampak positif terhadap masyarakat di sekitar lokasi program penataan pemukiman.

Beberapa kesimpulan yang dapat ditarik dalam penelitian ini: (1) program penataan pemukiman penduduk di lokasi penelitian bersifat eksklusif, sentralistik, dan tidak menjadikan masyarakat sebagai subjek dari program. (2) Sarana dan prasarana yang telah dibangun di lokasi program penataan pemukiman tidak berkualitas baik, dan (3) Program penataan pemukiman di lokasi penelitian berorientasi proyek sehingga bersifat jangka pendek, dimana begitu program berakhir maka kegiatan yang direncanakan tetap berjalan dalam kenyataan tidak berlanjut. Diperlukan keterlibatan masyarakat dalam program penataan pemukiman daerah transmigrasi sejak proses perencanaan sampai evaluasi program sehingga masyarakat juga ikut berperan sebagai subjek dalam program pembangunan transmigrasi.



UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK

PERNYATAAN

TAPM yang berjudul **Persepsi Masyarakat Kecamatan Kota Jantho Kabupaten Aceh Besar Terhadap Program Penataan Pemukiman Penduduk Di Desa Aweek Dan Desa Bueng**, adalah hasil karya saya sendiri, dan seluruh sumber yang di kutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila di kemudian hari ternyata di temukan penjiplakan (plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi akademik.

Jakarta, Mei 2010
Yang Menyatakan,

Setia Budi
Nim: 015227648

**LEMBARAN PERSETUJUAN TAPM**

Judul TAPM : Persepsi Masyarakat Kecamatan Kota Jantho Kabupaten Aceh Besar Terhadap Program Penataan Pemukiman Penduduk Di Desa Aweek Dan Desa Bueng.

Penyusun TAPM : Setia Budi
NIM : 015227648
Program Studi : Magister Administrasi Publik
Hari/Tanggal : Sabtu/22 Mei 2010

Menyetujui:

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Ir. Evi Lisna, M.Sc
NIP. 19681012 1992 03 2 001

Prof.Dr. Paulina Pannen,M.L.S
NIP. 19612101 1986 03 2 003

Mengetahui,

Ketua Bidang Ilmu Sosial dan Politik
Program Magister Administrasi Publik

Direktur Program Pascasarjana

Dra.Susanti,M.Si.
NIP.19671214 199303 2 002

Prof.Dr.H.Udin.S.Winataputra, MA
NIP.19451007 197302 1 001



**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS TERBUKA**

Jl. Cabe Raya, Pondok Cabe Ciputat 15418
Tlp. 021.7415050, Fax 021.7415588

Kepada

Yth. Direktur PPs UT

**Jl. Cabe Raya, Pondok Cabe
Tangerang 15418**

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya selaku pembimbing TAPM dari Mahasiswa,

Nama/NIM : Setia Budi/015227648

Judul TAPM : Persepsi Masyarakat Kecamatan Kota Jantho Kabupaten Aceh Besar Terhadap Program Penataan Pemukiman Penduduk di Desa Aweek dan Desa Bueng

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa TAPM dari Mahasiswa yang bersangkutan sudah selesai sehingga dinyatakan sudah layak uji dalam ujian sidang Tugas Akhir Program Magister (TAPM).

Demikian keterangan ini dibuat untuk menjadi periksa.

Banda Aceh, April 2010

Pembimbing I,

Pembimbing II,

(DR. Ir. Evi Lisna, M.Sc)
NIP. 19681012 1992 03 2 001

(Prof. DR. Paulina Pannen, M.L.S)
NIP.19612101 1986 03 2 003



**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS TERBUKA**

Jl. Cabe Raya, Pondok Cabe Ciputat 15418
Tlp. 021.7415050, Fax 021.7415588

BIODATA

- Nama : Setia Budi
- N I M : 015227648
- Tempat dan Tanggal Lahir : Meureudu, 23 Mei 1965
- Registrasi Pertama : 2007.2
- Riwayat Pendidikan : 1. Sekolah Dasar Negeri 4 Meureudu tamat tahun 1976
2. Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Banda Aceh tamat tahun 1980
3. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Meureudu tamat tahun 1983
4. Fakultas Teknik Universitas Syiah Kuala Banda Aceh Jurusan Teknik Kimia tamat tahun 1990
5. Sekolah Tinggi Teknik Iskandar Thani Banda Aceh Jurusan Teknik Sipil tamat tahun 1997
- Riwayat Pendidikan Struktural: 1. Diklat Adumla tahun 2000
2. Diklat Pimpinan Tingkat III tahun 2002
3. Diklat Pimpinan Tingkat II tahun 2007 LAN RI
- Riwayat Pekerjaan : 1. Kepala Seksi Operasional UPTD II Dinas Praswil tahun 2002 Eselon IV.a
2. Kepala Sub Dinas Bina Marga Dinas Kimpraswil Kabupaten Pidie tahun 2003 Eselon III.a
3. Kepala Sub Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pidie tahun 2006 Eselon III.a
4. Kepala Bidang Irigasi Rawa dan Pantai Dinas Pengairan Aceh tahun 2007 Eselon III.a



5. Pj. Kepala Biro Perlengkapan Setda Prov. NAD tahun 2007 Eselon II.b
6. Wakil Kepala Dinas Mobilitas Penduduk Prov. NAD tahun 2008 Eselon II.b
7. Widyaiswara Madya pada Badan Kepegawaian Pelatihan dan Pendidikan Pemerintah Aceh tahun 2010

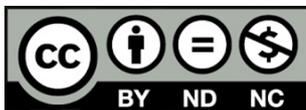
Alamat Tetap : Jl. Jeruk No. 105 Komplek Villa Buana Gardenia
Ajun Banda Aceh

Telp/HP. : 0651-49672/08126987813

Banda Aceh, Mei 2010

(Setia Budi)
NIM. 015227648

UNIVERSITAS TERBUKA



**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS TERBUKA**

Jl. Cabe Raya, Pondok cabe Ciputat 15418
Telp. 021.7415050, Fax 021.7415588

PENDAFTARAN UJIAN SIDANG

Nama : Setia Budi
Nim : 015227648
Program Studi : Administrasi Publik
Alamat/No. Hp. : Jl. Jeruk No. 105 Komp. Villa Buana Gardenia Ajun
Banda Aceh (08126987813)
Judul TAPM : Persepsi Masyarakat Kecamatan Kota Jantho Kabupaten
Aceh Besar Terhadap Program Penataan Pemukiman
Penduduk Di Desa Aweek Dan Desa Bueng
Persyaratan (terlampir) : a. LKAM
b. Keterangan TAPM layak-uji dari Pembimbing
c. Bukti Setor Pembayaran Biaya Ujian Sidang
d. TAPM rangkap 5 (lima)

Pemilihan Waktu Pelaksanaan Ujian Sidang .

Hari : Sabtu
Tanggal : 22 Mei 2010
Waktu : Pukul 16.00 s/d 18.00 Wib

Menyetujui,
Pembimbing I

Banda Aceh, April 2010
Yang Mendaftar,

DR. Ir. Evi Lisna, M.Sc
NIP. 19681012 1992 03 2 001

Setia Budi
NIM: 015227648

Pembimbing II

Mengetahui,
Kepala UPBJJ-UT Banda Aceh

Prof. DR. Paulina Pannen, M.L.S
NIP.19612101 1986 03 2 003

Drs. Mujadi, M.Pd
NIP.19590217 199010 1 001



**UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK**

PENGESAHAN

Nama : Setia Budi
Nim : 015227648
Program Studi : Administrasi Publik
Judul TAPM : Persepsi Masyarakat Kecamatan Kota Jantho Kabupaten Aceh Besar Terhadap Program Penataan Pemukiman Penduduk Di Desa Aweek Dan Desa Bueng

Telah dipertahankan dihadapan sidang panitia penguji Tugas Akhir Program Magister (TAPM) Administrasi Publik Program Pascasarjana Universitas Terbuka pada:

Hari/Tanggal : Sabtu / 22 Mei 2010
Waktu : 16.30 s/d 18.30 WIB

Dan telah dinyatakan LULUS
Panitia Penguji TAPM

Ketua Komisi Penguji : DR. Suciati, M.Sc :
Nip. 19550213 198503 2 001

Penguji Ahli : DR. Wilfridus B. Elu, M.Si :

Pembimbing I : DR. Ir. Evi Lisna, M.Sc :
NIP. 19681012 1992 03 2 001

Pembimbing II : Prof. DR. Paulina Pammen, M.L.S :
NIP. 19612101 1986 03 2 003

KATA PENGANTAR

Mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, atas segala rahmat dan hidayah-Nya penulis telah dapat merampungkan penulisan dan penyusunan Tugas Akhir Program Magister (TAPM) ini dengan judul **“Persepsi Masyarakat Kecamatan Kota Jantho Kabupaten Aceh Besar Terhadap Program Penataan Pemukiman Penduduk di Desa Aweek dan Desa Bueng”**. Tujuan dari penulisan Tugas Akhir Program Magister (TAPM) ini adalah untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Magister Sains dalam Ilmu Administrasi Publik pada Universitas Terbuka.

Banyak kesulitan dan hambatan dalam penulisan TAPM ini, mulai dari pemilihan tema penelitian, pengumpulan dan pengolahan data, pembimbingan dan lain sebagainya. Hal ini merupakan tantangan dan pengalaman yang sangat berharga bagi penulis. TAPM ini dapat terselesaikan dengan baik atas dukungan, bantuan, bimbingan serta saran dari para pihak, maka dengan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Gubernur Provinsi Aceh beserta jajarannya yang telah memberi izin kepada penulis untuk dapat mengikuti proses belajar pada Program Pasca Sarjana UPBJJ-UT.
2. Dr. Evi Lisna, M.Sc selaku pembimbing pertama dari Universitas Syiah Kuala yang telah banyak membimbing penulis dengan penuh kesabaran sehingga rampungnya TAPM ini.



3. Prof. Dr. Paulina Pannen, M.L.S selaku pembimbing kedua dari Universitas Terbuka Jakarta yang juga telah banyak berperan membantu dalam membimbing penulis untuk menyelesaikan TAPM ini.
4. Prof. Dr. H. Udin S. Winataputra, MA sebagai Direktur Program Pasca Sarjana Universitas Terbuka di Jakarta.
5. Surachman Dimiyati, Ph.D dkk selaku Pengelola Program Pasca Sarjana Universitas Terbuka di Jakarta.
6. Dra. Susanti, M.Si selaku Ketua Bidang Program Pasca Sarjana Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Terbuka yang selalu memberikan semangat dan motivasi kepada penulis untuk dapat menyelesaikan penulisan TAPM ini.
7. Dr.Suciati,M.Sc, sebagai Ketua komisi Penguji dan Tim Penguji Ahli yang telah memberikan saran dan arahan kepada penulis dalam penyempurnaan TAPM ini.
8. Drs. Mujadi, M.Pd selaku Kepala UPBJJ-UT Banda Aceh.
9. Prof. Dr. Syafe'i Ibrahim, M.Si selaku Kepala Pokjar UPBJJ-UT Banda Aceh.
10. Segenap Pengasuh Modul dan *Tutorial Online* (Tuton) Program Magister Administrasi Publik Universitas Terbuka.
11. Ucapan terima kasih khusus kepada istri dan anak-anakku tercinta yang selalu setia membantu dan memberikan dorongan serta inspirasi kepada penulis untuk mengikuti perkuliahan hingga selesainya penulisan TAPM ini.



12. Ucapan terima kasih kepada berbagai pihak yang tidak dapat penulis sebut satu persatu yang juga telah memberikan bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga dapat terselesaikan penulisan TAPM ini dengan baik.

Penulis menyadari bahwa TAPM ini masih jauh dari kesempurnaan, maka penulis sangat berharap saran-saran perbaikan dari berbagai pihak untuk kesempurnaan, untuk itu penulis tak lupa mengucapkan terima kasih.

Banda Aceh, Mei 2010

Penulis,

Setia Budi

UNIVERSITAS TERBUKA

DAFTAR ISI

	Halaman
Abstrak	i
Kata Pengantar	x
Daftar Isi	xiii
Daftar Tabel	xv
Daftar Lampiran	xvii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	8
D. Kegunaan Penelitian	8
BAB II KERANGKA TEORITIK	
A. Kajian Teoritika	10
1. Pengertian Kebijakan	10
2. Konsep Evaluasi Kebijakan	13
3. Konsep Persepsi	20
4. Konsep Kebijakan Transmigrasi	27
5. Konsep Penataan Pemukiman Transmigrasi	29
6. Beberapa Penelitian Mengenai Perkembangan Lahan ..	31
B. Kerangka Berpikir	32
C. Definisi Konsep dan Operasional	34
1. Transmigrasi	34
2. Transmigran	36
3. Wilayah Pengembangan Transmigrasi (WPT)	37
4. Permukiman	38
5. Lokasi Pemukiman Transmigrasi (LPT)	39
6. Persepsi	39
7. Evaluasi	40
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Desain Penelitian	41
B. Populasi dan Sampel	42
C. Instrumen Penelitian	43
D. Prosedur Pengumpulan Data	45
E. Metode Analisis Data	46
BAB IV TEMUAN DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	47
1. Letak Administrasi	47
2. Letak Geografis	48
3. Aksesibilitas Lokasi Penelitian	48

4.	Topografi	49
5.	Iklim.....	50
6.	Hidrologi	51
7.	Jenis Tanah	51
8.	Tata Guna Lahan	52
9.	Kesuburan Tanah.....	53
10.	Tekstur Tanah	53
11.	Flora dan Fauna	53
B.	Program Penataan Penduduk.....	54
1.	Kependudukan.....	54
2.	Pendidikan	56
3.	Tempat Peribadatan	57
4.	Kesehatan.....	59
5.	Kepemilikan Alat Komunikasi.....	60
6.	Sarana Penerangan Listrik.....	61
C.	Penyajian Data dan Pembahasan	61
1.	Identitas Responden.....	62
2.	Uji Validitas dan Reliabilitas.....	64
3.	Pengenalan Terhadap Program Penataan Permukiman	66
a.	Tujuan Program	67
b.	Kepentingan Program	73
c.	Proses Program	81
d.	Efek Program.....	87
4.	Terjadinya Transformasi SDM dan Alih Tehnologi.....	91
5.	Peran Serta Masyarakat	93
a.	Perhatian Responden Terhadap Kestinambungan Program Penataan.....	93
b.	Perunya Musyawarah untuk Setiap Program Pembangunan.....	96
BAB V	SIMPULAN DAN SARAN	
A.	Simpulan	100
B.	Saran	101
DAFTAR PUSTAKA	104

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
2.1 Kerangka Pikir.....	33
3.1 Populasi dan Sampel Penelitian.....	43
3.2 Instrumen dan Variabel Penelitian	44
4.1 Luas Kecamatan Kota Jantho Menurut Desa.....	48
4.2 Luas Wilayah Lokasi Desa Penataan di Kecamatan Kota Jantho	48
4.3 Aksesibilitas Lokasi Penelitian Kecamatan Kota Jantho Kabupaten Aceh Besar	49
4.4 Topografi Lahan di Kecamatan Kota Jantho	49
4.5 Klasifikasi Penggunaan Lahan di Kecamatan Kota Jantho	52
4.6 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Desa dalam Kecamatan Kota Jantho	55
4.7 Jumlah Sekolah Menurut Jenis Pendidikan Dalam Kota Jantho	57
4.8 Jumlah Tempat Ibadah dan Pengajian di Kecamatan Kota Jantho.....	58
4.9 Sarana Kesehatan Dirinci menurut Desa Dalam Kecamatan Kota Jantho	60
4.10 Pendidikan responden.....	62
4.11 Jenis Pekerjaan Responden.....	63
4.12 Lama Responden yang Menetap di Desa Kota Jantho Lebih dari 5 Tahun.....	63
4.13 Hasil Pengujian Validitas Untuk Masing-masing Pertanyaan Variabel	65
4.14 Hasil Pengujian Reliabilitas Untuk Masing-masing Variabel.....	66
4.15 Jawaban Responden terhadap tujuan Program manfaat terhadap kesejahteraan penduduk setempat.....	67
4.16 Jawaban responden terhadap tujuan program manfaat dalam mensejahterakan warga sekitar	68
4.17 Jawaban responden terhadap tujuan program Terciptanya Rasa Persatuan dan Kesatuan antar Warga	71
4.18 Jawaban responden terhadap Kepentingan program pengakuan hak kepemilikan lahan usaha tani.....	73
4.19 Jawaban responden terhadap Kepentingan program Terciptanya Keserasian Lingkungan yang asri.....	75
4.20 Jawaban responden terhadap Kepentingan program dalam Penentuan Calon Transmigran.....	77
4.21 Jawaban responden terhadap Kepentingan program dalam perbandingan penempatan 50% : 50%	78
4.22 Jawaban responden terhadap Kepentingan program dalam perbandingan penempatan 25% -75%	79
4.23 Jawaban responden terhadap Kepentingan program dalam perbandingan penempatan 0% - 100%	79
4.24 Jawaban responden terhadap Proses program Untuk tanggapan terhadap sarana dan prasarana kondisi jalan penghubung.....	81



4.25	Jawaban responden terhadap Proses program Untuk tanggapan terhadap sarana dan prasarana kondisi jembatan.....	83
4.26	Jawaban responden terhadap Proses program Untuk tanggapan terhadap kondisi bangunan rumah pemukim.....	84
4.27	Jawaban responden terhadap Proses program Untuk tanggapan terhadap bangunan kondisi fasilitas umum	86
4.28	Jawaban responden terhadap efek program Untuk tanggapan terhadap Terjadinya kecemburuan sosial antara warga desa (dampak negatif).....	87
4.29	Jawaban responden terhadap efek program Untuk tanggapan terhadap Terjadinya penataan dan Persebaran Penduduk yang seimbang.....	89
4.30	Jawaban responden terhadap efek program Untuk tanggapan terhadap Terjadinya Transformasi SDM dan Alih Tehnologi.....	91
4.31	Perhatian responden terhadap kesinambungan program penataan.....	93
4.32	Jawaban responden terhadap Perlunya musyawarah dalam setiap program pembangunan.....	96

UNIVERSITAS TERBUKA



TABEL LAMPIRAN

Lampiran

Halaman

1. Surat Keputusan Bupati Aceh Besar Nomor: 133 Tahun 2002 tentang Penetapan Calon Lokasi Pembangunan Permukiman Penduduk.
2. Peta Kecamatan Kota Jantho
3. Peta Kecamatan Kabupaten Aceh Besar

UNIVERSITAS TERBUKA

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Transmigrasi dalam makna yang sederhana berarti perpindahan penduduk dari suatu daerah (pulau) yang berpenduduk padat ke daerah (pulau) lain yang berpenduduk jarang. Berdasarkan pengertian yang *sederhana* ini transmigrasi lalu memiliki kaitan erat dengan aspek distribusi penduduk dalam sebuah negara untuk keperluan terciptanya harmoni atau keseimbangan secara spasial. Akan tetapi transmigrasi dalam makna yang sederhana itu sama sekali tidak menafikan hakekat transmigrasi yang sesungguhnya secara multidimensional, yaitu perpindahan penduduk secara sukarela untuk meningkatkan kesejahteraan. Bahkan dengan corak yang multidimensional itu transmigrasi tidak mungkin dimengerti secara terbatas semata sebagai perpindahan manusia dari suatu wilayah ke wilayah lain dalam suatu negara.

Di Indonesia transmigrasi bukanlah fenomena baru. Secara historis program perpindahan penduduk ini telah berlangsung sejak tahun 1905 yang ditandai dengan mobilisasi penduduk Pulau Jawa oleh kolonial Belanda sebanyak 155 KK atau 815 jiwa ke Desa Gedong Tataan Karesidenan Lampung dengan tujuan untuk dipekerjakan di kebun-kebun milik Belanda (Swasono:1985). Perpindahan penduduk ini terus dilanjutkan hingga Indonesia merdeka sekaligus digantikannya istilah "kolonisasi" menjadi transmigrasi. Program ini terus berjalan hingga akhirnya dilaksanakan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Secara keseluruhan transmigrasi sejak awal hingga era otonomi saat ini sudah berhasil

menempatkan, memindahkan atau mentransmigrasikan penduduk sebanyak 2.027.116 KK (Suparno, 2007:47).

Dalam perkembangan dari tahun ke tahun program transmigrasi terus dibenahi baik sistem, landasan, tujuan dan sasaran pembangunan yang disesuaikan dengan perkembangan masyarakat Indonesia. Sebagai bagian dari agenda reformasi, kemudian lahirlah Undang-Undang Nomor: 22 Tahun 1999 tentang otonomi daerah kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah. Perangkat peraturan penting inilah yang melandasi berlakunya sistem otonomi daerah dan desentralisasi dalam hubungan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah. Pemerintah Pusat harus berbagi wewenang dalam sejumlah urusan dengan Pemerintahan Daerah, termasuk urusan transmigrasi menjadi *space of authority* Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Pusat hanya berperan sebagai regulator dan fasilitator.

Agenda reformasi sebagai prasyarat untuk menata kehidupan berbangsa dan bernegara ke arah yang lebih baik, Salah satu butir adalah otonomi daerah sebagai faktor penting dalam mengelola "ke Indonesiaan" yang dijadikan tonggak hadirnya politik otonomi daerah di Indonesia. Transmigrasi memasuki sebuah era baru dengan berlakunya otonomi daerah itu sendiri.

Pasal 18 UUD 1945 hasil amandemen menyebutkan, Pemerintah Daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintah yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat. Selanjutnya ayat (6) pasal tersebut menyatakan, Pemerintah Daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Dilanjutkan ayat (7) yang mengatakan, susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah

diatur dalam undang-undang. Ketiga ayat tersebut menjadi landasan Undang-Undang Nomor: 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang memfusikan Undang-Undang Nomor : 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah.

Pelaksanaan otonomi daerah sekarang ini, khususnya program transmigrasi diselaraskan dengan kebutuhan daerah yang dilaksanakan berlandaskan spirit "kerjasama antar daerah". sehingga terbentuk mekanisme koordinasi antara Pemerintah Daerah pengirim transmigrasi dengan Pemerintah Daerah penerima transmigrasi. Pemerintah Pusat (baca: Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi) sepenuhnya hanya memfasilitasi berjalannya mekanisme koordinasi tersebut.

Terdapat dua hal penting dalam pelaksanaannya yaitu ; (i) Pada periode awal reformasi, transmigrasi dilaksanakan erat kaitannya dengan penanggulangan pengungsi; (ii) Pelaksanaan transmigrasi pada era otonomi yang disebut dengan "paradigma baru transmigrasi".

Setiap daerah mempunyai kebijakan menjembatani program transmigrasi dalam rangka mengakselerasi peningkatan kesejahteraan transmigran. Ini diperlukan instrumen strategis yakni Kerjasama Antar Daerah sebagaimana diatur dalam Bab IX Pasal 195 Ayat (1) Undang-Undang Nomor: 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa: dalam rangka peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah dapat mengadakan kerjasama dengan daerah lain yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik, sinergi dan saling menguntungkan.

Transmigrasi dalam era partisipasi saat ini bertujuan mengembangkan kebijakan akselerasi pembangunan daerah, yang didasarkan pada tiga pendekatan pokok yaitu; (1) Pendekatan kultural, dengan mengembangkan nilai-nilai masyarakat

setempat (*local indigenous*) dalam perumusan program transmigrasi (2) Pendekatan kebutuhan sumberdaya manusia dan (3) Pendekatan sistem Undang-Undang Nomor: 32 Tahun 2004 sebagai dasar pelaksanaan otonomi daerah, dalam hal pembangunan transmigrasi, Pemerintah Pusat bertindak sebagai regulator.

Undang-Undang Nomor: 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian, pembangunan transmigrasi tidak lagi mengenal adanya daerah asal maupun daerah transmigrasi. Perubahan wacana dan paradigma pembangunan transmigrasi tersebut memiliki implikasi sebagai berikut :

- a. Bahwa pembangunan transmigrasi dilaksanakan sesuai kebutuhan dan permintaan (*demand side*) masyarakat dan pemerintah daerah setempat;
- b. Pemerintah Pusat berfungsi sebagai fasilitator dan pemberian arahan (*steering*);
- c. Masyarakat dan pemerintah daerah berfungsi sebagai pelaksana.

Paradigma baru pembangunan transmigrasi yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor: 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor: 2 Tahun 1997 tentang Penyelenggaraan Transmigrasi, memungkinkan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dapat melaksanakan mobilisasi penduduk melalui program penataan pemukiman penduduk.

Kondisi masyarakat di wilayah Kecamatan Kota Jantho khususnya kaum dhuafa pendapatannya masih rendah, yang menjadi permasalahan adalah belum terlaksananya pemanfaatan lahan usaha tani untuk dilakukan pengolahan agar dapat meningkatkan pendapatan masyarakat sebagai faktor produksi, serta belum terlihat adanya pembinaan secara berkesinambungan oleh pemerintah daerah terhadap warga dalam rangka mewujudkan pemberdayaan ekonomi masyarakat sehingga adanya kesenjangan akibat kondisi keamanan yang tidak kondusif.

B. Perumusan Masalah

Program penataan kawasan pemukiman penduduk merupakan salah satu alternatif pemecahan ketimpangan masalah kependudukan sebagai dampak pasca konflik dan masalah ekonomi bagi kaum *dhuafa* sehingga terjadi ketidakseimbangan persebaran penduduk. Ketidakseimbangan persebaran penduduk antar wilayah tersebut telah menimbulkan berbagai macam kesenjangan seperti masalah sosial, ekonomi, adat istiadat, keamanan lingkungan dan lain sebagainya. Pemerintah Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam melalui Dinas Mobilitas Penduduk (baca: Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk) yang memiliki program penataan pemukiman penduduk ke daerah-daerah yang potensial sumberdaya alamnya dan memungkinkan untuk dikembangkan.

Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam melalui Dinas Mobilitas Penduduk dalam upaya mendukung pemulihan keamanan, mewujudkan pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui penanganan pengungsi, pembangunan daerah terisolir dan memukimkan kaum *dhuafa*. Paradigma baru Dinas Mobilitas Penduduk Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dalam otonomi daerah bahwa program memukimkan *kaum dhuafa* merupakan salah satu dari sembilan kelompok yang menjadi sasaran penataan pemukiman. Program tersebut dilaksanakan melalui program penataan pemukiman penduduk di beberapa kabupaten termasuk di Kabupaten Aceh Besar tepatnya di Desa Aweek dan Desa Bueng Kecamatan Kota Jantho.

Program penataan pembangunan pemukiman penduduk yang diprakarsai oleh Dinas Mobilitas Penduduk saat itu dilaksanakan berdasarkan Keputusan Bupati Aceh Besar Nomor: 133 tahun 2002 tentang penetapan calon lokasi pembangunan

pemukiman penduduk untuk *kaum dhuafa* di desa Aweek dan desa Bueng Kecamatan kota Jantho. Bagaimana persepsi/tanggapan masyarakat di sekitar lokasi penataan pemukiman terhadap kebijakan Bupati Aceh Besar? Penelitian ini sangat penting dilakukan untuk mengetahui bagaimana persepsi masyarakat sekitar dan sejauhmana program tersebut dapat dilaksanakan, manfaat apa yang dapat dirasakan oleh masyarakat sekitar serta kendala apa saja yang dihadapi. Beberapa indikator yang ingin diterapkan sehingga penataan tersebut memenuhi kriteria suatu pemukiman yang asri dan sehat lingkungan antara lain :

1. Setiap warga pemukim akan memiliki rumah tipe 36 m² yang layak huni dan tertata dengan baik sehingga memenuhi lingkungan yang sehat.
2. Setiap warga pemukim akan disediakan lahan usaha pertanian seluas 1 ha per KK.
3. Setiap warga pemukim akan dibina selama 1 (satu) tahun dengan distimulasi beberapa paket pembinaan seperti jatah hidup berupa beras, alat-alat dapur, perlengkapan masak, tempat tidur berupa kasur dan bantal serta sarana produksi dan sarana pertanian lainnya selama setahun masa pembinaan.

Program penataan ini telah dilaksanakan pada tahun anggaran 2003 melalui dana DASK-APBD Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam meliputi sebanyak 50 KK yang diperuntukan bagi masyarakat *dhuafa* Desa Aweek 30 KK dan Desa Bueng 20 KK. Berdasarkan asumsi bahwa perpindahan penduduk didasarkan atas kesadaran, potensi sumberdaya manusia dan lapangan kerja akan memberikan peluang untuk berkembang. Program penataan pembangunan pemukiman penduduk di Desa Aweek dan Desa Bueng tersebut terlaksana karena adanya permintaan warga yang bersangkutan kepada Bupati Aceh Besar agar di desa mereka dilaksanakan penataan

pemukiman bagi *kaum miskin/dhuafa* yang ada. Disamping itu, potensi peluang dan prospek kedua desa tersebut ke depan akan mampu mengatasi ketimpangan masalah kependudukan dalam rangka mendukung pertumbuhan perkembangan ekonomi masyarakat serta kebijakan pembangunan otonomi daerah.

Kondisi kehidupan *kaum dhuafa* di lokasi penataan Desa Aweek dan Desa Bueng pada umumnya memiliki persoalan yang sangat kompleks dibandingkan dengan persoalan kehidupan rumah tangga yang ada di desa sekitar lokasi penelitian. Kehidupan Rumah tangga *kaum dhuafa* memiliki ciri-ciri khusus dan masalah seperti; pendapatan ekonomi yang masih di bawah garis kemiskinan, tingkat kesehatan yang masih rendah, kepemilikan lahan usaha tani sebagai faktor produksi sangat terbatas, terjadinya kesenjangan pembangunan ekonomi, sarana dan prasarana yang tidak mendukung sehingga kesejahteraan penduduk tidak dapat berjalan dengan baik, kondisi inilah yang merupakan permasalahan sangat mendasar dan penting untuk segera diantisipasi. Sejalan dengan hal tersebut melalui kegiatan penataan pemukiman penduduk di dua desa tersebut, telah pula dibangun sebanyak 50 unit rumah transmigrasi tipe 36 m², membuka lahan usaha tani seluas 50 ha, membangun jalan poros/penghubung sepanjang 3 km, menyediakan gorong-gorong sebanyak 16 unit serta ikut membantu paket saprodi/saprotan serta catu pangan selama satu tahun. Sesuai norma masa pembinaan yang hanya 1 (satu) tahun, sejak tahun 2004 kedua lokasi penelitian ini telah habis masa pembinaan dan telah diserahkan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Besar untuk melanjutkan pembinaannya.

Berdasarkan kondisi dan situasi tersebut, maka perlu dilakukan kajian yang dibatasi lingkupnya tentang persepsi masyarakat di sekitar lokasi penataan pemukiman penduduk di desa Aweek dan desa Bueng tentang penataan pemukiman

penduduk serta mengevaluasi sejauhmana kebijakan berdasarkan Keputusan Bupati Aceh Besar Nomor: 133 tahun 2002 dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana dan kendala apa saja yang dihadapi dalam pelaksanaan program tersebut.

Sehubungan dengan uraian tersebut, permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah persepsi masyarakat Kecamatan Kota Jantho terhadap program penataan pemukiman penduduk di Desa Aweek dan Desa Bueng?
2. Apakah program tersebut sesuai dengan rencana dan aturan yang telah ditetapkan?
3. Kendala apa saja yang dihadapi selama program penataan pemukiman penduduk tersebut dilaksanakan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis persepsi masyarakat Kota Jantho terhadap program penataan pemukiman penduduk di Desa Aweek dan Desa Bueng.
2. Untuk menganalisis rencana dan realisasi program yang telah dilaksanakan.
3. Untuk mengetahui kendala apa saja yang ditemui selama program penataan pemukiman penduduk tersebut dilaksanakan.

D. Kegunaan Penelitian

1. Hasil penelitian ini kiranya dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dan masukan dalam ilmu kebijakan publik. Dalam hal penataan pembangunan pemukiman penduduk miskin dan dhuafa di Kabupaten Aceh Besar.

2. Hasil penelitian ini dapat dipergunakan sebagai masukan bagi pihak-pihak yang berkaitan dengan program penataan pemukiman penduduk dan penerapannya dalam perencanaan dan pembangunan daerah.
3. Hasil penelitian ini dapat dipergunakan oleh Pemerintah Daerah baik Kabupaten Aceh Besar maupun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dalam merespon tanggapan dan keinginan masyarakat Kecamatan Kota Jantho khususnya dan Kabupaten Aceh Besar umumnya terhadap bentuk, cara dan proses penataan pemukiman penduduk pada masa yang akan datang.

UNIVERSITAS TERBUKA

BAB II

KERANGKA TEORITIK

A. Kajian Teoritik

1. Pengertian Kebijakan

Istilah kebijakan (*policy*) penggunaannya sering dipertukarkan dengan istilah lain seperti tujuan (*goal*), program, keputusan, undang-undang, ketentuan-ketentuan, usulan-usulan dan rancangan-rancangan besar Wahab (1990:1). Menurut Anderson dalam Islamy (2001:17), kebijakan adalah: “*A purposive course of action followed by an actor or set of actors in dealing with problem or matter of concern*” (serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau kelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu).

Pengertian kebijakan publik (*public policy*) Dye dalam Islamy (2001:18) memberikan definisi kebijakan publik sebagai “*is whatever governments choose to do or nor to do*”. Menurut Edwards dan Sharkansky dalam buku yang sama mengartikan *public policy* yang hampir mirip dengan definisi Dye, yaitu sebagai berikut: “*is what governments say and do or not and it is the goals or purpose of goverments programs...*” (adalah apa yang dinyatakan dan dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah. Kebijakan itu berupa sasaran atau tujuan program-program pemerintah). Kemudian Edward dan Sharkansky mengatakan juga bahwa kebijakan negara itu dapat ditetapkan secara jelas dalam bentuk pidato-pidato pejabat teras pemerintah ataupun program-program dan tindakan-tindakan yang dilakukan pemerintah. Menurut Hoogwood dan Gun dalam Wahab (1990:16) salah satu landasan yang sering digunakan oleh para ahli dan praktisi dalam pengelompokan

definisi kebijakan adalah meletakkan konsep kebijakan sebagai suatu permasalahan yang mendesak untuk segera diatasi.

Berkaitan dengan definisi kebijakan Anderson yang telah dikemukakan, Anderson dalam Islamy (2001:19) mengatakan “*public policies are those policies developed by governmental bodies and officials*” (kebijakan publik adalah kebijakan-kebijakan yang dikembangkan oleh badan-badan dan pejabat-pejabat pemerintah). Jadi menurut Anderson setiap kebijakan yang dikembangkan oleh badan atau pejabat pemerintah dapat disebut kebijakan publik. Kebijakan publik tidak hanya dibuat oleh lembaga/badan negara tertinggi/tinggi saja seperti di negara kita MPR dan Presiden tetapi juga oleh badan/pejabat disemua jenjang pemerintah.

R.S Parker dalam Wahab (1999:31) mengajukan definisi kebijakan Negara sebagai suatu tujuan atau serangkaian azas tertentu melalui tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam waktu tertentu berkaitan dengan subjek atau tanggapan terhadap suatu kondisi kritis yang perlu untuk segera ditangani atau diselesaikan.

Tujuan atau serangkaian azas yang menjadi keputusan atau pilihan pemerintah tersebut dituangkan dalam bentuk pengalokasian nilai secara paksa. Pendapat ini dikemukakan oleh Osborne (2000) yang memberikan definisi kebijakan negara sebagai kegiatan pengalokasian nilai-nilai yang sah secara paksa kepada seluruh anggota masyarakat. Berdasarkan definisi ini kebijakan dapat bersifat memaksa dan hanya pemerintahlah yang secara sah dapat mengalokasikan nilai-nilai kepada masyarakat. Hal ini disebabkan karena pemerintah sebagai “*Authorities in a political system*” yaitu para penguasa dalam suatu sistim politik yang terlibat dalam masalah sehari-hari yang telah menjadi tanggung jawab atau peranannya.

Untuk memahami suatu kebijakan publik, Winarno. B (2001:10) menyatakan kebijakan publik adalah suatu kebijakan yang dibuat oleh pemerintah/negara yang ditujukan untuk kepentingan masyarakat yang bertujuan untuk memecahkan masalah-masalah yang ada di dalam masyarakat. Selanjutnya disebutkan pula bahwa di Indonesia dikenal adanya tingkatan-tingkatan kebijakan publik, yaitu kebijakan publik lingkup nasional, kebijakan umum dan kebijakan pelaksanaan. Di samping itu ada kebijakan publik lingkup wilayah yang meliputi kebijakan umum dan kebijakan pelaksanaan.

Pada prinsipnya kebijakan publik menurut Dwiyanto dalam Wahab (1990:7) dapat diklarifikasikan menjadi 2 (dua) kelompok. Kelompok pertama, memberikan batasan tidak menyebut siapa pelaku atau pengambil kebijakan publik, kelompok ini diwakili Derbyshire dkk, yang menyebutkan kebijakan publik adalah sekelompok rencana kegiatan yang dimaksudkan untuk memberikan efek perbaikan terhadap kondisi-kondisi sosial ekonomi. Batasan lain adalah bahwa kebijakan publik merupakan produk akhir setiap pemerintahan dalam arti merupakan kesepakatan antara eksekutif dan legislatif.

Di pihak lain selalu ada pelaku dalam suatu proses kebijakan belum secara jelas mencantumkan siapa orang atau lembaga yang dianggap sebagai pelakunya. Kelompok kedua diwakili Hofferbert (1987) menyatakan bahwa kebijakan publik adalah hubungan antara lembaga, pemerintah dengan lingkungannya. Selanjutnya disebutkan juga bahwa kebijakan publik merupakan hasil keputusan yang diambil oleh pelaku-pelaku tertentu untuk tujuan politik.

Effendi (2001:4) memberikan batasan kebijakan publik adalah suatu tindakan pemerintah yang bertujuan untuk mengatasi masalah-masalah yang ada dalam

masyarakat antara lain tidak mau bertanggung jawab. Jadi kebijakan publik merupakan tindakan pemerintah yang bertujuan untuk mengatasi masalah-masalah yang terjadi dalam masyarakat di mana orang lain tidak mau mengatasinya. Menurut Dye dalam Riyadi (2000:3) kebijakan publik adalah semua pilihan atau tindakan yang dilakukan pemerintah baik untuk melaksanakan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu, harus ada tujuannya (objek) dan kebijakan publik itu meliputi semua tindakan-tindakan pemerintah.

Pendapat Rose yang dikutip oleh Dunn (2000:6) menyatakan juga bahwa kebijakan publik adalah serangkaian pilihan tindakan (termasuk pilihan untuk tidak bertindak) untuk menjawab tantangan-tantangan yang menyangkut kehidupan masyarakat. Menurut Edward dan Sharkansky dalam Islamy (2001:11) kebijakan publik adalah apa yang dinyatakan dan dilakukan oleh pemerintah. Kebijakan dapat berupa sasaran atau tujuan-tujuan program pemerintah. Kebijakan publik dapat ditetapkan secara jelas dalam bentuk pidato pejabat tinggi pemerintah ataupun beberapa program dan tindakan yang dilakukan oleh pemerintah.

Dari berbagai definisi tersebut, pada dasarnya yang dimaksud dengan kebijakan publik adalah semua tindakan pemerintah baik untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu untuk mengatasi masalah-masalah dalam masyarakat, bentuknya berupa peraturan perundang-undangan atau program-program.

2. Konsep Evaluasi Kebijakan

Sebagai salah satu fungsi manajemen, evaluasi merupakan rangkaian kegiatan yang berhubungan dengan usaha untuk mempertanyakan efektifitas dan efisiensi dari suatu rencana, sekaligus mengukur secara obyektif hasil-hasil pelaksanaan kegiatan

dengan ukuran-ukuran yang dapat diterima oleh pihak-pihak yang mendukung atau tidak mendukung suatu rencana.

Menurut Sharkanski (1972:25), evaluasi adalah upaya untuk mendokumentasikan dan melakukan penilaian tentang apa yang terjadi dan juga mengapa hal itu terjadi dan juga untuk mengetahui faktor-faktor yang berpengaruh terhadap keadaan tersebut. Dengan kata lain evaluasi adalah upaya untuk mengetahui apakah ada hubungan antara program yang dilaksanakan dengan hasil yang dicapai serta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia kata evaluasi berarti penilaian hasil. Begitu juga menurut Said. Z.A (2006:12), evaluasi yaitu upaya membandingkan antara apa yang direncanakan dengan hasil yang dicapai. Dalam hal ini dapat dipahami bahwa evaluasi merupakan upaya mengukur apakah ada kaitan atau hubungan antara rancangan program dengan hasil yang dicapai.

Hasil evaluasi ini diperlukan untuk mengadakan perbaikan proyek-proyek atau program-program berikutnya untuk mengembangkan gagasan baru dalam pemilihan proyek/program baru.

Evaluasi dimaknai sebagai salah satu upaya untuk mendokumentasikan dan melakukan penilaian tentang apa yang terjadi dan juga mengapa hal itu terjadi. Bryant and White dalam Wahab (2001:23) mengatakan bahwa dalam melakukan evaluasi suatu rencana atau program dalam implementasinya maka terdapat 4 (empat) jenis kendala yaitu :

- a. Kendala psikologis yaitu evaluasi dapat menjadi ancaman.
- b. Kendala ekonomis yaitu untuk melakukan evaluasi yang baik itu mahal dalam segi waktu dan uang serta tidak selalu sepadan antara ketersediaan data dan biaya.
- c. Kendala teknis adalah kendala berupa keterbatasan kemampuan sumber daya manusia dalam pengolahan data.

- d. Data dan informasi yang tidak dapat disediakan tepat pada waktu yang dibutuhkan, akan menjadi sia-sia saja. Kejadian ini timbul ketika informasi dan data itu belum dibutuhkan maka biasanya hanya akan disimpan begitu saja tanpa diperhatikan dan diolah.

Evaluasi yang dijadikan landasan teori dalam penelitian ini adalah upaya untuk mengumpulkan informasi tentang tingkat kepercayaan dan kepedulian masyarakat Kecamatan Kota Jantho terhadap program penyelenggaraan mobilitas penduduk terkait dengan telah dilaksanakan penataan pemukiman penduduk di Desa Aweek dan Desa Bueng sesuai ketentuan sebagaimana tersebut dalam kebijakan pemerintah berupa Keputusan Bupati Aceh Besar Nomor: 133 Tahun 2002 tentang Penetapan Calon Lokasi Pembangunan Pemukiman Penduduk. Sekaligus ingin mengetahui bagaimana pendapat/persepsi masyarakat Kecamatan Kota Jantho, apakah program penataan pemukiman penduduk ini masih diperlukan di wilayah mereka.

Isaac dan Michael (1985:12) membagi evaluasi dalam beberapa model yaitu:

- a. Evaluasi yang berorientasi pada tujuan (goal) dimana penekanannya adalah menilai kemajuan suatu kegiatan.
- b. Evaluasi yang berorientasi pada kepentingan dimana evaluasi sebaiknya dapat memfasilitasi terhadap kemampuan dalam mengambil keputusan.
- c. Evaluasi yang bersifat transaksi dimana evaluasi ini menggambarkan proses program dan pandangan nilai dari tokoh masyarakat.
- d. Penelitian evaluasi yakni evaluasi yang memfokuskan pada akibat dari penerangan dan penemuan instruksi strategis.
- e. Evaluasi yang bertujuan bebas dimana evaluasi ini menilai efek dasar program dari kerangka konseptual program tersebut.
- f. Evaluasi yang berlawanan dimana evaluasi ini menghadirkan kasus yang terbaik untuk masing-masing diantara dua tafsiran (perspektif) alternatif dari nilai-nilai program dengan memilih dua sisi penilaian informasi yang sama tentang satu program.

Selanjutnya Said. Z.A (2006:26) mengemukakan bahwa evaluasi adalah suatu usaha mengukur dan memberi nilai secara objektif pencapaian hasil-hasil yang telah direncanakan sebelumnya, dimana hasil-hasil evaluasi tersebut akan menjadi umpan

balik untuk perencanaan kembali. Evaluasi dalam hal ini merupakan bagian dari tiap penyusunan program dan sebagian besar datanya harus didapatkan dari laporan pimpinan proyek (pelaksana) dan pemeriksaan langsung di lapangan (evaluasi fisik).

Kartasasmita (1996:123) mengemukakan bahwa evaluasi bertujuan untuk mengetahui seberapa jauh pembangunan telah dilaksanakan dan bagaimana hasilnya diukur dengan sasaran yang akan dicapai dan atas dasar hasil evaluasi dapat diambil langkah-langkah agar pelaksanaan pembangunan selanjutnya dan tidak merugikan pembangunan secara keseluruhan.

Dari pendapat-pendapat tersebut dapat ditarik suatu pengertian bahwa evaluasi merupakan suatu upaya untuk mengetahui seberapa efektif dan efisien suatu pembangunan dapat dilaksanakan dan diukur dengan sasaran yang akan dicapai dengan penilaian seobjektif mungkin pencapaian hasil-hasil dari perencanaan sebelumnya. Hasil dari evaluasi menjadi umpan balik untuk perencanaan selanjutnya ke arah pelaksanaan yang lebih baik. Salah satu alat ukur yang berupa data dapat diambil dari pelaporan pemimpin proyek dari pemeriksaan langsung pada kondisi empirik.

Selanjutnya Dunn (1998:35) mengemukakan bahwa evaluasi mempunyai arti yang berhubungan masing-masing menunjuk pada aplikasi beberapa skala nilai terhadap hasil kebijaksanaan dan program. Dalam arti yang lebih spesifik, evaluasi berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijaksanaan dan program.

Menurut Dunn (1998:35), pada umumnya ada tiga cara pelaksanaan evaluasi yaitu :

- a. Membandingkan fakta atau keadaan yang diperoleh dari pengamatan dan penelitian dengan sasaran yang ingin dicapai oleh suatu program.

- b. Membandingkan sebagian hasil program dalam kaitannya dengan input yang digunakan misalnya kemajuan suatu daerah yang telah melaksanakan suatu program pembangunan daerah dengan kemajuan daerah lain yang akan melaksanakan program yang sama.
- c. Membandingkan perubahan yang terjadi dari waktu ke waktu di tempat yang sama sebagai hasil pelaksanaan suatu program tertentu.

Menurut John Ernst (1994:23) menghususkan evaluasi untuk melihat program dan proses pemerintahan, namun untuk satu proyek maka evaluasi atau pemantauan merupakan alat kontrol secara berkala dengan konsisten dalam operasional dapat menunjukkan besarnya nilai manfaat serta perubahannya. Hasil pelaksanaan suatu program dapat dievaluasi dengan melibatkan masyarakat pengguna (mendukung atau tidak mendukung) untuk mendapatkan legitimasi (pengakuan) atas tingkat pengguna dari hasil pelaksanaan program/proyek. Evaluasi kebijakan adalah alat yang sedang tumbuh berkembang cepat dan berharga bagi para pembuat keputusan. Pada dasarnya, hal ini membandingkan tujuan program dengan hasilnya, yang mengukur dampak program semacam peningkatan dalam pendidikan, pekerjaan yang mungkin bisa di atribusikan pada kebijakan dengan tujuan ini.

Sementara itu pendekatan evaluasi kebijakan bisa membantu dalam analisis kebijakan, hal ini tidak menceritakan keseluruhan cerita mengenai keberhasilan atau kegagalan dari kebijakan publik Hessel Tangkilisan, N.S (2005:50).

Evaluasi suatu program merupakan penelitian terhadap aplikasi berupa skala nilai efektifitas suatu kebijaksanaan dan program. Dalam penelitian ini evaluasi dilaksanakan dengan membandingkan fakta atau keadaan yang diperoleh dari pengamatan dan penelitian lapangan dengan sasaran yang ingin dicapai oleh suatu program. Berdasarkan suatu Perencanaan Anggaran Daerah Herman dalam Mayo (1994:15) dijelaskan masing-masing pengukuran efektifitas tersebut adalah:

1. *Indikator Input*

Mengukur sumber daya yang diinvestasikan dalam suatu proses program maupun aktifitas untuk menghasilkan aktifitas untuk menghasilkan keluaran (output maupun outcome). Indikator ini mengukur jumlah sumberdaya seperti anggaran, sumber daya manusia, informasi, peraturan/kebijakan yang digunakan untuk kegiatan.

2. *Indikator Output*

Mengukur output yang dihasilkan dari suatu kegiatan baik berupa fisik maupun non fisik.

3. *Indikator Outcome*

Segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya output (efek langsung) pada jangka pendek dan menengah. Informasi yang dibutuhkan untuk mengukur outcome sering kali tidak lengkap dan tidak mudah diperoleh.

4. *Indikator Benefit*

Menggambarkan manfaat yang diperoleh dari indikator outcome. Manfaat tersebut pada umumnya tidak segera tampak. Indikator benefit menunjukkan hal-hal yang diharapkan untuk dicapai apabila output dapat diselesaikan dan berfungsi dengan optimal.

5. *Indikator Impact*

Memperlihatkan pengaruh yang ditimbulkan dari benefit yang diperoleh, seperti halnya dengan indikator benefit, indikator impact juga baru dapat diketahui dalam jangka waktu menengah dan jangka panjang.

Evaluasi kebijakan diarahkan untuk mempelajari akibat atau dampak dari kebijakan dari sebuah kebijakan, menurut Thomas R. Dye (1994:344).

"policy evaluation is the assessment of the over all effectiveness of the relative effectiveness of a national program in meeting its objective, of the relative effectiveness of two or more programs in meeting common objective"

Lebih lanjut dampak dari kebijakan selalu berhubungan dengan kenyataan yang dihadapi setelah pelaksanaan sebuah kebijakan. Menurut Dye, dampak dari kebijakan selalu berhubungan dengan;

- a. Akibat terhadap hasil akhir
- b. Pencapaian optimal yang diperoleh
- c. Pengaruh terhadap masa depan
- d. Pengaruh terhadap biaya, terutama sumber biaya yang diperlukan untuk mendukung sebuah kebijakan
- e. Pengaruh secara tidak langsung terhadap berbagai peluang yang ada sebagai akibat dari pelaksanaan kebijakan tersebut.

Menurut Riyadi (2000:2) evaluasi kebijakan diarahkan untuk alasan, diantaranya:

- a. Untuk manajemen dan alasan administrasi
- b. Untuk penilaian kesesuaian dari perubahan program
- c. Untuk mengidentifikasi cara-cara peningkatan pelaksanaan intervensi
- d. Untuk memenuhi syarat-syarat kelompok pembiayaan yang memiliki tanggung jawab fiskal untuk alokasi dana.

Lebih lanjut Riyadi (2000:5) menjelaskan dalam melakukan evaluasi kebijakan akan berkonsentrasi pada empat pertanyaan diantaranya:

- a. Pertanyaan untuk perencanaan, apakah program yang telah disusun sesuai dengan ketentuan yang telah ditentukan dan apakah kesuksesan dalam implementasi dapat dimaksimalkan?
- b. Pertanyaan untuk pengamatan program, apakah program yang akan dicapai berhubungan dengan perorangan, rumah tangga atau target unit yang lain?
- c. Apakah program memberikan sumber penghasilan, pelayanan, maupun keuntungan lain sebagaimana yang telah disusun?
- d. Apakah program telah efektif untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan?

Masih menurut Riyadi (2000:5) evaluasi berperan berbagai fungsi.

- a. Memberikan informasi yang akurat mengenai kinerja kebijakan, program dan kegiatan yaitu mengenai seberapa jauh kebutuhan, nilai dan kesempatan yang telah dicapai. Dengan evaluasi dapat diungkapkan mengenai pencapaian suatu tujuan, sasaran dan target tertentu.
- b. Memberikan sumbangan pada klarifikasi dan kritik. Di mana evaluasi memberikan sumbangan pada klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari tujuan dan target. Nilai diperjelas dengan mendefinisikan dan mengoperasionalkan tujuan dan target.
- c. Memberikan sumbangan pada aplikasi metode analisis kebijakan, termasuk perumusan masalah dan rekomendasinya. Informasi mengenai tidak memadainya suatu kinerja kebijakan, program dan kegiatan. Dengan evaluasi dapat pula menyumbangkan rekomendasi bagi pendefinisian alternatif kebijakan yang bermanfaat untuk mengganti kebijakan yang berlaku dengan alternatif kebijakan yang lain.

3. Konsep Persepsi

Persepsi (*perception*) berasal dari bahasa latin "*perceptio*" yaitu dari kata *percipere* yang artinya menerima atau mengambil Sobur (2003:5). Menurut Thoha (2003:2) kata *perception* bermakna sebagai pengamatan, dimana setiap orang memiliki pengamatan, pandangan ataupun tanggapan yang berbeda. Sebagai sebuah konsep makna persepsi (*perception*) tidak lain adalah proses di mana seseorang atau sekelompok orang memberikan makna tertentu atas pentingnya sesuatu peristiwa atau stimulus yang berasal dari luar dirinya.

Dietvorst (1983) dalam Daldjoeni (1997:5) mendefinisikan persepsi adalah sebagai fungsi psikologis yang memungkinkan individu untuk mengamati rangsangan inderawi dan mengubahnya menjadi pengamalan yang berkaitan secara tertata. Sedangkan Fareek dalam Sobur (2003:7) mendefinisikan persepsi lebih luas, yaitu persepsi sebagai suatu proses menerima, menyeleksi, mengorganisasikan, mengartikan, menguji dan memberikan reaksi kepada rangsangan panca indera atau data. Sementara menurut Dievito (1997) dalam Sobur (2003:5) persepsi adalah proses ketika kita menjadi sadar akan banyaknya stimulan yang mempengaruhi indera kita.

Persepsi bukanlah sesuatu yang statis melainkan bisa juga berubah-ubah. Proses perubahan persepsi pertama kali disebabkan oleh faal (psikologis) dari sistem saraf pada indera manusia. Apabila suatu stimulus tidak mengalami perubahan maka akan terjadi adaptasi atau habitus, yaitu respon terhadap stimulus semakin melemah. Habitulasi menunjukkan kecenderungan faal dari reseptor yang kurang peka setelah menerima stimulus yang berlebihan. Proses perubahan kedua adalah proses psikologi misalnya pada perubahan sikap. Sikap itu sendiri menurut Mc. Guire dalam Sarwono (1992:25) merupakan respon manusia yang menempatkan objek yang dipikirkan (*object of thoughts*) ke dalam dimensi pertimbangan (*dimension of judgement*). Objek yang dipikirkan adalah segala sesuatu (benda, orang dan lain-lain) yang bisa dinilai manusia. Dimensi penilaian adalah semua skala positif-negatif, seperti baik ke buruk, jauh ke dekat, sulit ke mudah dan sebagainya.

Ditinjau dari prosesnya, Davidoff dalam Dharmesta (1992:13) mengemukakan bahwa persepsi adalah proses yang mengorganisir dan menggabungkan data penginderaan sehingga terbentuk interpretasi dari beberapa

pengalaman. Robbin dalam Muchlas (1994:3) mendefinisikan persepsi sebagai proses individu mengorganisasikan dan menginterpretasikan impressi-sensorinya supaya dapat memberikan arti terhadap lingkungan sekitarnya.

Menurut Hardy & Heyes dalam Sobur (2003:6) bagi semua orang sangat mudah untuk melihat, mendengar, membau, merasakan dan menyentuh atau proses-proses yang semestinya ada. Namun informasi yang datang dari organ-organ indera kita perlu terlebih dahulu diorganisasikan dan diinterpretasikan sebelum dapat dimengerti, proses tersebut di atas itulah yang dinamakan persepsi.

Persepsi adalah pengalaman objek, peristiwa atau hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan penafsiran pesan. Persepsi ialah memberikan makna pada stimulus inderawi (*sensory stimulus*) Sobur (2003:8).

Menurut Gibson dalam Sarwono (1992:12) persepsi sebagai proses kognitif yang digunakan oleh seseorang untuk menafsirkan dan memahami dunia sekitarnya. Gambaran kognitif tersebut merupakan suatu bagian tafsiran pribadi, dimana objek tertentu dipilih individu untuk perannya yang utama dirasakan dalam sikap seorang individu. Persepsi berhubungan dengan cara mendapatkan pengetahuan khusus tentang objek atau kejadian pada saat tertentu, maka persepsi terjadi kapan saja stimulus menggerakkan indera. Persepsi berhubungan erat kognitif (pengetahuan). Persepsi mencakup panafsiran objek, tanda dan orang dari sudut pengalaman yang bersangkutan, dimana persepsi mencakup penerimaan stimulus dan penerjemahan atau panafsiran stimulus yang telah diorganisir dengan cara yang dapat mempengaruhi perilaku dan pembentukan sikap.

Perilaku merupakan proses interaksi antara kepribadian dan lingkungan yang mengandung rangsangan (stimulus), kemudian ditanggapi dalam bentuk respon.

Respon inilah yang selanjutnya disebut perilaku. Perilaku dibalik sikap, tanggapan dan tindakan manusia sangat ditentukan oleh persepsi dan kepribadiannya Thoha (2003:20). Sementara persepsi dan kepribadian dilatarbelakangi oleh pengalaman individu. Respon yang dirasakan selalu memiliki nilai untuk memberikan kepuasan-kepuasan tertentu yang berakar dalam budaya dan skala persepsi yang diresponnya akan selalu selaras dengan ukuran nilai, ketajaman dan rentang persepsual serta tujuan di dalam diri individu.

Pada hakekatnya persepsi adalah proses kognitif yang dialami oleh setiap individu untuk memahami setiap informasi tentang lingkungannya, baik lewat penglihatan, pendengaran, penghayatan, perasaan dan penciuman Thoha (2003:24). Untuk memahami persepsi adalah dengan pengenalan di mana persepsi itu merupakan suatu penafsiran yang unik terhadap situasi dan bukan suatu pencatatan yang benar terhadap situasi. Menurut Krech dalam Thoha (2003:23) persepsi adalah suatu proses kognitif yang kompleks dan menghasilkan suatu gambaran yang unik tentang kenyataan dan barangkali sangat berbeda dari kenyataan yang sebenarnya.

Kompleksitas permasalahan lingkungan meningkat tajam sejalan dengan semakin kompleksnya permasalahan sosial budaya yang menyertai perjalanan manusia. Sejalan dengan kompleksitas sosial budaya, organisasi sosial dan kapasitas teknologi yang dihasilkan oleh manusia juga meningkat. Meningkatnya peran organisasi dan kapasitas teknologi telah merubah persepsi kita terhadap keberadaan dan fungsi lingkungan hidup. Selain merubah persepsi maka perubahan organisasi sosial dan kapasitas teknologi juga merupakan pola interaksi antara manusia dan lingkungan hidupnya Asdak (1995:125).

Ada dua faktor yang menimbulkan persepsi yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yaitu tergantung pada proses pemahaman sesuatu termasuk didalamnya sistem nilai tujuan, kepercayaan dan tanggapan dari hasil yang dicapai, sedangkan faktor eksternal adalah berupa lingkungan. Namun kedua faktor itu timbul karena sebelumnya didahului oleh suatu proses lain yaitu komunikasi. Menurut Asdak (1995:130) persepsi masyarakat terhadap lingkungan sekitarnya merupakan faktor yang sangat penting dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan. Pelaksanaan pembangunan terhadap lingkungan sekitarnya memberikan dampak yang secara langsung dirasakan oleh masyarakat. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap lingkungan, diantaranya faktor jarak, jenis pekerjaan, tingkat pendidikan dan tingkat pendapatan. Karena dipengaruhi oleh adanya persepsi inilah maka pemahaman dan tentu saja perumusan atau suatu isu sesungguhnya amat bersifat subjektif. Persepsi ini pada gilirannya juga akan mempengaruhi terhadap penilaian mengenai peringkat yang terkait pada sesuatu isu.

Persepsi didefinisikan sebagai suatu proses yang dilalui oleh seseorang mengorganisasikan dan menginterpretasikan kesan-kesan sensorinya dalam usaha memberikan sesuatu makna tertentu kepada lingkungan Siagian. S.P (1995:15). Persepsi juga diartikan sama dengan penglihatan, tanggapan dan daya menanggapi atau memahami sesuatu.

Menurut kutipan tersebut, maka persepsi masyarakat (penduduk) terhadap program pemerintah khususnya penataan pemukiman penduduk Desa Aweek dan Desa Bueng Kecamatan Kota Jantho Kabupaten Aceh Besar dapat diartikan sebagai tanggapan atau pemahaman masyarakat terhadap program tersebut. Pemahaman

terhadap program penataan pemukiman penduduk tersebut tidaklah muncul begitu saja dan sangat ditentukan oleh latar belakang masyarakat yang beragam.

Faktor latar belakang yang berbeda-beda inilah sehingga menyebabkan mengapa dua orang atau lebih, sama-sama melihat objek yang sama besar kemungkinan akan memberikan interpretasi yang berbeda-beda pula. Salah satu yang mempengaruhi persepsi adalah individu yang bersangkutan. Apabila seseorang melihat sesuatu, ia akan berusaha memberikan interpretasi tentang apa yang dilihat tentu saja dipengaruhi oleh sikap, motif, minat dan pengalaman Siagian. S.P (1995:25).

Persepsi adalah pengalaman objek, peristiwa atau hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan Rakhmat (2005:35). Leavitt (1978:42) menyatakan pengertian *perception* dalam arti sempit ialah penglihatan, bagaimana cara seseorang melihat sesuatu, sedangkan dalam arti luas adalah pandangan atau pengertian, yaitu bagaimana seseorang memandang atau mengartikan sesuatu. Hal tersebut juga berarti bahwa setiap orang menggunakan kacamata sendiri-sendiri dalam memandang dunianya.

Menurut Atkinson dan Hilgard (1991) sebagaimana dikutip oleh Hadi (2001) menyatakan bahwa sebagai suatu cara pandang atau penilaian, persepsi termasuk proses komunikasi yang timbul karena adanya respon terhadap stimulus. Harihanto (2001) sebagaimana dikutip oleh Rakhmat (2005:38) menyatakan bahwa persepsi pada hakikatnya adalah pandangan, interpretasi, penilaian, harapan atau aspirasi seseorang terhadap obyek.

Berdasarkan pengertian diatas, maka dapat diketahui bahwa persepsi adalah proses pembentukan yang terjadi pada diri individu. Menurut Mayo (1994:162)

sebagaimana dikutip oleh Suharto (2005), masyarakat dapat diartikan dua konsep, yaitu: (1) masyarakat sebagai sebuah “tempat bersama”, yakni sebuah wilayah geografis yang sama dan (2) masyarakat sebagai “kepentingan bersama”, yakni kesamaan kepentingan kebudayaan dan identitas. Persepsi masyarakat yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah persepsi beberapa individu yang dianggap dapat mewakili masyarakat lainnya dalam wilayah yang sama.

Menurut David Crech dan Richard S. Cruthfield (1997:235) dalam Rakhmat (2005) menyebutkan faktor fungsional dan faktor struktural. Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut:

- a. Faktor Fungsional : Faktor fungsional berasal dari kebutuhan, pengalaman masa lalu dan hal-hal lain yang termasuk dalam faktor-faktor personal. Persepsi tidak ditentukan oleh jenis atau bentuk stimuli, tetapi karakteristik orang yang memberikan respon pada stimuli tersebut.
- b. Faktor Struktural : Faktor struktural berasal dari sifat stimuli fisik dan efek-efek saraf yang ditimbulkannya pada sistem saraf individu.

Faktor kebutuhan tersebut, Leavitt (1978) juga menyatakan bahwa cara individu melihat dunia adalah berasal dari kelompoknya serta keanggotaannya dalam masyarakat. Artinya, terdapat pengaruh lingkungan terhadap cara individu melihat dunia yang dapat dikatakan sebagai tekanan-tekanan sosial.

Berdasarkan beberapa teori, diketahui bahwa kebutuhan individu merupakan salah satu faktor penting yang dapat mempengaruhi persepsi individu tersebut terhadap suatu obyek. Teori kebutuhan Maslow menyebutkan bahwa seseorang tidak akan termotivasi untuk memenuhi kebutuhan di atasnya apabila kebutuhan pada

jenjang di bawahnya telah terpenuhi/terpuaskan (hierarki kebutuhan). Menurut Mugniesyah (2006:32), penjelasan hierarki kebutuhan, antara lain:

- a. Kebutuhan Fisiologis, mencakup kebutuhan dasar atau primer manusia, seperti udara, sandang, pangan, papan dan seks.
- b. Kebutuhan rasa aman, yaitu apabila semua kebutuhan dasar telah terpenuhi, maka individu memiliki keinginan untuk memenuhi semua kebutuhannya yang berkaitan dengan keamanan dan keselamatan.
- c. Kebutuhan sosial, mencakup kebutuhan akan hubungan sosial (kasih sayang, persahabatan, penerimaan dan perhatian).
- d. Kebutuhan harga diri, kebutuhan yang berfokus pada ego, status, harga diri, dikenal, percaya diri, dan prestise (gengsi). Selain itu juga mencakup perasaan dapat menyelesaikan sesuatu (*feeling of achievement*).
- e. Kebutuhan aktualisasi diri, kebutuhan untuk tumbuh dan berkembang dengan potensi diri sepenuhnya dengan mengembangkan diri dan berprestasi sebaik mungkin dengan potensi diri sepenuhnya.

Persepsi ialah memberikan makna pada stimulus inderawi. Pada hakekatnya persepsi adalah proses kognitif yang dialami oleh setiap orang dalam memahami setiap informasi tentang lingkungannya, baik lewat penglihatan, pendengaran, penghayatan, perasaan dan penciuman Thoha (2003).

4. Konsep Kebijakan Transmigrasi

Berdasarkan Undang-undang Kependudukan nomor: 10 tahun 1992 pembangunan kependudukan diarahkan pada pengendalian kualitas penduduk, pengerahan mobilitas dan pengembangan penduduk sebagai sumber daya manusia agar menjadi kekuatan pembangunan. Pembangunan kependudukan harus

dilaksanakan merata dan secara bersama, menyeluruh, terpadu, terarah, bertahap dan berkelanjutan.

Sehubungan dengan ini, maka pemerintah pusat telah memberikan kesempatan kepada pemerintah daerah untuk mengambil langkah yang realistis dalam melaksanakan program kependudukan sesuai dengan aspirasi masyarakat, sehingga pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan dapat merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, dan mengawasi program pembangunan kependudukan di daerah melalui instansi terkait.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Dinas Mobilitas penduduk Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam sebagai bagian dari Departemen Tenaga kerja dan Transmigrasi di Daerah telah mengusung program dalam Renstra SKPD Dinas Mobilitas Penduduk tahun 2003 sampai dengan 2010 serta menetapkan prioritas kebijakan pembangunan melalui program Dinas Mobilitas Penduduk Provinsi NAD. Dalam hal ini terdapat 10 kelompok sasaran yaitu: 1) masyarakat yang terkena musibah bencana alam, 2) korban konflik, 3) daerah terisolir/terpencil, 4) DAS, 5) daerah perbatasan, 6) abrasi laut, 7) perambah hutan, 8) petani/nelayan miskin yang tidak mempunyai lahan garapan serta 9) kaum dhuafa lainnya termasuk 10) pemberdayaan penduduk usia produktif yang putus sekolah.

Selanjutnya merujuk pada Undang-undang Nomor: 15 Tahun 1997 antara lain disebutkan bahwa penyelenggaraan pembangunan untuk pemukiman penduduk diarahkan pada penataan persebaran penduduk yang sesuai dan seimbang dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan, peningkatan SDM serta perwujudan intergritas masyarakat untuk:

- a. Meningkatkan kesejahteraan penduduk yang dimukimkan;

- b. Peningkatan dan pemerataan pembangunan antar daerah Kabupaten/Kota;
- c. Penataan dan persebaran penduduk yang serasi dan seimbang;
- d. Mewujudkan pusat pertumbuhan daerah produksi baru (Agropolitan) dan mendukung pertumbuhan wilayah.

5. Konsep Penataan Pemukiman Transmigrasi

Konsep kebijakan penataan pemukiman transmigrasi diarahkan untuk menata kembali lingkungan pemukiman penduduk dengan melakukan pembangunan perumahan penduduk miskin dan dhuafa sehingga menjadi suatu kawasan pemukiman penduduk yang serasi dan seimbang secara terkoordinasi dan terpadu dengan sumber daya alam. Kebijakan ini dilaksanakan sesuai surat keputusan Bupati Kabupaten Aceh Besar No. 133 tahun 2002 dengan anggaran dari APBD dari tingkat I yang menganut pola transmigrasi berdasarkan kebutuhan masyarakat dengan mempertimbangkan aspek sosial, ekonomi, lingkungan dan keamanan melalui Dinas Mobilitas Penduduk Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam sehingga terwujudnya pengembangan wilayah dan penataan ruang yang ramah lingkungan.

Suparno (2007:45), dalam pelaksanaan pembangunan permukiman penduduk, telah mengalami pergeseran dan perubahan kebijakan dalam penyelenggaraannya yang mengakibatkan ruang lingkup perencanaan berubah seiring dengan perkembangan yang ada. Adapun perubahan tersebut meliputi:

- a. Integritas masyarakat setempat/desa sekitar ikut serta dibangun;
- b. Tidak menggunakan norma standar, tetapi berdasarkan spesifikasi lokasi;
- c. Pendekatan partisipatif dan emansipatif melalui kesepakatan bersama yang berkeadilan.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut Pemerintah telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional tahun 2004 – 2009, yang selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Rencana Strategis Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2005 – 2009. Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi, sebagai salah satu bagian dari Kabinet Indonesia Bersatu, telah menjabarkan satu dari tiga agenda pembangunan nasional tersebut, yaitu Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat ke dalam Rencana Strategis.

Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2005 – 2009 telah merumuskan kebijakan dan langkah-langkah untuk mencapai tujuan agenda tersebut melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia dan mendorong terciptanya lapangan kerja serta mendorong berkurangnya kesenjangan pembangunan daerah. Upaya tersebut dilakukan melalui (1) Program perluasan dan pengembangan kesempatan kerja (2) Program perlindungan dan pengembangan lembaga tenaga kerja (3) Program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja (4) Program pengembangan wilayah tertinggal dan tumbuh (5) Program pengembangan wilayah tertinggal dan terpencil dan (6) wilayah perbatasan melalui transmigrasi.

Menurut Robinson Tarigan, (2006:65) menjelaskan bahwa, “Pada setiap desa perlu ditetapkan yaitu wilayah yang dijadikan permukiman dan wilayah budi daya, serta memperhatikan kemampuan olahan dan efisiensi jaringan penghubung antara wilayah permukiman dengan wilayah budi daya serta hubungan keluar dari desa tersebut”. Kebijakan ini adalah bagaimana meningkatkan status desa tersebut dengan bantuan yang seminimum mungkin dari pemerintah, artinya sedapat mungkin menggerakkan partisipasi masyarakat. Oleh sebab itu, pertumbuhan ekonomi perlu

dirangsang baik melalui pendekatan sektoral maupun pendekatan regional, yang kebijakannya tentu berbeda dari satu desa dengan desa berikutnya.

Suharto (2005:72), menyatakan perlu dilihat ciri-ciri spesifik suatu desa dan hirarki antar desa, yaitu desa mana yang dapat berfungsi sebagai perantara antara desa disekitarnya dengan kota, dan desa mana yang dapat dijadikan pusat pelayanan untuk desa lain disekitarnya, dan desa mana yang diperkirakan bisa cepat berkembang dengan sedikit bantuan Pemerintah yang akan mendorong desa tetangganya untuk berkembang, karena adanya keterkaitan antar desa.

6. Beberapa Penelitian Mengenai Perkembangan Lahan

Zakaria Palisungan (1996:5) telah meneliti interaksi antara transmigran dan penduduk asli, serta pengaruhnya terhadap perkembangan ruang kawasan sekitar. Penelitian ini mengambil studi kasus di UPT Sp 2 Desa Legare Jaya Kecamatan Napa Kabupaten Nabire Provinsi Irian Jaya. Tujuan penelitian ini untuk melihat adanya proses interaksi antara transmigran dengan penduduk asli yang dipengaruhi oleh beberapa faktor dan pengaruhnya terhadap perkembangan ruang kawasan sekitar. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa interaksi antara transmigran dengan penduduk asli cukup besar. Hal ini tampak dengan tidak adanya konflik dan pola kekerabatan, perkawinan campuran dan kerjasama yang baik di bidang ekonomi, sosial, politik di mana kesemuanya itu membawa dampak terhadap perkembangan ruang kawasan sekitar.

M. Nurdin (1999:11) yang meneliti perkembangan desa-desa di sekitar PIR Perkebunan (PIR-BUN), studi kasus di Kabupaten Pasir. Tujuan penelitian ingin mengetahui tingkat perkembangan desa-desa yang ada di sekitar kegiatan berskala besar seperti PIR-BUN. Mencari kejelasan tentang perkembangan desa dipengaruhi

oleh kegiatan apa saja serta bagaimana dampaknya terhadap desa masing-masing. Penelitian ini menggunakan metode rasionalistik dengan pendekatan deskriptif analitik kependudukan, tenaga kerja, tingkat pendapatan, penggunaan lahan dan dampaknya serta prasarana sosial ekonomi terutama jasa dan pendidikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa :

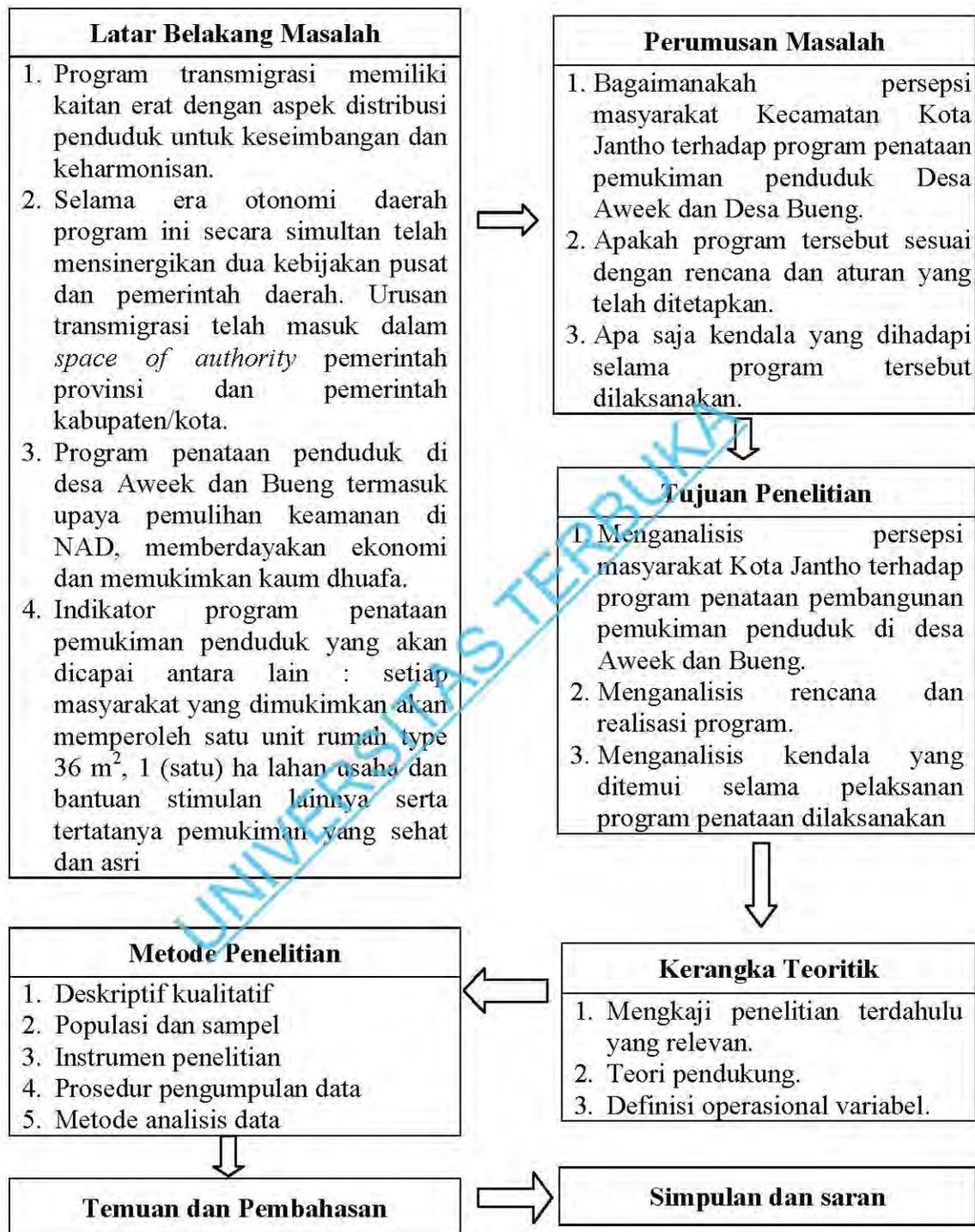
- a. Perkembangan desa dipengaruhi oleh kegiatan PIR-BUN dengan indikator peningkatan pendapatan, pemekaran wilayah administrasi dan luas lahan yang diusahakan.
- b. Efek pengaruh kegiatan PIR-BUN bersifat *spread effect*, yang oleh Nyrdal disebut berbasis industri agro.

B. Kerangka Berpikir

Kerangka berfikir merupakan gambaran yang menceritakan proses pembahasan secara berurutan dan saling berhubungan dengan materi-materi pokok yang terdapat dalam penelitian ini, dikaitkan dengan program penataan permukiman penduduk Desa Aweek dan Desa Bueng. Lokus yang akan diamati dalam penelitian ini meliputi faktor-faktor yang mempengaruhi proses penataan permukiman penduduk yang dilaksanakan di Kecamatan Kota Jantho Kabupaten Aceh Besar. Faktor-faktor tersebut adalah sumber daya alam berupa lahan usaha tani, sumber daya manusia khususnya warga masyarakat Kecamatan Kota Jantho, sarana dan prasarana yang ada serta input yang diberikan dalam program penyelenggaraan transmigrasi yang sesuai dengan masa pembinaannya. Selain itu juga akan diamati, dianalisis dan dievaluasi proses pelaksanaan pembinaan secara komprehensif dalam kaitan dengan program penataan permukiman penduduk.

Secara rinci dapat diperhatikan skema pada gambar berikut :

Gambar 2.1
Kerangka Pikir



Dalam penelitian ini akan diteliti sejauhmana persepsi/tanggapan masyarakat Kecamatan Kota Jantho terhadap program penataan permukiman penduduk di era

otonomi daerah sekarang ini yang telah dilaksanakan di Desa Aweek dan Desa Bueng.

C. Definisi Konsep dan Operasional

1. Transmigrasi

Transmigrasi mempunyai pengertian penataan permukiman penduduk secara sukarela untuk meningkatkan kesejahteraan dan menetap di wilayah pengembangan transmigrasi (WPT) atau lokasi permukiman transmigrasi (LPT). Pengertian *pertama* adalah perpindahan penduduk secara sukarela yang memberikan makna bahwa proses kepindahan (yang meliputi gerak ke ruangan dan penyiapan tempat tujuan), dilaksanakan sendiri oleh yang bersangkutan. Pengertian *kedua* adalah menetap untuk meningkatkan kesejahteraan di WPT atau LPT; artinya perpindahan yang tidak menetap dan tidak dalam konteks meningkatkan kesejahteraan di WPT atau LPT tidak termasuk dalam pengertian transmigrasi.

Tujuan transmigrasi ada 3 (tiga) yaitu (1) meningkatkan kesejahteraan transmigran dan masyarakat sekitar, (2) peningkatan dan pemerataan pembangunan daerah, dan (3) memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa.

Hakikat transmigrasi adalah merupakan kombinasi upaya pemanfaatan sumber daya alam (SDA) oleh sumber daya manusia (SDM) dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek), yang kegiatannya terdiri dari:

- a. Pemanfaatan ruang dan penataan ruang
- b. Pemindahan dan penempatan
- c. Pemberdaan kawasan

Adapun kebijakan teknis bidang pembinaan pengembangan masyarakat dan kawasan transmigrasi diarahkan untuk:

- a. Meningkatkan kualitas pembinaan dan pemberdayaan di lokasi/UPT serta pengembangan kawasan
- b. Mewujudkan kota terpadu mandiri di kawasan transmigrasi sebagai penyangga dari kota/posat pertumbuhan yang ada.
- c. Menciptakan kemandirian dan kapasitas masyarakat transmigrasi.
- d. Meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian dengan komoditas unggulan.
- e. Meningkatkan integrasi UPT dengan desa sekitar sehingga terjadi pengembangan kawasan dalam mendukung pengembangan daerah.
- f. Mengembangkan penyediaan sumber energi alternatif di UPT/kawasan transmigrasi.
- g. Memberdayakan lingkungan fisik dan sosial budaya di daerah transmigrasi.

Adapun prosedur penyelenggaraan transmigrasi dalam masa otonomi daerah diarahkan adanya kegiatan penyiapan pemukiman di WPT dan LPTserta kegiatan penyiapan calon transmigran, yang di fasilitasi dengan kerja sama antar daerah (Kabupaten/Kota) dimana pemerintah pusat bertindak sebagai fasilitator selanjutnya dilakukan penempatan pada lokasi yang telah di sepakati melalui kerja sama antar daerah sehingga diharapkan terjadi pengembangan kawasan dan penataan pemukiman baru. Diharapkan terjadinya pemberdayaan masyarakat, sehingga memberikan dampak terhadap pembangunan daerah yang akhirnya setelah dilakukan pembinaan selama lima tahun diserahkan kepada pemerintah Kabupaten/Kota untuk dilakukan pembinaan lanjutan melalui instansi lintas sektoral.

Melalui kerja sama antar daerah (KSAD) dalam pemberdayaan unit pemukiman transmigrasi/UPT dilakukan sharing dana antara pemerintah pusat melalui APBN dan pemerintah daerah (APBD Prov, APBD Kab/Kota) serta bermitra dengan pihak swasta untuk memelihara dan membangun sarana dan prasarana yang diikuti partisipasi masyarakat untuk mengembangkan ekonomi kerakyatan sehingga meningkatkan taraf hidup warga pemukim melalui pembinaan dan pelatihan keterampilan yang di dukung dengan modal usaha.

2. Transmigran

Transmigran adalah seseorang atau sekelompok komunitas yang tercatat, terdaftar serta menetap/mendiami suatu wilayah permukiman transmigrasi dengan terlebih dahulu memenuhi persyaratan sebagaimana yang ditentukan oleh peraturan yang berlaku.

Sesuai dengan Kepmenakertrans RI Nomor : KEP. 208/MEN/X/2004 ayat (1) seseorang dinyatakan sebagai transmigran apabila memenuhi persyaratan bahwa Ianya (1) warga negara Indonesia, (2) sudah berkeluarga, (3) berusia antara 18 tahun sampai dengan 50 tahun, (4) belum pernah bertransmigrasi, (5) memiliki KTP, (6) berbadan sehat, (7) mempunyai ketrampilan sesuai dengan kebutuhan untuk mengembangkan potensi sumber daya yang tersedia di lokasi tujuan serta (8) lulus seleksi. Selanjutnya pada ayat (2) dijelaskan bahwa persyaratan sebagaimana tersebut pada uraian di atas diatur dalam Perjanjian Kerjasama Antar Daerah.

Keikutsertaan seseorang menjadi transmigran berdasarkan prinsip sukarela dan dalam kapasitasnya sebagai keluarga. Ini berarti setiap transmigran dipersyaratkan harus telah berumah tangga, kecuali tenaga-tenaga ahli dan terampil

tertentu sangat diperlukan di permukiman transmigrasi seperti guru, da'i dan tenaga terampil lainnya.

Sejalan dengan semangat otonomi daerah saat ini serta berlandaskan paradigma baru transmigrasi, khususnya Dinas Mobilitas Penduduk Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam memilih jenis transmigrasi didasarkan atas tingkat peran pemerintah daerah serta memperhatikan aspek ketenagakerjaan dan kewirausahaan, maka terdapat 9 (sembilan) kelompok penduduk yang dapat memperoleh kesempatan menjadi transmigran yakni (1) korban konflik Aceh (termasuk pengungsi eks. transmigran yang telah eksodus), (2) penduduk di sekitar daerah aliran sungai (DAS), (3) kaum dhuafa, (4) petani perambah hutan, (5) korban bencana alam, (6) kombatan GAM, (7) petani penggarap, (8) petani *miskin/dhuafa* yang tidak mempunyai lahan usaha tani dan (9) penduduk yang terkena dampak negatif dari pembangunan industri.

3. Wilayah Pengembangan Transmigrasi (WPT)

Wilayah Pengembangan Transmigrasi (WPT) terdapat beberapa Satuan Kawasan Pengembangan (SKP), sedangkan setiap SKP terdiri dari beberapa Satuan Permukiman (SP) sebagai embrio desa. Dalam setiap SKP terdapat sebuah SP sebagai desa utama yang dikembangkan sebagai pusat pelayanan dan fasilitas umum tingkat SKP, seperti pelayanan pos, jasa perbankan, pasar, perbengkelan, industri kecil/industri rumah tangga dan pertokoan, SLTP dan Pusat Kesehatan Masyarakat Pembantu. Sedangkan suatu wilayah yang dapat dikembangkan menjadi WPT diharuskan memenuhi minimal 3 (tiga) syarat, *Pertama*, wilayah tersebut harus memiliki potensi yang dapat dikembangkan sebagai produk unggulan yang memenuhi skala ekonomis. *Kedua*, wilayah tersebut memiliki kemudahan hubungan

dengan kota atau wilayah yang sedang berkembang. Dan *ketiga*, kepadatan penduduk diwilayah tersebut masih rendah dalam arti tekanan penduduk terhadap lahan masih jauh dari ambang batas.

4. Permukiman

Permukiman yang dimaksud adalah merupakan satu kesatuan permukiman atau bagian dari Satuan Permukiman transmigrasi yang diperuntukkan bagi tempat tinggal, tempat berusaha dan tempat bekerja bagi transmigran dalam rangka membangun komunitas masyarakat yang produktif, maju dan mandiri dalam suasana kehidupan yang harmonis, dinamis dan sejahtera.

Suparno (2007:46), permukiman transmigrasi yang dibangun dengan dua pendekatan. *Pertama*, pembangunan wilayah pengembangan transmigrasi, yaitu suatu wilayah potensial yang ditetapkan sebagai pengembangan permukiman transmigrasi untuk mewujudkan pusat pertumbuhan wilayah yang baru sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah. *Kedua*, adalah pembangunan lokasi potensial yang ditetapkan sebagai permukiman transmigrasi untuk mendukung pusat pertumbuhan wilayah yang sudah ada atau sedang berkembang sesuai tata ruang wilayah adalah merupakan landasan sasaran dari perencanaan pembangunan wilayah. Sedangkan penataan ruang adalah kegiatan suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang yang meliputi; pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang dimana tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang yang diatur dalam Undang-undang nomor 26 tahun 2007 tentang penataan ruang.

5. Lokasi Permukiman Transmigrasi (LPT)

Lokasi permukiman transmigrasi dikembangkan untuk mendukung percepatan pengembangan wilayah dan/atau pusat pertumbuhan wilayah yang sudah ada atau sedang berkembang, yang masih terdapat kawasan potensial. Dengan demikian pembangunan LPT diharapkan dapat mempercepat perkembangan suatu wilayah di luar WPT.

Lokasi Pemukiman Transmigrasi diharapkan mampu mendukung pusat pertumbuhan yang ada atau sedang berkembang, maka kawasan yang dapat dikembangkan menjadi LPT harus memenuhi 3 (tiga) persyaratan pokok. *Pertama*, kawasan tersebut harus memiliki potensi untuk pengembangan usaha primer, sekunder dan/atau tersier. *Kedua*, kawasan tersebut harus tersedia prasarana dan sarana permukiman, dan *ketiga*, tingkat kepadatan penduduk di kawasan tersebut harus masih rendah, dalam arti bahwa tekanan penduduk terhadap lahan belum melampaui ambang batas.

6. Persepsi

Persepsi merupakan suatu proses yang dilalui seseorang dalam mengorganisasikan dan menginterpretasikan kesan-kesan sensorinya serta usaha memberikan sesuatu makna tertentu kepada lingkungan. Persepsi juga sama dengan penglihatan, tanggapan dan daya menanggapi atau memahami sesuatu.

Persepsi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis pendapat, pandangan dan tanggapan dari masyarakat desa Aweek dan desa Bueng serta masyarakat didalam wilayah Kecamatan Kota Jantho terhadap program penataan kembali pemukiman penduduk di desa Aweek dan desa Bueng serta melakukan evaluasi sejauh mana kegiatan tersebut telah dilaksanakan dan apakah

sesuai dengan perencanaan dan juga ingin diketahui kendala apa saja yang dihadapi selama kegiatan dilaksanakan dalam masa konflik.

Persepsi masyarakat terhadap program pembangunan ini merupakan tanggapan atau pemahaman masyarakat terhadap kegiatan penataan pemukiman penduduk tersebut tidaklah muncul begitu saja akan tetapi sangat dipengaruhi oleh latar belakang masyarakat yang beragam. Untuk mengetahui persepsi masyarakat tersebut telah dilakukan pengumpulan data melalui kuesioner kepada 6 unsur/kelompok, yaitu: masyarakat biasa, tuha peuet, pemuda, perangkat desa, tokoh masyarakat dan pejabat struktural pemerintahan.

7. Evaluasi

Evaluasi dalam pelaksanaan program penataan pemukiman penduduk di desa Aweek dan desa Bueng dimaksudkan untuk mengetahui persepsi masyarakat desa tersebut dan masyarakat Kecamatan kota Jantho terhadap sejauh mana kegiatan tersebut telah dilaksanakan apakah sudah sesuai dengan perencanaan. Evaluasi bertujuan untuk menganalisis seberapa jauh rencana dan realisasi program pembangunan telah dilaksanakan dan bagaimana hasilnya diukur dengan sasaran yang akan dicapai dan atas dasar hasil evaluasi dapat diambil langkah-langkah perbaikan untuk kepentingan program dimasa yang akan datang.

Evaluasi ini merupakan suatu upaya untuk mengetahui seberapa efektif dan efisien pelaksanaan dapat dilaksanakan dan diukur dengan sasaran yang akan dicapai terhadap hasil-hasil dari perencanaan sebelumnya. Hasil dari evaluasi menjadi umpan balik untuk perencanaan selanjutnya ke arah pelaksanaan yang lebih baik. Salah satu alat ukur yang digunakan untuk data evaluasi dan kendala yang dihadapi adalah pedoman wawancara terhadap 24 informan dari lapangan.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Penelitian ini berkaitan dengan persepsi/tanggapan masyarakat Kecamatan Kota Jantho terhadap program penataan pemukiman penduduk yang telah dilaksanakan di Desa Aweek dan Desa Bueng Kecamatan Kota Jantho sesuai Keputusan Bupati Aceh Besar Nomor 133 Tahun 2002. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan menggunakan data kualitatif yang di kuantifikasikan (Prasetya Irawan, 2007:220). Penelitian ini ingin menggambarkan dan mendiskripsikan hasil rekonstruksi suatu fenomena perkembangan sosial oleh berbagai faktor yang saling berkaitan. Metode penelitian ini digunakan untuk menjelaskan hubungan antara perkembangan program transmigrasi dan faktor-faktor lain sebagai variabel bebas (*independen*) untuk dihadapkan dengan sub-variabel perkembangan lain.

Menurut Azwar (1998:25) metode deskriptif adalah penelitian dengan menganalisis dan menyajikan fakta secara sistematis sehingga lebih mudah dipahami. Moleong (2000:14) menjelaskan bahwa penelitian deskriptif kualitatif dalam artian laporan penelitiannya akan berisi kutipan-kutipan data yang berasal dari wawancara, catatan lapangan, foto, dokumen pribadi, catatan dan dokumen resmi, di samping data deskriptif lainnya.

Ruang lingkup penelitian dibatasi pada persepsi masyarakat Kecamatan Kota Jantho tentang program penataan pemukiman penduduk yang telah dilaksanakan di Desa Aweek dan Desa Bueng Kecamatan Kota Jantho Kabupaten Aceh Besar. Fokus

persepsi yang akan dievaluasi meliputi; (1) Tujuan Program, (2) Kepentingan Program, (3) Proses, (4) Pandangan Tokoh Masyarakat, (5) Akibat dari Program dan (6) Efek Dasar Program dari kerangka konseptual program.

B. Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian (Suharsimi Arikunto, 2006:130), atau populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek dan subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulan (Sugiyono, 2000:24). Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat Kecamatan Kota Jantho Kabupaten Aceh Besar Provinsi Aceh, yang meliputi unsur: masyarakat biasa, tuha peut, pemuda/i, perangkat desa, tokoh masyarakat dan pejabat struktural pemerintah yang berjumlah 95 orang. Dipilihnya Desa Aweek dan Desa Bueng sebagai lokasi penelitian didasarkan atas beberapa pertimbangan, Desa Aweek dan Desa Bueng memiliki akses terdekat dengan Kecamatan Kota Jantho yang merupakan desa lokasi penataan pemukiman penduduk dalam kawasan konflik di Kabupaten Aceh Besar.

Sampel adalah sebagian atau wakil dari Populasi yang diteliti (Suharsimi Arikunto, 2006:131). Jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 45 orang yang diambil dari 95 orang populasi.

Populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah penduduk yang berdomisili di Kecamatan Kota Jantho diperkirakan mengetahui program penataan desa tersebut. Namun mengingat singkatnya waktu yang tersedia dan luasnya wilayah yang akan diteliti, maka sebagai populasi dan sampel dalam penelitian ini yang dipilih secara *Cluster Random Sampling*, *Cluster Random Sampling* adalah salah satu teknik

pengambilan sampel dengan sub-populasi dikelompokkan menjadi beberapa kelompok dengan unsur-unsur dalam kelompok yang masih bersifat heterogen (Umar, 2008:72). *Cluster* yang dipilih terdiri dari enam (6) unsur, yaitu Masyarakat biasa, Tuha Peut, Pemuda/i, Perangkat Desa, Tokoh masyarakat dan Pejabat Struktural. Rincian jumlah sampel penelitian diperlihatkan pada tabel 3.1 berikut ini.

Tabel 3.1
Populasi dan Sampel Penelitian

No.	Unsur	Populasi orang (%)	*) Sampel orang (%)
1.	Masyarakat biasa	25 (26,32)	5 (11,10)
2.	Tuha Peut	5 (5,26)	5 (11,10)
3.	Pemuda/i	15 (15,80)	10 (22,20)
4.	Perangkat desa	15 (15,80)	10 (22,20)
5.	Tokoh Masyarakat	30 (31,60)	10 (22,20)
6.	Pejabat Struktural	5 (5,26)	5 (11,10)
Total		95 (100,00)	45 (100,00)

Sumber : Data primer, diolah 2009

*) Penarikan Sampel dalam Cluster dilakukan dengan Undian

Cluster yang diteliti terdiri dari masyarakat biasa, tuha peut, pemuda/i, perangkat desa, tokoh masyarakat dan pejabat struktural pemerintah pemilihan *Cluster* dipilih dan ditentukan sedari awal diperkirakan memiliki peran yang dapat memberikan informasi secara komprehensif dan objektif terhadap program perencanaan pembangunan penataan pemukiman penduduk di Desa Aweek dan Desa Bueng, selanjutnya dilakukan wawancara yang mendalam terhadap 24 informan sebagai data pendukung dalam penelitian ini.

C. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah alat yang digunakan untuk mengukur fenomena alam maupun sosial yang diamati (Sugiyono, 2000). Instrumen yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner yang daftar pertanyaannya disajikan dengan

serangkaian alternatif pernyataan, responden yang memperoleh kuesioner tersebut dapat memberikan respon dengan beberapa alternatif pernyataan. Selain menggunakan kuesioner, peneliti juga melakukan wawancara mendalam dengan responden untuk mendapatkan jawaban terhadap tujuan program, kepentingan program, proses program, efek program dan peran serta masyarakat. Responden yang dipilih sebagai informan untuk wawancara secara mendalam adalah pihak-pihak yang memahami program penataan pemukiman baik secara langsung maupun tidak langsung. Informan yang dipilih terdiri dari Pejabat struktural, Dinas Mobilitas Penduduk, Aparat Kecamatan, Kepala Desa, Imum Mufim, tuha peut (yang mengawasi jalannya roda pemerintahan desa di Aceh) dan tokoh masyarakat. Rincian instrumen dan variabel penelitian diperlihatkan pada tabel 3.2.

Tabel 3.2 Instrumen dan variabel Penelitian

Data	Variabel	Instrumen	Responden
Primer	Tujuan Program	- Kuesioner - Wawancara mendalam	45 sampel 24 responden yang dipilih
	Kepentingan Program	- Kuesioner - Wawancara mendalam	45 sampel 24 responden yang dipilih
	Proses Program	- Kuesioner - Wawancara mendalam	45 sampel 24 responden yang dipilih
	Efek Program	- Kuesioner - Wawancara mendalam	45 sampel 24 responden yang dipilih
	Peran Serta masyarakat	- Kuesioner - Wawancara mendalam	45 sampel 24 responden yang dipilih
Sekunder	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah masyarakat peserta program - Jenis dan jumlah fasilitas - Anggaran biaya - Perencanaan program - Dasar hukum pelaksanaan program 		

D. Prosedur Pengumpulan Data

Pengumpulan data diawali dengan uji coba instrumen penelitian, kegiatan ini dilaksanakan pada 12 responden yang mewakili masing-masing *cluster* yang dipilih secara acak. Hasil uji coba kemudian ditabulasi dan dilakukan uji validitas dan reliabilitas setelah melalui uji tersebut selanjutnya dilakukan pengumpulan data yang sesungguhnya terhadap 45 responden.

Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara terstruktur berdasarkan kuesioner yang telah dipersiapkan (sudah melalui uji validitas dan reliabilitas), kepada responden yang dijadikan sebagai subjek dalam penelitian ini yang ditentukan secara *Cluster Random Sampling* yang terdiri dari 6 unsur kelompok sampel penelitian dengan jumlah 45 responden dari 95 populasi. Penentuan sampel dilakukan secara acak dengan cara undian. Setelah kuesioner diisi berdasarkan jawaban dari 45 responden, selanjutnya peneliti memasuki tahap berikut yaitu dengan melakukan wawancara mendalam terhadap 24 responden untuk menjawab tujuan 2 dan 3 dari penelitian ini.

Data primer yang diperoleh dari hasil kuesioner dikelompokkan sebagai berikut: tujuan program, kepentingan program, proses program, efek program dan peran serta masyarakat, selanjutnya dilakukan tabulasi hasil penelitian. Untuk memperoleh informasi yang lebih mendalam terhadap jawaban responden dilakukan wawancara. Untuk data sekunder atau data tambahan dihimpun dari berbagai literatur yang ada baik di dinas maupun perpustakaan.

Sementara sumber data primer yang diwawancarai antara lain masyarakat biasa, tuha peuet, tokoh pemuda, tokoh perempuan, tokoh masyarakat, perangkat desa dan pejabat struktural pemerintahan yang ada di daerah penelitian. Dalam penelitian ini sekaligus dibuat foto-foto dokumentasi.

E. Metode Analisis Data

Data yang diperoleh dari responden melalui kuesioner diolah dengan menggunakan kelompok tujuan program, kepentingan program, proses program, efek program dan peran serta masyarakat. Untuk kelompok pertanyaan tujuan program, kepentingan program, efek program dan peran serta masyarakat terdiri dari lima (5) kategorisasi jawaban yaitu: (a) sangat setuju, (b) setuju, (c) ragu-ragu, (d) tidak setuju dan (e) sangat tidak setuju. Sedangkan untuk kelompok proses program pertanyaan terdiri dari empat (4) kategorisasi jawaban yaitu: (a) sangat baik, (b) baik, (c) kurang baik dan (d) sangat kurang baik. Dari jawaban responden melalui kuesioner diperoleh data kualitatif yang di kuantifikasikan dengan menggunakan skala data ordinal yaitu data angka yang sudah menunjukkan urutan (Prasetya Irawan, 2007:161). Selanjutnya kelompok jawaban diprosentasekan untuk mendapatkan gambaran tentang persepsi responden. Teknik analisisnya adalah kategorisasi, artinya jawaban dari responden hasil wawancara dikelompokkan ke dalam jenis-jenis jawaban yang mempunyai kesamaan pengertian, dengan melihat dominasi jawaban berdasarkan prosentase tertinggi. Selanjutnya untuk menjawab tujuan dua dan tujuan tiga dari penelitian ini dilakukan wawancara mendalam terhadap 24 responden yang mengetahui tentang program yang telah dilaksanakan serta manfaat program dan kendala yang dihadapi. Dari hasil wawancara mendalam didapatkan pendapat yang menguatkan dan menghambat dalam pelaksanaan program pembangunan penataan pemukiman penduduk desa di Desa Aweek dan Desa Bueng Kecamatan Kota Jantho Kabupaten Aceh Besar.

BAB IV

TEMUAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Letak Administrasi

Desa Awek dan desa Bueng adalah dua desa yang berada dalam wilayah administratif Kecamatan Kota Jantho. Secara geografis, luas wilayah Kecamatan Kota Jantho per desa dapat dilihat pada tabel 4.1. Desa Aweek memiliki luas wilayah 32,01 km² dan desa Bueng 38,00 km² keduanya telah melaksanakan penataan pemukiman desa. Kecamatan Kota Jantho merupakan salah satu Kecamatan yang ada dalam wilayah Kabupaten Aceh Besar. Kecamatan Kota Jantho memiliki luas wilayah 274,04 KM² atau 27,40 hektar dengan jumlah desa sebanyak 13 desa, lihat tabel 4.1. Secara administrasi pemerintahan, Kecamatan Jantho mempunyai batas-batas sebagai berikut : Sebelah Utara dengan Kecamatan Lembah Seulawah/Seulimeum, Sebelah Selatan dengan Kabupaten Aceh Jaya, Sebelah Barat dengan Kecamatan Kuta Cot Glie, Sebelah Timur dengan Kabupaten Pidie

Tabel 4.1
Luas Kecamatan Kota Jantho Menurut Desa

No.	Desa	Luas (km ²)
1.	Jantho Baru	9,00
2.	Weue	23,00
3.	Aweek	32,01
4.	Bueng	38,00
5.	Jalin	46,01
6.	Suka Tani	6,00
7.	Data Cut	18,00
8.	Janthoi	55,02
9.	Bareuh	16,00
10.	Jantho Makmur	4,50
11.	Buket Menara	2,50
12.	Tereubeh	9,00
13.	Cucum	15,00
Jumlah		274,04

Sumber : Kantor Camat Kota Jantho dalam Angka (2006)

Untuk lebih jelas tentang luas desa yang ditata pemukimannya di Kecamatan Kota Jantho dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 4.2
Luas Wilayah Lokasi Desa Penataan di Kecamatan Kota Jantho

No.	Nama Desa	Luas (km ²)	Jumlah KK
1.	Aweek	23,00	20 KK
2.	Bueng	38,00	30 KK
Total		61,00	50 KK

Sumber : Kantor Camat Kota Jantho dalam Angka (2006)

2. Letak Geografis

Posisi geografis Kecamatan Kota Jantho terletak antara 05 15'15" – 05 16'45" Lintang Utara dan 95 37'15" – 95 38'45" Bujur Timur dengan ketinggian 250 – 564 m di atas permukaan laut. Wilayah ini sangat cocok untuk pertanian, perkebunan dan peternakan.

3. Aksesibilitas Lokasi Penelitian

Akses ke Kecamatan Kota Jantho dapat dilalui melalui jalan darat dari Banda Aceh – Seulimeum dengan menempuh perjalanan sepanjang 42 Km dan memakan

waktu selama 1 jam. Selanjutnya dari Seulimeum ke Kota Jantho juga dapat dilalui jalan darat sepanjang 12,50 Km selama 30 menit. Sarana transportasi yang dapat digunakan lewat rute ini adalah angkutan umum baik Bus maupun Mini Bus. Selanjutnya untuk menuju ke lokasi penelitian, dari Kota Jantho ke Desa Aweek dan Desa Bueng dengan jarak sepanjang 2 Km dengan waktu tempuh sekitar $\frac{1}{4}$ jam dengan menggunakan bus umum. Untuk jelasnya dapat dilihat tabel berikut ini:

Tabel 4.3
Aksesibilitas Lokasi Penelitian Kecamatan Kota Jantho
Kabupaten Aceh Besar

No.	Asal	Tujuan	Jarak (km)	Waktu (jam)
1.	Banda Aceh	Jantho	52,00	1,00
2.	Jantho	Aweek	5,10	0,50
3.	Jantho	Bueng	5,80	0,50

Sumber : Kantor Camat Kota Jantho Dalam Angka (2006)

4. Topografi

Keadaan topografi Kecamatan Kota Jantho termasuk datar sampai berbukit, sebagaimana tertera pada tabel di berikut ini:

Tabel 4.4
Topografi Lahan di Kecamatan Kota Jantho

No.	Nama Gampong	Tingkat Kemiringan		
		0 – 8 %	8 – 15%	Diatas 15%
1.	Jantho Baru	2,50	2,00	3,30
2.	Weue	6,80	6,40	3,80
3.	Aweek	5,00	18,50	2,20
4.	Bueng	6,00	17,20	2,10
5.	Jalin	6,50	18,50	2,30
6.	Suka Tani	4,00	25,90	1,80
7.	Data Cut	2,50	29,90	1,10
8.	Janthoi	2,00	9,70	1,94
9.	Bareueh	5,00	3,64	2,47
10.	Jantho Makmur	7,50	10,20	1,60
11.	Buket Menara	1,00	3,20	2,30
12.	Tereubeh	0,20	18,50	5,50
13.	Cucum	7,50	6,50	3,00

Sumber : Kantor Camat Kota Jantho Dalam Angka (2006)

5. Iklim

Kondisi iklim suatu daerah sangat menentukan peluang usaha tani dalam kaitannya dengan penentuan musim tanam. Periode tanam menentukan pola dan jadwal tanam yang akan diterapkan yang sesuai dengan kondisi fisik lahan.

Berdasarkan data curah hujan rata-rata bulanan daerah studi dan dari hasil wawancara dengan beberapa penduduk setempat bahwa bulan kering atau musim kemarau di daerah studi terjadi pada bulan Januari, Februari, Maret, Juni, Juli dan Agustus. Periode kemarau di daerah studi termasuk panjang dan berlangsung selama enam bulan.

Sementara musim penghujan di daerah studi dari hasil pencatatan stasiun hujan Indrapuri yaitu pada bulan April, Mei, September sampai dengan Desember. Curah hujan pada musim ini sangat lebat dengan rata-rata hujan bulanan > 200 mm/bulan dan 100 mm/bulan pada bulan kering. Oleh penduduk setempat musim penghujan dimanfaatkan untuk mengolah lahan sawah yaitu untuk pertanian tanaman pangan yakni palawija, padi gogo, jagung dan kacang-kacangan. Berdasarkan data curah hujan, daerah studi mempunyai curah hujan rata-rata tahunan sebesar 4.426 mm/tahun. Curah hujan maksimum bulanan yaitu dicapai pada bulan Oktober yakni sebesar 509 mm, curah hujan minimum dicapai pada bulan Juni yakni 199 mm. Ditinjau dari distribusi hujan, secara umum pada bulan Juni s/d Agustus merupakan bulan-bulan yang relatif kering. Sementara untuk musim tanam yang aman dan dapat direkomendasikan apabila prosentase rata-rata curah hujan bulanan bila dibandingkan dengan curah hujan rata-rata tahunan antara 8% sampai dengan 12%. Dengan demikian musim tanam yang aman di daerah studi adalah pada bulan September sampai dengan Desember dan terjadi juga pada bulan April dan Mei.

Tetapi dari hasil pengamatan lapangan dan wawancara dengan beberapa penduduk bahwa musim tanam di lokasi studi mulai bulan September sampai bulan Desember setiap tahunnya.

6. Hidrologi

Ketersediaan air merupakan salah satu faktor yang sangat menentukan bagi keberhasilan penyelenggaraan program permukiman, untuk itu air harus tersedia cukup untuk kepentingan penduduk, baik untuk keperluan rumah tangga maupun usaha pertanian.

Berdasarkan hasil survey lapangan kondisi sumber air bersih di desa Aweek dan desa Bueng sangat memprihatinkan. Di desa Aweek hanya tersedia 3 (tiga) buah sumur gali yang dipakai oleh 26 KK. Sedangkan di desa Bueng juga hanya tersedia 3 (tiga) unit sumur gali yang dimanfaatkan oleh 45 KK.

Penggunaan sumur gali di kedua desa tersebut tidak dapat digunakan karena persediaan air tanah sangat dalam dan hanya dapat diperoleh pada kedalaman 30 meter. Pada keadaan kemarau masyarakat di kedua desa tersebut dapat memperoleh sumber air bersih pada alur-alur Krueng Cut yang berjarak 1,50 km dari pusat desa.

Mengatasi kendala tersebut, dirasa penting untuk mendapat perhatian pemerintah untuk pengadaan sumber air bersih melalui teknologi perpipaan, kincir angin maupun pompanisasi. Agar pembangunan dapat berhasil dengan baik sangat diperlukan perencanaan design sumber air bersih di kedua desa tersebut.

7. Jenis Tanah

Klasifikasi tanah dalam wilayah survey di klasifikasikan menurut sistem PPT (1983) yang dibakukan ke dalam sistem taxonomi tanah USDA 1987/1990 dan

FAO-UNESCO (1985). Hasil pengamatan lapangan yang didukung dengan hasil analisis laboratorium dapat diketahui di lokasi studi disusun oleh 3 (tiga) jenis tanah terutama yakni jenis Kambisol, Regosol dan Litosol. Berdasarkan hasil penelitian laboratorium oleh Sub. Dinas Pengembangan Sumber Daya Kawasan, kesesuaian lahan cocok untuk tanaman pangan, hortikultura dan tanaman tahunan dengan tingkat kesuburan tanah yang baik serta pH tanah masam sampai agak masam.

8. Tata Guna Lahan

Tata guna lahan/tanah dan desa untuk desa Aweek seluas 32,01 hektar terdapat peruntukan lahan masing-masing untuk perumahan/pemukiman 5,00 ha dan untuk sawah, ladang dan perkebunan seluas 27,41 ha. Sementara desa Bueng seluas 38,00 ha terdapat peruntukan lahan masing-masing untuk perumahan/permukiman 4,00 ha dan untuk sawah, ladang dan pekebunan seluas 33,49 ha.

Tabel 4.5
Klasifikasi Penggunaan Lahan di Kecamatan Kota Jantho

No.	Nama Gampong	Jenis Penggunaan Lahan (ha)		
		Sawah	Ladang	Perkebunan
1.	Jantho Baru	250,00	210,00	320,00
2.	Weue	68,00	641,00	380,00
3.	Aweek	50,00	185,00	220,00
4.	Bueng	60,00	172,00	215,00
5.	Jalin	65,00	185,00	238,00
6.	Suka Tani	40,00	259,00	186,00
7.	Data Cut	25,00	299,00	110,00
8.	Janthoi	20,00	97,00	194,00
9.	Bareuch	50,00	364,00	247,00
10.	Jantho Makmur	75,00	102,00	160,00
11.	Buket Menara	-	32,00	23,00
12.	Tereubeh	-	18,00	25,00
13.	Cucum	700,00	65,00	90,00
Jumlah		1.403,00	2.629,00	2.408,00

Sumber : Kantor Camat Kota Jantho Dalam Angka (2006)

9. Kesuburan Tanah

Hasil analisis laboratorium terhadap tanah, menunjukkan bahwa tanah di lokasi studi memiliki tingkat kesuburan tanah yang berada pada kriteria sedang hingga subur untuk seluruh satuan peta lahan (SPL). Penilaian dari status kesuburan tanah ini diambil dari contoh komposit dan penggalian profil pada tanah pekarangan dan bagian tanah lainnya. Penilaian ini merupakan kombinasi dari beberapa sifat kimia tanah antara KTK, Kejenuhan Basa, Kandungan P_2O_5 , K_2O dan C-Organik.

10. Tekstur Tanah

Hasil penelitian lapangan yang didukung data detil analisis laboratorium menunjukkan tekstur tanah di lokasi umumnya lempung liat berpasir, liat berdebu dan lempung berliat. Struktur tanah yang demikian merupakan kondisi tanah yang beraerasi baik, daya tumbuh kembang akar tanaman lebih mudah, hal ini berkaitan erat dengan struktur tanah yang gembur.

11. Flora dan Fauna

Pengumpulan data tentang flora dan fauna di lokasi semak dilakukan melalui pengamatan/observasi adanya bekas aktivitas fauna dan wawancara dengan penduduk setempat.

a. Flora

Vegetasi yang terdapat di lokasi studi merupakan hutan hujan tropis dengan vegetasi beragam. Hasil identifikasi lapangan, di lokasi studi terdapat beragam jenis flora baik jenis monokotil maupun dikotil.

b. Fauna

Berdasarkan hasil penelitian terhadap fauna dan didukung dengan hasil wawancara masyarakat di sekitar lokasi survey, ternyata ada beberapa jenis fauna yang dilindungi seperti ayam hutan (*Galus sp.*), burung beo dan burung merak. Jenis satwa yang berpotensi menjadi hama bagi tanaman pertanian adalah babi hutan (*sus vetamus*), tikus (*Ratus rotundus*), kera (*Macaca fascicularis*), tupai (*Lancscus sp.*) dan landak (*Hystrix, sp.*)

B. Program Penataan Penduduk

Program penataan pemukiman penduduk adalah rencana pemanfaatan ruang yang disusun untuk terciptanya lingkungan secara terpadu dan seimbang serta menjaga keserasian pembangunan antar sektor dalam rangka pemanfaatan sumber daya alam untuk jangka panjang termasuk pemanfaatan tanah dan sumber daya manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup.

Untuk terlaksananya program penataan penduduk perlu dilakukan penataan ruang dan kawasan pemukiman sesuai dengan kondisi dan situasi masyarakat pada lokasi penelitian sehingga memenuhi standar yang diharapkan.

1. Kependudukan

Berdasarkan buku data Kecamatan Kota Jantho Dalam Angka (2006) jumlah penduduk Kecamatan Kota Jantho berjumlah 7.997 jiwa (1.802 KK). Jumlah tersebut terdiri dari 4.285 laki-laki dan 3.712 perempuan. Setiap kepala keluarga rata-rata terdapat 5 jiwa. Artinya setiap keluarga mempunyai 2-3 orang anak. Gambaran mengenai jumlah penduduk desa dalam Kecamatan Kota Jantho disajikan pada tabel 4.6 berikut ini:

Tabel 4.6
Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Desa
Dalam Kecamatan Kota Jantho

No.	Nama Gampog	Jenis Kelamin (jiwa)		Jumlah (jiwa)	KK	Rasio Gender
		Pria	Wanita			
1.	Jantho Baru	628,00	543,00	1.171,00	283,00	116,00
2.	Weue	101,00	108,00	209,00	58,00	94,00
3.	Aweek	59,00	53,00	112,00	31,00	111,00
4.	Bueng	93,00	95,00	188,00	43,00	98,00
5.	Jalin	111,00	103,00	214,00	63,00	108,00
6.	Suka Tani	134,00	124,00	258,00	67,00	108,00
7.	Data Cut	30,00	27,00	57,00	13,00	111,00
8.	Janthoi	81,00	73,00	154,00	36,00	111,00
9.	Bareuch	140,00	149,00	289,00	65,00	94,00
10.	Jantho Makmur	455,00	470,00	925,00	644,00	97,00
11.	Buket Menara	932,00	474,00	1.406,00	270,00	197,00
12.	Tereubeh	1465,00	1442,00	2.907,00	202,00	102,00
13.	Cucum	56,00	51,00	107,00	27,00	110,00
Jumlah		4.285,00	3.712,00	7.997,00	1.802,00	

Sumber : Kantor Camat Kota Jantho Dalam Angka (2008)

Dari tabel 4.6 terlihat jumlah penduduk di desa Teureubeh memiliki jumlah penduduk terbesar mencapai 2.907 jiwa dengan kepadatan penduduknya mencapai 102 jiwa per ha. Sedangkan jumlah penduduk yang paling sedikit dalam Kecamatan Kota Jantho ditempati oleh Desa Data Cut yang penduduknya hanya berjumlah 57 jiwa.

Dari data yang ada bahwa penduduk yang telah memasuki usia produktif (umur 14 sampai 44 tahun) terlihat cukup besar. Kondisi seperti ini telah memberikan peluang bagi pengambil kebijakan untuk dapat mengikutsertakan mereka dalam segala bidang pembangunan. Karena jumlah usia produktif yang begitu besar juga merupakan aset daerah terutama dalam penyediaan tenaga kerja. Selanjutnya bila dikaitkan dengan sampel lokasi penelitian maka dipilihnya desa Aweek dan desa Bueng sebagai sampel sangat tepat, karena didukung oleh status kedua desa tersebut sebagai tempat dilaksanakan program penataan pemukiman desa

di Kecamatan Kota Jantho, sehingga memenuhi persyaratan untuk diteliti serta dapat mewakili dengan jumlah penduduk yang ada di Kecamatan Kota Jantho.

2. Pendidikan

Sebagian besar penduduk di Kecamatan Kota Jantho telah mengecap pendidikan dasar. Jumlah penduduk yang buta huruf sangat sedikit, hal ini karena didukung fasilitas pendidikan yang tersedia cukup memadai. Prasarana pendidikan yang ada mulai dari desa hingga kota Kecamatan Kota Jantho tersedia lengkap. Hampir setiap desa telah tersedia sekolah dasar. Bahkan ada desa yang mempunyai 2 unit sekolah dasar, sementara untuk SMP dan SMA tersedia di kota kecamatan. Hal ini berarti bahwa masyarakat Kota Jantho tidak mengalami kesulitan dalam hal menuntut ilmu pengetahuan. Demikian pula dengan warga desa lokasi studi baik desa Aweek dan warga desa Bueng yang juga memiliki 1 unit sekolah dasar. Tingkat perbandingan antara jumlah murid dan guru di kecamatan Kota Jantho relatif mencukupi.

Untuk fasilitas pendidikan mulai dari tingkat sekolah dasar telah dibangun oleh pemerintah hampir di setiap desa dengan jumlah 8 unit, sementara untuk sekolah tingkat pertama (SMP) dan tingkat atas (SMA) baru dibangun masing-masing 1 unit di kota kecamatan. Untuk lebih jelasnya jumlah sarana pendidikan di kecamatan Kota Jantho tertera pada tabel berikut ini:

Tabel 4.7
Jumlah Sekolah Menurut Jenis Pendidikan
Dalam Kecamatan Kota Jantho

No.	Gampong	TK/RA	SD/MI	SMP/MTS	SMU/MA	PT
1.	Jantho Baru	1,00	1,00	-	-	-
2.	Weue	-	-	-	-	-
3.	Aweek	-	1,00	-	-	-
4.	Bueng	-	-	-	-	-
5.	Jalin	-	-	-	-	-
6.	Suka Tani	-	-	-	-	-
7.	Data Cut	-	-	-	-	-
8.	Janthoi	-	1,00	-	-	-
9.	Bareueh	-	1,00	-	-	-
10.	Jantho Makmur	2,00	2,00	1,00	1,00	1,00
11.	Buket Menara	1,00	1,00	-	-	-
12.	Tereubeh	-	1,00	-	-	-
13.	Cucum	-	-	-	-	-
Jumlah		3,00	8,00	1,00	1,00	1,00

Sumber : Kantor Camat Kota Jantho dalam Angka (2006)

Dari tabel 4.7 terlihat bahwa lembaga pendidikan yang ada di kecamatan Kota Jantho untuk semua strata telah mencukupi sampai 14 unit dengan rincian tingkat kanak-kanak 3 unit; tingkat dasar 8 unit; tingkat pertama 1 unit, tingkat atas 1 unit dan tingka perguruan tinggi swasta 1 unit. Dari jumlah tersebut terlihat desa Jantho Baru mempunyai sarana pendidikan terlengkap mulai dari SD hingga Perguruan Tinggi terdapat di sana. Dengan demikian bila dibandingkan dengan desa lain, maka desa Jantho Baru merupakan desa terlengkap memiliki sarana pendidikan. Hal ini suatu kewajiban karena desa tersebut merupakan pusat kecamatan.

3. Tempat Peribadatan

Masyarakat Kecamatan Kota Jantho umumnya penganut agama Islam taat. Hal ini terbukti dengan tersedianya tempat peribadatan seperti meunasah di setiap desa dalam kecamatan tersebut. Demikian pula masjid dan tempat/balai pengajian non formal seperti pondok pesantren yang tersebar di setiap pelosok kecamatan. Saat ini Kecamatan Kota Jantho memiliki 4 unit Masjid, 22 unit Meunasah, 2 Pondok

Pesantren, 19 Taman Pendidikan Al Qur'an dan 13 Taman Pendidikan Qur'an.

Untuk jelasnya dapat di lihat pada tabel berikut ini.

Tabel 4.8
Jumlah Tempat Ibadah dan Pengajian
Di Kecamatan Kota Jantho

No.	Gampong	Mesjid	Mushalla	Ponpes	TPA	TPQ
1.	Jantho Baru	1,00	4,00	1,00	2,00	3,00
2.	Weue	1,00	1,00	-	1,00	1,00
3.	Aweek	-	1,00	-	1,00	1,00
4.	Bueng	-	1,00	-	1,00	1,00
5.	Jalin	-	1,00	-	2,00	1,00
6.	Suka Tani	1,00	2,00	-	2,00	1,00
7.	Data Cut	-	1,00	-	1,00	1,00
8.	Janthoi	-	1,00	-	2,00	1,00
9.	Bareueh	-	1,00	-	1,00	-
10.	Jantho Makmur	1,00	5,00	1,00	3,00	1,00
11.	Buket Menara	-	2,00	-	1,00	1,00
12.	Tereubeh	-	1,00	-	1,00	-
13.	Cucum	-	1,00	-	1,00	1,00
Jumlah		4,00	22,00	2,00	19,00	13,00

Sumber : Kantor Camat Kota Jantho dalam Angka (2006)

Dari tabel 4.8 terlihat bahwa sarana peribadatan dalam hal ini meunasah secara merata telah tersedia di setiap desa. Bahkan di desa Jantho Baru telah tersedia 4 unit meunasah. Meunasah merupakan tempat ibadah terkecil setelah masjid. Biasanya di Aceh secara umum dan di Kota Jantho khususnya, meunasah di samping difungsikan sebagai sarana ibadah juga dipergunakan sebagai tempat musyawarah/pertemuan warga desa untuk membahas dan memutuskan suatu kegiatan keagamaan dan sosial kemasyarakatan. Sementara sarana ibadah lain seperti masjid biasanya dimiliki oleh beberapa desa dalam suatu wilayah kecil seperti kemukiman atau wilayah agak besar seperti kecamatan. Tempat pengajian lain seperti TPA (Tempat Pengajian Anak) biasanya dikelola secara perorangan yang ada di suatu desa atau kecamatan. Sementara pondok pesantren yang juga merupakan lembaga pendidikan islam umumnya dikelola oleh perorangan/yayasan yang

dipimpin langsung oleh seorang tokoh agama yang akrab dipanggil Teungku Pesantren. Dalam hal pelaksanaan program penataan pemukiman penduduk di Desa Aweek dan Desa Bueng Kecamatan Kota Jantho sejak awal peran ulama atau teungku pesantren cukup memberikan andil terutama dalam hal memberikan bimbingan dan penyuluhan tentang bagaimana cara menyikapi perbedaan adat dalam pandangan islam. Sehingga dengan demikian diharapkan dapat meminimalisir ketidakharmonisan yang terjadi antara warga desa setempat dengan warga desa sekitar.

Sejak awal pembukaan program penataan permukiman penduduk di desa Aweek dan desa Bueng, Dinas Mobilitas Penduduk (waktu itu) bersama Pemerintah Daerah Aceh Besar selalu meminta arahan dan bimbingan kepada tokoh agama di lokasi studi untuk ikut mensosialisasikan program penataan kepada masyarakat Kecamatan Kota Jantho.

4. Kesehatan

Secara umum penduduk Kecamatan Kota Jantho telah menyadari arti pentingnya kesehatan dan lingkungan. Hal ini dibuktikan dengan ketersediaan MCK yang telah memadai, ventilasi rumah sudah standart serta banyak penduduk dalam membersihkan diri telah menggunakan sumur dan jamban keluarga yang telah ada disetiap KK. Kondisi ini terjadi karena didukung dengan terbentuknya pos-pos kesehatan dan keluarga berencana di setiap desa. Di samping sarana kesehatan lain seperti poliklinik, puskesmas, dan puskesmas pembantu (pustu) walaupun tidak tersedia di setiap desa. Data sarana kesehatan di Kecamatan Kota Jantho menurut desa dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.9
Sarana Kesehatan Dirinci Menurut Desa
Dalam Kecamatan Kota Jantho

No.	Gampong	Pustu	BPU	Psksms	RS	RB	BKes
1.	Jantho Baru	1,00	-	-	-	-	1,00
2.	Weue	-	-	-	-	-	-
3.	Aweek	1,00	-	-	-	-	-
4.	Bueng	-	-	-	-	-	-
5.	Jalin	1,00	-	-	-	-	-
6.	Suka Tani	1,00	-	1,00	-	-	-
7.	Data Cut	1,00	-	-	-	-	-
8.	Janthoi	1,00	-	-	-	-	-
9.	Bareueh	1,00	-	-	-	-	-
10.	Jantho Makmur	1,00	-	1,00	1,00	-	3,00
11.	Buket Menara	1,00	-	-	-	-	1,00
12.	Tereubeh	1,00	-	-	-	-	-
13.	Cucum	1,00	-	-	-	-	-
Jumlah		11,00	-	2,00	1,00	-	5,00

Sumber : Kantor Camat Kota Jantho dalam Angka (2006)

Dari tabel 4.9 tersebut terlihat disetiap desa telah terbentuk pos kesehatan dan keluarga berencana. Ini artinya di Kecamatan Kota Jantho untuk masalah kesehatan baik kesehatan diri maupun lingkungan telah tersentuh. Kecuali itu secara umum di Kecamatan Kota Jantho telah tersedia rumah sakit umum standar daerah, puskesmas, poliklinik, pustu, klinik bersalin dan tempat praktek dokter.

5. Kepemilikan Alat Komunikasi

Keadaan masyarakat Kecamatan Kota Jantho secara umum terhadap arus informasi pembangunan saat ini tidaklah ketinggalan. Umumnya mereka selalu dapat mengikuti perkembangan dunia informasi baik di bidang politik, ekonomi, sosial budaya serta pertahanan keamanan. Media informasi yang selalu mereka ikuti antara lain melalui surat kabar baik lokal seperti SKH Serambi Indonesia, Tabloid Aceh Kita, maupun skala regional seperti SKH Waspada, Analisa, Kompas, Media Indonesia serta media elektronik lain seperti radio, televisi dan internet maupun website yang ada di warung-warung telekomunikasi.

Dari data tersebut terlihat kepemilikan alat komunikasi dan informasi di Kecamatan Kota Jantho telah memperlihatkan bahwa masyarakat Kota Jantho telah dapat mengikuti perkembangan informasi pembangunan baik dari pesawat radio 956 unit, televisi 809 unit dan pesawat telpon 536 unit. Dari desa-desa yang ada di kecamatan Kota Jantho, terlihat desa Jantho Makmur merupakan desa dengan kepemilikan alat komunikasi dan informasi terbanyak, dibanding dengan desa lainnya.

6. Sarana Penerangan Listrik

Kondisi masyarakat Kecamatan Kota Jantho secara umum sebagian besar sudah dapat menikmati penerangan listrik. Data dari BPS kecamatan Kota Jantho menunjukkan dari rumah tangga yang ada di kecamatan Kota Jantho ternyata kesemua rumah tangga yang ada (1.802 KK) telah dapat menikmati penerangan listrik dari PT. PLN

C. Penyajian Data dan Pembahasan

Pada tahap awal sebelum dilakukan survey lapangan, peneliti melakukan uji coba terhadap instrumen penelitian kepada 12 responden yang mewakili setiap kelompok masyarakat sesuai dengan *cluster*. Hasil uji coba instrumen penelitian/kuesioner selanjutnya ditabulasi dapat dilihat pada lampiran 2, dan selanjutnya dilakukan uji validitas dan reliabilitas, dari hasil uji memperlihatkan bahwa pertanyaan dalam kuesioner valid dan reliabel lihat lampiran 3.

1. Identitas Responden

a. Tingkat Pendidikan

Dari hasil edaran kuisioner terhadap responden sebanyak 45 orang diperoleh data sebagai mana tabel berikut ini:

Tabel 4.10
Pendidikan responden

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah (orang)	Persen (%)
1	SD	3,00	6,60
2	SMP	4,00	9,30
3	SMA	9,00	19,30
4	Diploma Tiga	-	-
5	Sarjana	29,00	64,80
	Jumlah	45,00	100,00

Sumber: Data Primer diolah, 2009

Dari Tabel 4.10 tersebut terlihat pada umumnya responden telah mengenyam pendidikan untuk semua strata. Tingkat pendidikan terbanyak adalah tingkat sarjana 64,80 persen, kemudian disusul tingkat SMA mencapai 19,30 persen, selanjutnya tingkat SMP 9,30 persen serta tingkat terendah SD hanya 6,60 persen.

Dari data terlihat bahwa responden secara umum telah berhasil menimba ilmu pengetahuan untuk masing-masing tingkat pendidikan. Dengan demikian diharapkan tingkat pemahaman responden dalam memahami proses pembangunan penataan pemukiman penduduk yang telah dilaksanakan di Desa Aweek dan Bueng akan lebih luas dan mendalam.

b. Jenis Pekerjaan

Untuk jenis pekerjaan responden dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.11
Jenis Pekerjaan responden

No.	Jenis Pekerjaan	Jumlah (orang)	Persen (%)
1	Petani	5,00	10,48
2	Pedagang	8,00	17,82
3	Wiraswasta	13,00	29,03
4	PNS	15,00	34,27
5	Lain-lain	4,00	8,80
	Jumlah	45,00	100,00

Sumber: Data Primer diolah, 2009

Dari Tabel 4.11 tersebut secara umum jenis pekerjaan/mata pencaharian responden terbanyak adalah sebagai Pegawai Negeri Sipil 34,27 persen, disusul sebagai wiraswasta 29,03 persen, selanjutnya pedagang 17,82 persen, dan petani 10,48 persen dan yang terkecil berprofesi sebagai lain-lain 8,80 persen.

Jawaban responden terhadap program pembangunan penataan pemukiman yang telah dilaksanakan desa di Desa Aweek dan Bueng dapat mewakili aspirasi dari tanggapan masyarakat Kecamatan Kota Jantho secara umum. Hal ini disebabkan responden memiliki tingkat pendidikan yang tinggi juga kesehariannya berada dalam masyarakat kota, sehingga banyak hal yang dapat diserap, dilihat dan diperoleh baik informasi maupun kejadian-kejadian faktual lainnya.

c. Lama Responden Menetap di Desa Kota Jantho

Dari 45 responden yang dimintai jawabannya tentang lamanya menetap di Desa Kota Jantho diperoleh jawaban sebagai berikut:

Tabel 4.12
Lama responden yang menetap di Desa Kota Jantho
Lebih dari 5 Tahun

No.	Katagori Jawaban	Jumlah (orang)	Persen (%)
1	Ya	44,00	97,20
2	Tidak	1,00	2,80
	Jumlah	45,00	100,00

Sumber: Data Primer diolah, 2009

Dari Tabel 4.12 tersebut dapat dilihat lamanya responden menetap di kecamatan Kota Jantho diperoleh data 97,20 persen responden mengaku telah menetap di Kecamatan Kota Jantho lebih dari 5 (lima) tahun, sementara hanya 2,80 persen mengaku baru saja menetap di Kota Jantho yang kurang dari 5 (lima) tahun. Dengan data demikian terlihat bahwa responden secara umum layak untuk dijadikan narasumber dalam penelitian ini. Karena diduga mereka telah banyak menguasai dan mengetahui perkembangan dan kemajuan pembangunan khususnya pembangunan penataan permukiman penduduk yang telah dilaksanakan di Kota Jantho selama ini. Di samping itu responden juga diduga mengetahui maju-mundurnya gerak langkah program transmigrasi itu sendiri di Kecamatan Kota Jantho selama ini.

2. Uji Validitas dan Reliabilitas

a. Uji Validitas

Analisis uji validitas berfungsi untuk menunjukkan tingkat ketepatan suatu instrument (kuesioner). Validitas instrumen akan menunjukkan mampu atau tidaknya kuesioner tersebut untuk mengukur apa yang diinginkan dan mampu mengungkapkan data dari variable yang diteliti secara tepat. Apabila kuesioner mampu melakukannya maka dinyatakan valid, sebaliknya jika tidak mampu mengukur dinyatakan tidak valid.

Hasil analisis uji validitas dengan menggunakan program SPSS (*Statistical Product and Service Solution*) ditujukan dengan membandingkan nilai r_{hitung} (dilihat pada nilai *Corrected Item-Total Correlation*) dengan nilai $r_{variabel}$ ($df; \alpha = 43; 0,05$) sebesar 0,294. Apabila nilai $r_{hitung} > 0,294$ maka pertanyaan dari tiap variable yang diteliti adalah valid. Hasil dari uji validitas untuk masing-masing pertanyaan dari tiap-tiap variable yaitu: tujuan program, kepentingan program, proses program, efek

program dan peran serta masyarakat yang dirangkum dalam Tabel 4.13. Penjelasan lebih rinci dapat dilihat pada Lampiran 5.

Tabel 4.13.
Hasil Pengujian Validitas untuk Masing-masing Pertanyaan Variabel

Variabel	No.	R Tabel	Nilai R Hitung	Status
Tujuan Program (X1)	X ₁₁	0,294	0,727	Valid
	X ₁₂	0,294	0,739	Valid
	X ₁₃	0,294	0,859	Valid
Kepentingan Program (X2)	X ₂₁	0,294	0,598	Valid
	X ₂₂	0,294	0,444	Valid
	X ₂₃	0,294	0,436	Valid
	X ₂₄	0,294	0,778	Valid
	X ₂₅	0,294	0,658	Valid
	X ₂₆	0,294	0,640	Valid
Proses Program (X3)	X ₃₁	0,294	0,558	Valid
	X ₃₂	0,294	0,874	Valid
	X ₃₃	0,294	0,796	Valid
	X ₃₄	0,294	0,822	Valid
Efek Program (X4)	X ₄₁	0,294	0,839	Valid
	X ₄₂	0,294	0,510	Valid
	X ₄₃	0,294	0,889	Valid
	X ₄₄	0,294	0,819	Valid
	X ₄₅	0,294	0,445	Valid
Peran Serta Masyarakat (X5)	X ₅₁	0,294	0,780	Valid
	X ₅₂	0,294	0,818	Valid
	X ₅₃	0,294	0,725	Valid

Berdasarkan Tabel 4.13 tersebut r_{hitung} dari masing-masing variable $> r_{tabel}$ ($r_{hitung} > 0,294$) sehingga pertanyaan dalam kuesioner dinyatakan valid. Tidak satupun pertanyaan yang dinyatakan tidak valid (gugur).

b. Uji Reliabilitas

Analisis uji reliabilitas berfungsi untuk menunjukkan sejauh mana suatu kuesioner dapat memberikan hasil pengukuran yang konsisten apabila pengukuran diulang dua kali atau lebih. Analisis reliabilitas ini menggunakan program SPSS dengan metode *Cronbach Alpha* (r_{alpha}). Metode *Cronbach Alpha* mampu menafsirkan korelasi antara skala yang dibuat dengan seluruh variabel yang ada.

Kesimpulan reliabilitas suatu variabel ditentukan dengan membandingkan nilai r_{α} dengan nilai r_{tabel} (0,6). Apabila $r_{\alpha} > 0,6$ maka variabel yang diteliti adalah reliable. Hasil dari uji reliabilitas untuk masing-masing variabel dalam penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 4.14 penjelasan lebih rinci dapat dilihat pada lampiran 6.

Table 4.14
Hasil Pengujian Reliabilitas untuk Masing-masing Variabel

Variabel	R Tabel	Nilai R Alpha	Status
Tujuan Program (X_1)	0,600	0,6572	Reliable
Kepentingan Program (X_2)	0,600	0,6278	Reliable
Proses Program (X_3)	0,600	0,7643	Reliable
Efek Program (X_4)	0,600	0,7643	Reliable
Peran Serta Masyarakat (X_5)	0,600	0,6628	Reliable

Hasil uji reliabilitas dalam Tabel 4.14 tersebut menunjukkan nilai alpha untuk masing-masing variabel Tujuan Program (X_1) adalah 0,6572, Kepentingan Program (X_2) adalah 0,6278, Proses Program (X_3) adalah 0,7643, Efek Program (X_4) adalah 0,7643 dan Peran Serta Masyarakat (X_5) adalah 0,6628. Maka secara keseluruhan, pertanyaan yang ada dalam masing-masing variabel dinyatakan reliable (handal) karena nilai r_{α} lebih besar dari nilai batas atau r_{tabel} (0,600).

3. Pengenalan Terhadap Program Penataan Pemukiman

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan data ditabulasikan lihat lampiran 4, selanjutnya dilakukan uji validitas dan reliabilitas untuk lebih jelas dapat dilihat pada lampiran 5.

a. Tujuan Program

1). Manfaat program terhadap kesejahteraan penduduk setempat

Tabel 4.15
Jawaban responden terhadap tujuan program manfaat terhadap kesejahteraan penduduk setempat

No.	Jawaban Responden	Jumlah (orang)	Persen (%)
1	Sangat Setuju	20,00	44,44
2	Setuju	13,00	28,89
3	Ragu-ragu	6,00	13,33
4	Tidak Setuju	3,00	6,67
5	Sangat Tidak Setuju	3,00	6,67
	Jumlah	45,00	100,00

Sumber: Data Primer diolah, 2009

Dari Tabel 4.15 responden setuju terhadap tujuan program yang dapat mensejahterakan penduduk setempat yaitu 44,44% responden menjawab sangat setuju, 28,89% responden menjawab setuju, 13,33% responden menjawab ragu-ragu dan 6,67% responden yang menjawab tidak setuju dan sangat tidak setuju.

Dari hasil wawancara terhadap responden yang telah ditentukan, responden menyatakan sangat setuju program penataan tersebut, karena menurut mereka program ini telah mampu mensejahterakan penduduk di desa Aweek dan desa Bueng yang ditata perumahannya.

Idawati Hamid (30) tokoh wanita mengatakan : "Menurut saya warga Aweek dan desa Bueng telah mampu mensejahterakan dengan pembangunan penataan pemukiman, karena rumah yang dibangun tersebut layak sebagai tempat tinggal namun ukuran rumah 6m x 6m, terasa sempit dan terbuat dari papan pula, sementara rumah bantuan dari pihak lain terbuat permanen ini membuat kecemburuan sosial bagi yang lain?". (Wawancara, Maret 2009).

Lebih lanjut menurut responden adanya penataan tersebut dapat meringankan beban hidup penduduk 2 (dua) desa tersebut terutama dalam penyediaan rumah tempat tinggal yang layak bagi mereka. Sementara selebihnya 29% bahwa program penataan tersebut telah dapat mensejahterakan penduduk yang ditata.

Rohani Daud (34) pengurus PKK Kecamatan Kota Jantho mengatakan:

”Menurut saya pembangunan penataan pemukiman telah mampu mensejahterakan warga desa tersebut, karena rumah yang dibangun tersebut layak sebagai tempat tinggal namun bahan bangunan kurang berkualitas, dan terbuat dari papan pula, sementara rumah bantuan dari pihak lain dibuat permanen sehingga warga desa agak kecewa”.(Wawancara, Maret 2009).

Wawancara mendalam yang telah dilaksanakan bahwa program pembangunan penataan pemukiman penduduk di desa Aweek dan desa Bueng yang dilaksanakan pada tahun 2003 diakui telah memberikan kontribusi yang berarti dalam mensejahterakan warga desa tersebut, walaupun hanya dengan rumah type 36 m² dan berkonstruksi papan apabila dibandingkan dengan rumah tinggal yang mereka miliki sebelum pembangunan penataan dilaksanakan. Sesuai dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 1997 ”Penyelenggaraan transmigrasi (baca: mobilitas penduduk) bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan transmigran/ pemukim dan masyarakat sekitar,serta peningkatan dan pemerataan pembangunan daerah untuk memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa”. Kesejahteraan yang dimaksudkan oleh masyarakat adalah mereka telah dapat menikmati hasil pembangunan perumahan bantuan pemerintah.

2). Manfaat Mensejahterakan Penduduk Sekitar

Tabel 4.16

Jawaban responden terhadap tujuan program manfaat dalam mensejahterakan warga sekitar

No.	Jawaban Responden	Jumlah (orang)	Persen (%)
1	Sangat Setuju	6,00	13,33
2	Setuju	5,00	11,11
3	Ragu-ragu	8,00	17,79
4	Tidak Setuju	20,00	44,44
5	Sangat Tidak Setuju	6,00	13,33
	Jumlah	45,00	100,00

Sumber: Data Primer diolah, 2009

Berdasarkan Tabel 4.16 responden yang sangat setuju dengan tujuan program yang dapat mensejahterakan warga sekitar, hanya 13,33%, 11,11% responden yang menjawab setuju, 44,44% responden menjawab tidak setuju, 17,79% responden yang menjawab ragu-ragu dan 13,33% sangat tidak setuju.

Dari hasil 45,00 responden yang dimintai tanggapannya terlihat 44,44 persen responden menjawab tidak setuju bahwa program pembangunan penataan pemukiman yang dilaksanakan di Desa Aweek dan Bueng belum dapat mensejahterakan warga sekitar desa tersebut. Dari hasil wawancara terbuka yang dilakukan peneliti terhadap responden baik dari kalangan masyarakat biasa maupun tokoh masyarakat dan tuha peuet gampong terhadap kondisi ini secara umum mereka memberikan penjelasan bahwa selama program penataan dilaksanakan di desa Aweek dan Bueng, perhatian stakeholder dalam hal ini Dinas Mobilitas Penduduk hanya tertuju pada warga di kedua desa tersebut, baik perhatian berupa pemberian bantuan perumahan, pemberdayaan sosial ekonomi maupun pembinaan mental spiritual serta pelatihan-pelatihan guna peningkatan sumberdaya manusia. Sementara kondisi desa sekitar yang berdekatan dengan desa Aweek dan desa Bueng, sama sekali tidak tersentuh pemberian bantuan dan pembinaan, padahal warga desa tersebut juga tergolong miskin dan termasuk kaum dhuafa yang perlu dibantu. Untuk menuju ke desa Aweek dan desa Bueng harus melewati beberapa desa sehingga warga desa sekitar tersebut tidak memperoleh keuntungan apapun dengan program ini.

Sesuai dengan komentar Bapak Muhammad Usman (56) Anggota Imuem Mukim di Kecamatan Kota Jantho yang menegaskan bahwa :

”.....Pemerintah Daerah Tingkat I hanya memberikan bantuan perumahan, beras dan bantuan lainnya untuk masyarakat desa Aweek dan Bueng saja, sementara

warga desa lain seperti desa Data Cut desa Jantho, tidak tersentuh bantuan apapun, padahal mereka juga miskin dan perlu bantuan. Sehingga wajar kalau warga desa Data Cut dan lainnya akan cemburu kepada warga desa Aweek dan Bueng dan tidak *open* dengan program ini. Coba lihat, warga Data Cut hanya menerima kepulan-debu jalanan saat truck-truck pengangkut bantuan melintas menuju desa Aweek dan Bueng” (Wawancara April 2009).

Sementara Drs. Idris Harun (54) Wiraswasta; menimpali keterangannya terhadap pertanyaan serupa, beliau dengan berpendapat :

”Seharusnya, pemerintah dalam hal ini Dinas Mobilitas Penduduk Aceh, juga harus memperhatikan penduduk disekitar desa Aweek dan Bueng, kalau warga di 2 desa tersebut telah dijadikan lokasi pembangunan penataan, maka warga desa yang ada di sekitarnya juga mestinya ikut diperhatikan walaupun tidak standar dibanding dengan bantuan ke desa Aweek dan Bueng. Mengapa? Karena warga di sekitar di 2 desa tersebut juga miskin dan butuh perhatian Pemerintah. Dalam bahasa Aceh ada istilah yang mengatakan ; *buya krueng teu dong-dong, buya tamong meuraseki*...Kalau ini terjadi maka bukan tidak mungkin akan terjadi pro kontra dikalangan masyarakat itu sendiri terhadap program ini yang berakhir pada timbulnya kecemburuan sosial di tengah-tengah masyarakat....”(Wawancara, April 2009).

Sementara 10,00 persen responden menyatakan setuju bahwa program penataan yang dilaksanakan di desa Aweek dan Bueng memberikan manfaat bagi warga desa sekitar. Mereka beranggapan dengan adanya kegiatan pembangunan penataan pemukiman penduduk di desa Aweek dan Bueng, sedikit banyak warga desa sekitar telah mendapatkan pekerjaan harian lepas, karena saat pembangunan perumahan banyak pekerja/buruh yang ada berasal dari warga desa sekitar.

Menurut Saudara Ma'un (27) Swasta, mengatakan bahwa :

”Kami sangat beruntung dengan adanya program tersebut, jadinya kami ada pekerjaan. Kami yang menjadi buruh bangunan pada saat proyek itu dikerjakan, kami ada sekitar 100 orang waktu membangun perumahan itu” (Wawancara April 2009).

Menurut Pasal 3 Undang-undang Nomor 15 Tahun 1997 diamanatkan ”penyelenggaraan transmigrasi bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan transmigran dan warga sekitar”

Hal ini disebabkan proses pembangunan penataan tidak secara langsung dapat memberikan kontribusi dalam peningkatan taraf hidup masyarakat sekitar. Pembangunan suatu proyek yang dibangun ternyata belum mampu memberi pengaruh terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar akibat adanya pengaruh transformasi marjinal.

Menurut DJ. A. Simarmata "transformasi marjinal adalah pembangunan ekonomi yang terjadi sedemikian, sehingga proyek yang dibangun terhadap keseluruhan sistem ekonomi manfaatnya kecil terhadap masyarakat sekitar".

3). Terciptanya Rasa Persatuan dan Kesatuan antar Warga

Tabel 4.17

Jawaban responden terhadap tujuan program Terciptanya Rasa Persatuan dan Kesatuan antar Warga

No.	Jawaban Responden	Jumlah (orang)	Persen (%)
1	Sangat Setuju	10,00	22,22
2	Setuju	8,00	17,19
3	Ragu-ragu	21,00	46,67
4	Tidak Setuju	4,00	8,89
5	Sangat Tidak Setuju	2,00	4,44
	Jumlah	45,00	100,00

Sumber: Data Primer diolah, 2009

Dari Tabel 4.17 tersebut responden masih ragu-ragu dengan tujuan program yang dapat terciptanya rasa persatuan dan kesatuan antar warga, jumlah responden yang menjawab sangat setuju sebanyak 22,22%, yang menjawab setuju 17,79%, yang menjawab ragu-ragu 46,67%, 8,89% responden yang menjawab tidak setuju dan 4,44% menjawab sangat tidak setuju.

Sesuai dengan jawaban responden dari pertanyaan yang diajukan, 46,67 persen responden menjawab ragu-ragu. Ini berarti secara implementasi responden ragu-ragu dengan pertanyaan apakah dengan adanya penataan pemukiman penduduk

dapat terciptanya rasa persatuan dan kesatuan warga di kedua desa tersebut, walaupun secara konsep mereka setuju. Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa responden ditemui data bahwa di kedua desa yang ditata tersebut tidak terjadi keamanan yang signifikan dan hampir selalu terjadi perdebatan-perdebatan kecil walau tidak sampai berujung pada kontak fisik. Sebagai contoh pada saat beraktifitas di kegiatan sosial budaya dimana ada sebagian kecil warga desa sekitar yang kurang menyenangkan/cemburu sosial dengan adanya program penataan dari pemerintah yang dinilai sepihak dan menurut mereka kurang adil karena menurut mereka, warga sekitar Aweek dan desa Bueng ada juga yang lebih miskin dan perlu dibantu.

Menurut Tgk. H.Syafi'i (65) Pemuka Agama di Kecamatan Kota Jantho mengatakan :

"....Memang terjadi sedikit kecemburuan sosial diantara warga desa Aweek dengan warga sekitar hanya gara-gara adanya pembangunan trans di Desa Aweek dan Bueng. Seharusnya pihak pemerintah memberikan penyuluhan atau penjelasan kepada warga desa sekitarnya, alasan mengapa program penataan ini hanya dilakukan di desa Aweek dan Bueng, sehingga warga sekitar mengetahui dengan jelas alasannya...." (Wawancara April 2009).

Keterangan yang disampaikan oleh narasumber tersebut, merupakan kenyataan yang tidak dapat dipungkiri. Pihak pemerintah dalam hal ini Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk terkesan hanya memenuhi target proyek saja tanpa memperhatikan pembinaan lanjutan yang kontinyu dan berkesinambungan. Pada hal pembinaan sosial dan budaya kepada warga desa setempat dalam mengupayakan ketentraman dalam lingkungan tempat tinggal merupakan kegiatan yang sangat penting untuk pelaksanaan dan kesinambungan pembangunan. Namun jika pembinaan terus diberikan secara berkelanjutan niscaya ketentraman dan ketertiban akan terwujud sehingga dapat;

- a. Meningkatkan kesejahteraan transmigran dan masyarakat sekitarnya
- b. Meningkatkan dan pemeratakan pembangunan daerah
- c. Memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa

Dari jawaban responden 46,67% menjawab ragu-ragu dalam terciptanya rasa persatuan dan kesatuan antar warga disebabkan karena terjadinya kecemburuan sosial antara warga yang memperoleh bantuan dengan warga yang tidak memperoleh bantuan. Jawaban ragu-ragu tersebut tidak memberi pengaruh yang berarti bagi warga karena masyarakat selama ini selalu memelihara dan menjaga agar terciptanya keharmonisan sesama pemukim.

b. Kepentingan Program

1). Memperkuat Kepemilikan Lahan Usaha Tani

Dari hasil wawancara dengan warga desa setempat, maka jawaban responden adalah sebagai berikut:

Tabel 4.18
Jawaban responden terhadap Kepentingan program pengakuan hak kepemilikan lahan usaha tani

No.	Jawaban Responden	Jumlah (orang)	Persen (%)
1	Sangat Setuju	27,00	60,00
2	Setuju	9,00	20,00
3	Ragu-ragu	7,00	15,56
4	Tidak Setuju	2,00	4,44
5	Sangat Tidak Setuju	-	-
	Jumlah	45,00	100,00

Sumber: Data Primer diolah, 2009

Dari Tabel 4.18 tersebut sangat jelas bahwa responden sangat setuju dengan kepentingan program untuk memperkuat kepemilikan lahan usaha tani yaitu sebanyak 60,00% responden menjawab sangat setuju, 20,00% responden menjawab

setuju dan 15,56% responden yang menjawab ragu-ragu, 4,44% responden menjawab tidak setuju serta tidak ada responden yang menjawab sangat tidak setuju.

Berdasarkan undang-undang pertanahan dijelaskan bahwa suatu hamparan lahan yang telah dikeluarkan sertifikat kepada pemiliknya maka tidak akan dapat dialihkan kepemilikannya kepada orang lain. Tidak terkecuali lahan-lahan yang ada di desa Aweek dan desa Bueng. Dari data yang ada lahan usaha pertanian/ladang yang dimiliki oleh warga di kedua desa umumnya milik mereka yang dikuasai secara adat bukan hak milik yang bersertifikat. Dengan adanya program penataan ini diharapkan lahan usaha tani yang dahulunya hanya hak ulayat dapat dialihkan menjadi hak milik yang bersertifikat.

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan dengan penduduk desa Aweek dan desa Bueng diakui bahwa lahan usaha tani yang dikelola selama ini merupakan lahan milik adat yang telah dikelola secara turun temurun, sehingga dengan adanya program penataan ini telah dilakukan sertifikasi semua lahan usaha tani untuk menjadi hak milik. Luas lahan yang dikelola dan disertifikasi per kepala keluarga 1 Ha. Yang diberikan oleh pemerintah kepada setiap kepala keluarga.

2). Terciptanya Keresasian Lingkungan yang Asri

Dari hasil wawancara dengan warga desa setempat tentang terciptanya keserasian lingkungan, maka diperoleh jawaban sebagai berikut:

Tabel 4.19
Jawaban responden terhadap Kepentingan program Terciptanya Keresasian Lingkungan yang asri

No.	Jawaban Responden	Jumlah (orang)	Persen (%)
1	Sangat Setuju	2,00	4,44
2	Setuju	10,00	22,22
3	Ragu-ragu	8,00	17,79
4	Tidak Setuju	20,00	44,44
5	Sangat Tidak Setuju	5,00	11,11
	Jumlah	45,00	100,00

Sumber: Data Primer diolah, 2009

Pada Tabel 4.19 tersebut responden menyatakan 4,44% sangat setuju, 22,22% responden menjawab setuju terhadap kepentingan program untuk terciptanya keserasian lingkungan yang asri, 17,79% responden menjawab ragu-ragu, 44,44% responden menjawab tidak setuju dan 11,11% responden yang menjawab sangat tidak setuju. Ini menunjukkan bahwa program penataan pemukiman belum menunjukkan terciptanya keserasian terhadap lingkungan yang asri.

Dari tanggapan responen terhadap pertanyaan bahwa dengan adanya program penataan di Desa Aweek dan Desa Bueng telah memberikan keserasian terhadap lingkungan pemukiman yang telah ada, mendapat respon yang beragam. Dari responden yang ada 44,44 persen diantaranya merespon dengan pernyataan sangat tidak setuju, 22,22 persen menyatakan setuju sementara 17,79 persen lainnya ragu-ragu. Dari jawaban yang sependapat mereka memberikan alasan bahwa keserasian lingkungan di lokasi tidak seperti yang dikonsepskan. Karena rumah yang dibangun oleh pemerintah didirikan di antara rumah semula/asal sehingga tidak mencerminkan keserasian dan tidak tertata dengan baik. Sementara yang memberikan tanggapan setuju, alasan mereka tidak lebih hanya karena masyarakat yang dahulunya tidak memiliki rumah, kini telah memiliki rumah. Sehingga mereka tidak melihat dari

keserasian tata letak rumah yang seharusnya dibangun, hasil wawancara dengan Drs.

Ismail Tahir (56) PNS, menyatakan bahwa :

”.....Menurut pendapat saya, perumahan yang dibangun oleh pemerintah di Desa Aweek dan desa Bueng dengan tujuan ingin menata pemukiman penduduk tidak terwujud dengan baik. Karena rumah yang ada tersebut dibangun tidak memenuhi persyaratan penataan, dibangun diantara rumah-rumah yang ada dengan tata letak yang kurang bagus. Banyak diantara rumah tersebut bagian belakangnya berhadapan dengan bagian depan/halaman rumah lainnya. Yaaah, terkesan oleh saya rumah-rumah tersebut dibangun asal jadi dan asal letak tanpa menghiraukan keserasian lingkungan. Seharusnya dibangun sesuai tata letak sehingga muncul keasrian lingkungan” (Wawancara, April 2009)

Pada kesempatan lain Ir. Fakhruddin (52) Kabid PSDK, menjelaskan bahwa:

”Tidak terciptanya keserasian tata letak tersebut disebabkan karena lahan yang ada tidak tersedia untuk menata pemukiman di desa tersebut dengan baik, sementara kegiatan penataan ini harus segera diselesaikan pada tahun anggaran berjalan, dan ini telah disepakati oleh perangkat dan warga desa tersebut, karena kaum dhuafa di kedua desa itu memerlukan rumah sebagai tempat tinggalnya”.(Wawancara April 2009)

Bila ditinjau dari kondisi ini akibat lahan untuk penataan pemukiman yang terbatas dan keinginan masyarakat untuk mendapatkan rumah harus ditampung serta pelaksanaan kegiatan akan berakhir sehingga diperoleh kondisi yang serba salah dan pembangunan penataan ini yang terlalu dipaksakan tanpa melalui suatu sistem perencanaan yang sistematis dan sinergis. Akibatnya terjadi silang pendapat, karena masyarakat menginginkan rumah harus segera dibangun walaupun tidak sesuai dengan persyaratan dan aturan penataan, hal ini disadari karena kondisi masyarakat yang trauma akibat konflik. Berdasarkan hasil keputusan rapat mereka menginginkan agar rumah dapat dibangun secara berdekatan walaupun tidak tertata dengan baik. Hal ini disebabkan keinginan masyarakat supaya mereka dapat berinteraksi secara lebih dekat bila terjadi sesuatu.

Kondisi ini terkait erat bagaimana pelaksanaan suatu kebijakan yang telah direncanakan untuk dilaksanakan terhadap kepentingan publik, dalam rangkaian

fungsi manajemen yaitu *planing*, *organizing*, *actuating* dan *controlling*. Said. Z.A (2006:192) menyatakan "makin banyak kepentingan yang terkait, makin besar kemungkinan adanya perbedaan diantara kepentingan-kepentingan tersebut dengan tujuan dari kebijakan yang telah ditetapkan, oleh karena itu keberhasilan suatu kebijakan sangat ditentukan oleh strategi kebijakan yang tepat dan mampu menampung berbagai pandangan serta kepentingan yang berbeda dalam masyarakat sesuai dengan aturan.

3). Penentuan Calon Transmigran

Tabel 4.20
Jawaban responden terhadap Kepentingan Program dalam Penentuan Calon Transmigran

No.	Jawaban Responden	Jumlah (orang)	Persen (%)
1	Sangat Setuju	5,00	11,11
2	Setuju	19,00	42,23
3	Ragu-ragu	15,00	33,33
4	Tidak Setuju	4,00	8,89
5	Sangat Tidak Setuju	2,00	4,44
	Jumlah	45,00	100,00

Sumber: Data Primer diolah, 2009

Berdasarkan Tabel 4.20 tersebut responden setuju terhadap kepentingan program dalam penentuan calon transmigran, 11,11% responden menjawab sangat setuju, 42,23% responden menjawab setuju, 33,33% responden menjawab ragu-ragu, 8,89% responden yang menjawab tidak setuju dan 4,44% responden yang menjawab sangat tidak setuju.

Dari jawaban responden terhadap pertanyaan tersebut dalam proses penempatan calon pemukim pada saat konflik yang lalu mendapat jawaban dari responden 11,11% sangat setuju, 42,23% setuju, 33,33% ragu-ragu, 8,89% tidak setuju dan 4,44% sangat tidak setuju.

Dari jawaban tersebut menunjukkan bahwa penempatan calon pemukim dalam penataan pembangunan sudah tepat Sasarannya karena yang dimukimkan sesuai dengan program yang telah direncanakan adalah warga desa itu sendiri. Dari hasil tanggapan responden tersebut menunjukkan warga desa tidak menginginkan dalam rekrutmen calon pemukim dari desa lain.

Jawaban responden terhadap masing-masing perbandingan untuk penempatan calon pemukim dapat dilihat pada tabel berikut ini:

4). Perbandingan Penempatan 50% : 50%

Tabel 4.21
Jawaban responden terhadap Kepentingan program dalam perbandingan penempatan 50% : 50%

No.	Jawaban Responden	Jumlah (orang)	Persen (%)
1	Sangat Setuju	5,00	11,11
2	Setuju	20,00	44,44
3	Ragu-ragu	15,00	33,33
4	Tidak Setuju	3,00	6,67
5	Sangat Tidak Setuju	2,00	4,44
	Jumlah	45,00	100,00

Sumber: Data Primer diolah, 2009

Tabel 4.21 tersebut menunjukkan bahwa responden setuju dengan kepentingan program dalam perbandingan penempatan 50%:50% yaitu 11,11% responden menjawab sangat setuju, 44,44% responden menjawab setuju, 33,33% responden menjawab ragu-ragu, 6,67% responden yang menjawab tidak setuju dan 4,44% responden menjawab sangat tidak setuju.

5). Perbandingan Penempatan 25% : 75%

Tabel 4.22

Jawaban responden terhadap Kepentingan program dalam perbandingan penempatan 25% -75%

No.	Jawaban Responden	Jumlah (orang)	Persen (%)
1	Sangat Setuju	8,00	17,78
2	Setuju	7,00	15,56
3	Ragu-ragu	13,00	28,89
4	Tidak Setuju	5,00	11,11
5	Sangat Tidak Setuju	12,00	26,66
	Jumlah	45,00	100,00

Sumber: Data Primer diolah, 2009

Tabel 4.22 tersebut menunjukkan bahwa responden masih ragu-ragu dengan kepentingan program dalam perbandingan penempatan 25%:75% yaitu: 17,78% responden menjawab sangat setuju, 15,56% responden menjawab setuju, 28,89% responden menjawab ragu-ragu 11,11% responden menjawab tidak setuju dan 26,66% responden yang menjawab sangat tidak setuju.

6). Perbandingan Penempatan 0% : 100%

Tabel 4.23

Jawaban responden terhadap Kepentingan program dalam perbandingan penempatan 0% - 100%

No.	Jawaban Responden	Jumlah (orang)	Persen (%)
1	Sangat Setuju	-	-
2	Setuju	14,00	31,11
3	Ragu-ragu	9,00	20,00
4	Tidak Setuju	9,00	20,00
5	Sangat Tidak Setuju	13,00	28,89
	Jumlah	45,00	100,00

Sumber: Data Primer diolah, 2009

Tabel 4.23 tersebut menjelaskan bahwa responden setuju dengan kepentingan program dalam perbandingan penempatan 0%:100% yaitu: 31,11% responden menjawab setuju, 20,00% responden menjawab ragu-ragu, 20,00% responden

menjawab tidak setuju, 28,89% sangat tidak setuju dan tidak ada responden yang menjawab sangat setuju.

Dilihat dari kepentingan program terhadap perbandingan masing-masing dalam penempatan pemukiman dengan warga desa sekitar menunjukkan korelasi perbandingan penempatan (50% : 50%), perbandingan (25% : 75%) dan perbandingan (0% : 100%) di mana jawaban responden terhadap perbandingan penempatan 50% : 50% yaitu 11,11% sangat setuju, 44,44% setuju dan 33,33% ragu-ragu. Untuk perbandingan penempatan 25% : 75% dari jawaban responden diperoleh 17,78% sangat setuju, 15,56% setuju, 28,89% ragu-ragu, 11,11% tidak setuju dan 26,66% sangat tidak setuju. Dari jawaban responden tersebut diatas menunjukkan bahwa kepentingan program terhadap penempatan calon pemukim dalam penataan pemukiman ini sangat mengharapkan lebih diprioritaskan kepada warga setempat. Untuk perbandingan penempatan 0% : 100% dari jawaban responden diperoleh angka 31,11% setuju, 20,00% ragu-ragu, 20,00% tidak setuju dan 28,89% sangat tidak setuju. Di sini juga terlihat bahwa jawaban responden menunjukkan korelasi yang signifikan terhadap kepentingan program dalam penempatan calon pemukim lebih diutamakan kepada warga setempat.

Dalam kondisi ini sulit diharapkan terjadinya transformasi sumber daya manusia dan alih teknologi terhadap suatu kawasan pemukiman, namun dalam pembangunan penataan pemukiman di desa Aweek dan desa Bueng tidak terjadi seperti yang diharapkan karena yang ditempatkan warga desa itu sendiri. Padahal sebenarnya hakikat transmigrasi adalah merupakan kombinasi upaya pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya manusia dengan bantuan ilmu pengetahuan dan

teknologi sehingga terjadi adanya transformasi sumber daya manusia dan alih teknologi.

c. Proses Program

1). Tanggapan Terhadap Kondisi Jalan Penghubung

Tabel 4.24
Jawaban responden terhadap Proses program Untuk tanggapan terhadap sarana dan prasarana kondisi jalan penghubung

No.	Jawaban Responden	Jumlah (orang)	Persen (%)
1	Sangat baik	-	-
2	Baik	-	-
3	Kurang Baik	27,00	60,00
4	Sangat Kurang Baik	18,00	40,00
	Jumlah	45,00	100,00

Sumber: Data Primer diolah, 2009

Berdasarkan tabel 4.24 tersebut tanggapan terhadap sarana dan prasarana kondisi jalan penghubung kurang baik karena sebanyak 60,00% responden menjawab kurang baik, 40,00% responden menjawab sangat kurang baik dan tidak ada responden yang menjawab baik dan sangat baik serta ragu-ragu.

Jawaban responden yang terhimpun dari pertanyaan bagaimana kondisi sarana dan prasarana yang dibangun selama program penataan pemukiman desa dilaksanakan, menunjukkan terdapat tidak seorangpun responden yang memberikan tanggapan bahwa kondisi sarana dan prasarana dari dan ke lokasi desa tersebut dalam keadaan baik. Dari persentase yang ditemui 60,00% memberikan tanggapan kurang baik. Kondisi ini dibenarkan oleh beberapa responden saat diwawancarai secara mendalam. Umumnya mereka berpendapat kondisi jalan penghubung dan jalan poros yang ada di kedua desa penataan tersebut sangat memprihatinkan. Sementara untuk kondisi jembatan/gorong-gorong dari wawancara beberapa tokoh masyarakat

berpendapat kualitas gorong-gorong kurang baik. Tgk. H. Ridwan (55) Tokoh Masyarakat mengatakan:

”Kondisi gorong-gorong yang telah dibangun di desa kami, umurnya hanya 8 bulan, setelah itu tidak dapat digunakan lagi, apalagi sekarang mungkin ada sebagian yang telah hancur total, disamping kayunya kurang bagus dan terkesan dibuat asal jadi.....” (Wawancara, April 2009).

Pada saat hal ini dikonfirmasi kepada pihak terkait, Ir. Fakhruddin (52) Kabid PSDK menjelaskan bahwa:

”Kualitas sarana dan prasarana yang dibangun oleh Dinas Mobilitas Penduduk tidak serupa dengan kualitas yang dibangun oleh instansi terkait lain yang mungkin bisa bertahan beberapa tahun, sehingga wajar saja kalau hanya bertahan satu atau dua tahun, apalagi program kita ini hanya program penataan bukan transmigrasi murni” (Wawancara, April 2009).

Setelah di analisis secara umum responden menjawab bahwa kondisi jalan penghubung yang menuju lokasi 60,00% menjawab kurang baik, 18,00% sangat kurang baik dan kondisi ini dibenarkan oleh beberapa responden yang berhasil diwawancarai secara mendalam umumnya mereka berpendapat, kondisi jalan penghubung dan jalan poros menuju kelokasi sangat memprihatinkan sehingga para pengguna jalan merasa kewalahan. Kondisi ini akan berpengaruh terhadap roda perekonomian masyarakat dalam hal memasarkan hasil-hasil pertanian dan perkebunan. Seharusnya pemerintah daerah harus lebih peka terhadap kondisi jalan tersebut untuk segera dilakukan upaya peningkatan dalam rangka mendorong tumbuhnya perekonomian masyarakat.

Jawaban responden dan penjelasan pihak Dinas terhadap sarana dan prasarana jalan penghubung dan kondisi jembatan yang tidak bertahan lama/tidak bermutu jelas terlihat bahwa pekerjaan ini direncanakan tidak sesuai aturan dan kondisi lapangan serta pelaksanaannya terlalu diburu untuk dapat diselesaikan sesuai dengan target waktu dan mengabaikan kaidah mutu dalam pelaksanaan.

Sehingga pembangunan fisik yang telah dibangun tersebut tidak efektif dan efisien serta tidak dapat bertahan lama.

Dari hasil wawancara dengan pejabat Dinas Pekerjaan Umum pemerintah Kabupaten Aceh Besar mengenai peningkatan jalan tersebut akan di prioritaskan penanganannya dalam tahun anggaran yang akan datang.

2). Tanggapan Terhadap Kondisi Jembatan

Tabel 4.25
Jawaban responden terhadap Proses program Untuk tanggapan terhadap sarana dan prasarana kondisi jembatan/gorong-gorong

No.	Jawaban Responden	Jumlah (orang)	Persen (%)
1	Sangat baik	-	-
2	Baik	9,00	20,00
3	Kurang Baik	14,00	31,11
4	Sangat Kurang Baik	22,00	48,89
	Jumlah	45,00	100,00

Sumber: Data Primer diolah, 2009

Dari Tabel 4.25 tersebut terhadap proses program untuk tanggapan terhadap sarana dan prasarana kondisi jembatan/gorong-gorong sangat kurang baik karena sebanyak 48,89% responden menjawab sangat kurang baik, 30,11% responden menjawab kurang baik, 20,00% responden menjawab baik dan tidak ada responden yang menjawab sangat baik dan ragu-ragu.

Said Z.A (2006:144) mengemukakan "suatu kebijakan boleh jadi bermutu, tetapi kurang mendapat dukungan dalam masyarakat, sebaliknya kebijakan mungkin mendapat dukungan yang cukup luas tetapi kurang bermutu dilihat dari substansi, suatu kebijakan yang baik dan berhasil adalah kebijakan yang bermutu dan memperoleh dukungan dari masyarakat serta dapat dipertanggungjawabkan.

3). Tanggapan terhadap kondisi bangunan rumah

Tabel 4.26
Jawaban responden terhadap Proses program Untuk tanggapan terhadap kondisi bangunan rumah pemukim yang telah dibangun

No.	Jawaban Responden	Jumlah (orang)	Persen (%)
1	Sangat baik	20,00	44,44
2	Baik	16,00	35,56
3	Kurang Baik	7,00	15,56
4	Sangat Kurang Baik	2,00	4,44
	Jumlah	45,00	100,00

Sumber: Data Primer diolah, 2009

Tabel 4.26 tersebut menunjukkan bahwa sangat baik bila proses program untuk tanggapan terhadap kondisi bangunan rumah pemukim yang telah dibangun karena sebanyak 44,44% responden yang menjawab sangat baik, 35,56% responden menjawab baik, 15,56% menjawab kurang baik dan 4,44% responden yang menjawab sangat kurang baik dan tidak ada yang menjawab ragu-ragu.

Terhadap pertanyaan kondisi bangunan rumah pemukim yang dibangun, terdapat beberapa tanggapan beragam, jawaban terbanyak adalah bangunan rumah yang dibangun sangat baik, kurang baik dan sangat kurang baik kualitasnya. Hasil analisa menunjukkan yang menjawab baik dan sangat baik 45,00 persen, kurang baik 35,00 persen, sangat kurang 15,00 persen, sementara 5,00 persen sisanya menjawab sangat kurang baik. Responden yang memberi tanggapan baik, sangat baik memberikan alasan bahwa kondisi ini kalau dibanding dengan rumah awal/asal yang tidak layak huni, Sedangkan responden yang menjawab kurang baik beralasan kualitas papan yang digunakan adalah mutu sembarang yang mudah hancur dimakan rayap, di samping kualitas pekerjaan yang sangat mengecewakan. Sementara yang menjawab sangat kurang baik, alasan mereka karena memang dari mutu material

yang digunakan sampai kualitas pekerjaan yang tidak sempurna di tambah lagi penataan letak rumah yang tidak beraturan.

Menurut Tgk. Rusli Umar (45) Tokoh Ulama menjelaskan bahwa :

”Kalau dibandingkan dengan rumah pertama yang mereka miliki, rumah trans yang dibagikan sudah memadai, punya kamar, ruang tamu dan wc yang layak”. (Wawancara, April 2009).

Pada bagian lain Ibu Rukiyah (43) IRT, menjelaskan bahwa :

”Rumah yang dibagikan untuk kami kurang bagus bangunannya, papannya tipis, mutu papan kurang bagus dan cara buatnyapun *nggak* bagus, saya takut kalau ada angin kencang sedikit rumah saya akan ambruk...” (Wawancara, April 2009).

Tapi berbeda dengan pendapat Abdullah Daud (45) Pemuda menjelaskan bahwa :

”Kualitas bangunannya sudah lumayan, dibandingkan rumah yang lama, hanya saja penataannya tidak ada, terkesan semraut” (Wawancara, April 2009).

Sementara Ir. T. Bahagia (47) Kabid Program menjelaskan :

”Sebenarnya semua rencana penataan di desa Aweek dan Bueng sudah matang dibahas pada Bidang Program dari mulai perencanaan tata ruang sampai tata bangunannya, namun mengingat masa itu masih konflik mungkin ada beberapa kebijakan yang bergeser dari porosnya. Namun secara umum semua program di atas telah diselesaikan dengan baik, hanya saja diminta kepada warga di kedua desa tersebut agar dapat menjaga dan merawat aset yang telah ada tersebut, baik bagunan rumah maupun sarana serta prasarana yang ada, agar lama bertahan” (Wawancara, April 2009).

Hasil jawaban responden tersebut menunjukkan bahwa umumnya mereka memberi jawaban kondisi bangunan rumah yang dibangun sangat baik, jawaban responden dari hasil wawancara secara mendalam juga ada yang mengatakan kurang bagus dilihat dari kualitas papan yang digunakan, namun dari penjelasan Kabid Program Dinas Mobilitas Penduduk Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam disadari bahwa ada beberapa kebijakan dalam perencanaan awal bergeser, kondisi ini

disebabkan pada saat dilakukan pembangunan masih dalam situasi konflik, sehingga pengawas kurang melakukan pengawasan di lapangan.

4). Tanggapan terhadap bangunan kondisi fasilitas umum

Tabel 4.27
Jawaban responden terhadap Proses program Untuk tanggapan terhadap bangunan kondisi fasilitas umum

No.	Jawaban Responden	Jumlah (orang)	Persen (%)
1	Sangat baik	-	-
2	Baik	13,00	28,89
3	Kurang Baik	32,00	71,11
4	Sangat Kurang Baik	-	-
	Jumlah	45,00	100,00

Sumber: Data Primer diolah, 2009

Dari tabel 4.27 tanggapan terhadap bangunan kondisi fasilitas umum kurang baik, ini sesuai dengan jawaban responden yang menjawab baik sebanyak 28,89%, responden yang menjawab kurang baik 71,11% dan tidak ada responden yang menjawab sangat baik dan sangat kurang baik serta ragu-ragu.

Sementara tanggapan responden terhadap kondisi bangunan fasilitas umum yang ada di lokasi seperti masjid dan balai desa dikomentari dengan baik artinya responden menilai bahwa kondisi bangunan fasilitas umum yang dibangun mempunyai kualitas yang baik.

Menurut Imeum Meunasah Desa Bueng Amiruddin Ismail (56) :

"Saya selaku imam di Desa Bueng sangat berterima kasih kepada pemerintah yang telah membangun sebuah meunasah sebagai tempat ibadat kami di desa penataan ini, apalagi bangunan meunasah ini sangat bagus dan jauh bila dibandingkan dengan meunasah awal yang kami miliki. Bangunan meunasah ini memiliki sarana wudhu' dan dilengkapi dengan sarana air bersih" (Wawancara, April 2009)

Terhadap kondisi pembangunan fasilitas umum responden memberi jawaban baik 28,89%, kurang baik 71,11%, dari wawancara yang mendalam dengan warga

diperoleh jawaban mereka berterima kasih atas bantuan yang telah diberikan kepada masyarakat, namun bantuan tersebut untuk membangun fasilitas umum ini masih sangat terbatas. Diharapkan untuk yang akan datang agar ditingkatkan lagi dana terhadap pembangunan fasilitas umum karena kami sebagai warga tidak mampu memberikan kontribusi bantuan berupa dana untuk melakukan pembangunan fasilitas umum yang kami perlukan, oleh karena itu warga masyarakat di desa tersebut mohon kiranya dapat dibantu sarana dan prasarana.

Sesuai keputusan Menteri Transmigrasi dan Tenaga Kerja Penyiapan program pemukiman meliputi penyiapan area, lahan usaha, sarana dan prasarana pemukiman, pembangunan perumahan serta fasilitas umum. Penyiapan pemukiman transmigrasi adalah untuk mewujudkan permukiman yang layak huni, layak usaha dan layak berkembang.

d. Efek Program

1). Terjadinya kecemburuan sosial antara warga desa (dampak negatif)

Tabel 4.28
Jawaban responden terhadap efek program Untuk tanggapan terhadap Terjadinya kecemburuan sosial antara warga desa (dampak negatif)

No.	Jawaban Responden	Jumlah (orang)	Persen (%)
1	Sangat Setuju	23,00	51,11
2	Setuju	4,00	8,89
3	Ragu-ragu	11,00	24,45
4	Kurang Setuju	5,00	11,11
5	Sangat Tidak Setuju	2,00	4,44
	Jumlah	45,00	100,00

Sumber: Data Primer diolah, 2009

Dari tabel 4.28 tersebut menunjukkan bahwa terhadap terjadinya kecemburuan sosial antara warga desa (dampak negatif), hampir semua responden

menjawab sangat setuju yaitu sebanyak 51,11%, 8,89% responden menjawab setuju, 34,45% responden yang menjawab ragu-ragu, 11,11% responden yang menjawab kurang setuju dan 4,44% responden yang menjawab sangat kurang setuju.

Tanggapan responden terhadap pertanyaan apakah terjadi kecemburuan sosial diantara warga dengan adanya program penataan di desa Aweek dan Bueng, memperoleh jawaban yang beragam. Dari beberapa responden yang ditanyakan, terlihat 51,11% menyatakan setuju, 24,45% ragu-ragu. Setelah dilakukan wawancara mendalam terhadap responden dan beberapa tokoh masyarakat sekitar lokasi studi, menyatakan kecemburuan tersebut muncul akibat adanya ketidakadilan pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah antara warga desa penataan dengan warga desa sekitarnya. Karena kenyataannya, selama mereka berdomisili di desa mereka, jarang sekali tersentuh kegiatan pembinaan dari pemerintah apalagi menerima bantuan seperti warga desa Aweek dan Bueng selama ini.

Hal ini sesuai dengan pengakuan Abdurrahman (45) Petani :

”Selama program penataan dilakukan di Desa aweek dan Bueng, saya melihat telah terjadi kecemburuan masyarakat desa sekitarnya, karena masyarakat tersebut selama ini hanya melihat-lihat saja truck pengangkut bantuan yang lewat untuk desa Aweek dan Bueng, sementara warga desa kami juga banyak yang dhuafa dan butuh bantuan serupa namun tidak mendapat perhatian dari pemerintah. Kalau kenyataan seperti ini terus, siapa yang enggak cemburu” (Wawancara, April 2009).

Dari hasil wawancara yang mendalam diperoleh jawaban bahwa selama program penataan pembangunan pemukiman di lakukan telah terjadi kecemburuan sosial, hal ini disebabkan desa sekitar lokasi penataan kondisinya juga membutuhkan bantuan serupa dan kehidupan masyarakat disekitar lokasi banyak kaum dhuafa dan tergolong miskin yang membutuhkan perhatian dari pemerintah. Dampak yang ditimbulkan ini harus menjadi bahan pertimbangan dan perhatian pemerintah agar

aspirasi masyarakat ini di tampung dan di prioritaskan karena tujuan transmigrasi adalah meningkatkan kesejahteraan transmigran dan masyarakat sekitar.

2). Terjadinya Penataan dan Persebaran Penduduk yang seimbang

Tabel 4.29
Jawaban responden terhadap efek program Untuk tanggapan terhadap Penataan dan Persebaran Penduduk yang seimbang

No.	Jawaban Responden	Jumlah (orang)	Persen (%)
1	Sangat Setuju	11,00	24,45
2	Setuju	4,00	8,89
3	Ragu-ragu	21,00	46,67
4	Kurang Setuju	5,00	11,11
5	Sangat Tidak Setuju	4,00	8,89
	Jumlah	45,00	100,00

Sumber: Data Primer diolah, 2009

Dari tabel 4.29 terlihat responden masih ragu-ragu dengan efek program untuk tanggapan terhadap penataan dan persebaran penduduk yang seimbang yaitu sebanyak 24,45% responden menjawab sangat setuju, 8,89% responden menjawab setuju, 46,67% responden yang menjawab ragu-ragu, 11,11% responden yang menjawab kurang setuju dan 8,89% responden menjawab sangat kurang setuju.

Manakala diminta jawabannya terhadap pertanyaan tersebut kepada responden, secara umum mereka tidak sependapat. Alasan mereka setelah melihat realisasi di lapangan, penataan yang diprogramkan tidak terlaksana secara optimal di tingkat lapangan. Responden menilai penataan yang dilaksanakan tidak memenuhi persyaratan sebuah penataan pemukiman, karena rumah yang di bangun oleh pemerintah tidak tertata dengan baik dan tidak memenuhi persyaratan standar sanitasi lingkungan pemukiman. Tetapi justru dibangun dilokasi diantara rumah-rumah warga lain yang juga tidak mencerminkan penataan yang baik. dari wawancara, ini diakui oleh Drs. Bustami (54) PNS yang mengatakan:

".....Rumah-rumah yang dibangun di lokasi tersebut, sama sekali tidak mencerminkan penataan pemukiman yang baik, banyak rumah yang dibangun itu terletak disudut-sudut rumah yang telah ada bahkan terkesan kumuh". (Wawancara, April 2009).

Lebih jauh menurut Ridwan Usman, SH (53) PNS menjelaskan :

"Rumah warga yang ditata di Desa Bueng, saya nilai tidak memenuhi persyaratan rumah sehat, karena disamping kualitas rumah yang jelek, juga tidak memenuhi kriteria lingkungan rumah sehat. Rumah terletak disudut rumah lain yang letaknya tidak beraturan. Saya sarankan ke depan pihak Dinas Mobilitas Penduduk dapat mempedomani aturan yang ada di Dinas Kimpraswil untuk menata desa-desa yang ada di Aceh." (Wawancara, April 2009).

Selanjutnya menurut Ir. Ismail (35) Swasta, mengatakan bahwa :

"Rumah yang dibangun sebagai aplikasi penataan desa Aweek dan Bueng, menurut saya sudah baik penataannya. Kualitas rumahnyapun lumayan baik, hanya saja yang saya khawatirkan apakah warga tersebut mampu merawat rumah yang ada tersebut? Karena yang saya tahu banyak warga di desa tersebut tergolong dhuafa/miskin, jangankan untuk merawat rumah yang diberikan untuk makan sehari-hari saja mereka tidak cukup. Untuk itu perlu perhatian dari pemerintah kabupaten untuk *mensupport* kondisi ini agar adanya pembinaan secara berkesinambungan, sehingga warga dapat terbantu". (Wawancara, April 2009).

Jawaban responden terhadap keseimbangan penempatan calon pemukim mendapat jawaban dari responden 24,45% sangat setuju, 46,67% ragu-ragu dan 8,89% setuju, dari jawaban tersebut menunjukkan bahwa responden masih ragu-ragu menentukan sikap terhadap keseimbangan calon pemukim dalam upaya menjaga keseimbangan penduduk dan mereka sepertinya belum bisa menerima kehadiran warga dari daerah lain. Kondisi ini menunjukkan bahwa sulitnya terjadi proses pembauran di wilayah tersebut, untuk keseimbangan penyebaran penduduk pada wilayah seperti ini harus dilakukan melalui program penataan pemukiman penduduk secara lokal (transmigrasi lokal).

Terlepas dari komentar responden tersebut, penataan dan persebaran penduduk yang seimbang adalah merupakan efek program ini yang terlihat dengan jelas, dalam penyelenggaraan transmigrasi diarahkan pada penataan persebaran

penduduk yang sesuai dan seimbang dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan. Walaupun secara personal adanya perilaku warga desa yang tercermin kurang baik, misalnya mereka tidak menempati rumah tersebut dan pulang ke rumah tempat asal mereka yang tidak jauh dari desa penataan. Padahal secara ketentuan yang berlaku, mereka/pemukim/transmigran mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipatuhi antara lain harus menetap di lokasi pemukiman, memelihara kelestarian lingkungan, memelihara dan mengembangkan kegiatan usahanya secara berdaya dan berhasil guna, mempertahankan dan memelihara pemilikan tanah dan asset produksinya, dan memelihara hubungan yang serasi dengan masyarakat sekitar serta menghormati adat istiadat.

4. Terjadinya Transformasi SDM dan Alih Tehnologi

Tabel 4.30
Jawaban responden terhadap efek program Untuk tanggapan terhadap Terjadinya Transformasi SDM dan Alih Teknologi

No.	Jawaban Responden	Jumlah (orang)	Persen (%)
1	Sangat Setuju	-	-
2	Setuju	4,00	8,89
3	Ragu-ragu	11,00	24,45
4	Kurang Setuju	27,00	60,00
5	Sangat Tidak Setuju	3,00	6,67
	Jumlah	45,00	100,00

Sumber: Data Primer diolah, 2009

Berdasarkan Tabel 4.30 kebanyakan responden kurang setuju dengan efek program terhadap terjadinya transformasi SDM dan alih teknologi karena lebih dari setengah responden yang menjawab kurang setuju yaitu 60,00%, 24,45% responden yang menjawab ragu-ragu, 8,89% responden lainnya menjawab setuju, dan 6,67% responden menjawab sangat tidak setuju. Indikasinya adalah belum terjadi transformasi SDM dan alih teknologi di tempat penataan pemukiman penduduk.

Hasil wawancara terhadap responden secara mendalam terhadap pertanyaan apakah dengan adanya program penataan pemukiman penduduk yang dilaksanakan di Desa Aweek dan desa Bueng telah memberikan efek terjadinya transformasi sumberdaya manusia dan alih teknologi diantara pemukim, responden memberikan jawaban yang beragam.

Secara umum mereka berpendapat efek program tidak terlihat dengan jelas, ini disebabkan karena warga yang ditata tersebut terdiri dari warga desa setempat dan bukan pendatang, dimana tingkatan SDM dan keterampilan yang mereka miliki mempunyai nilai umumnya sama. Apabila pemukim yang ditata tersebut berasal dari luar desa setempat, kemungkinan akan terwujud transformasi SDM dan alih teknologi. Hal ini sebagaimana yang diungkapkan oleh Junaidi (56) Peg. Kecamatan saat diwawancarai oleh peneliti. Beliau menerangkan bahwa :

"...Sulit terjadinya transformasi SDM dan teknologi di kedua desa penataan tersebut, karena warga yang dimukimkan dan ditata rumahnya merupakan warga desa setempat, bukan warga desa sekitar atau warga desa lain, sehingga diantara mereka sudah mengetahui tingkatan pemikirannya masing-masing, apalagi di desa tersebut faktor kekerabatan sangat kental sekali. Lain halnya kalau yang dimukimkan tersebut ada yang berasal dari desa lain, Seperti contoh, warga pengungsi yang dimukimkan di Desa Teurebeh atau Desa Cucum, mereka umumnya para korban tsunami dari daerah asal yang berbeda-beda yang dimukimkan di satu tempat, sehingga cenderung mereka akan membawa adat atau kebiasaan mereka sendiri-sendiri, yang dapat dikolaborasikan di tempat yang barudemikian juga ilmu yang mereka miliki dapat di sinergikan sehingga akan muncul teknologi baru di tempat yang baru pula" (Wawancara, April 2009).

Kondisi ini sangat tidak menguntungkan bagi warga desa Aweek dan Desa Bueng bila dilihat dari segi efek program, karena untuk program penataan pemukiman yang dilakukan bagi warga korban tsunami/kaum dhuafa yang dibangun di kawasan Teureubeh dan Cucum Kota Jantho dalam wilayah Kabupaten Aceh Besar dimana mereka di rekrut dari tenda-tenda darurat disepul kota Banda Aceh, Aceh Besar dan Aceh Jaya dengan tingkat keterampilan yang berbeda dan

karakteristik yang berbeda sehingga lokasi pemukiman tersebut sangat dinamis dan tingkat pertumbuhan kawasan tersebut sangat cepat.

Pembangunan pemukiman dan penataan lokasi tersebut dibangun oleh pihak International Organization Migration (IOM) bekerja sama dengan Dinas Mobilitas Pendidik Provinsi NAD yang membantu pengadaan sarana produksi pertanian seperti: bibit tanaman, jatah hidup serta bantuan lainnya selama 2 tahun. Kondisi masyarakat disini sangat berkembang dan menjadi suatu kawasan pertumbuhan baru di Kota Jantho, hal ini disebabkan dalam pembangunan sarana dan prasarana dilengkapi dengan fasilitas umum seperti: sekolah, puskesmas, taman kanak-kanak, dan pasar mini sehingga seluruh hasil produksi pertanian dapat dilakukan transaksi dilokasi tersebut serta pembinaan terhadap lokasi pemukiman ini kontinu dengan melibatkan semua instansi terkait.

5. Peran Serta Masyarakat

a. Perhatian responden terhadap kesinambungan program penataan

Tabel 4.31
Perhatian responden terhadap kesinambungan program penataan

No.	Jawaban Responden	Jumlah (orang)	Persen (%)
1	Sangat Setuju	5,00	11,11
2	Setuju	13,00	28,89
3	Ragu-ragu	23,00	51,11
4	Tidak Setuju	2,00	4,44
5	Sangat Tidak Setuju	2,00	4,44
	Jumlah	45,00	100,00

Sumber: Data Primer diolah, 2009

Tabel 4.31 menunjukkan bahwa 51,11% responden menjawab ragu-ragu dalam memperhatikan kesinambungan program penataan pemukim, 28,89% responden menjawab setuju, 11,11% responden yang menjawab sangat setuju dan 4,44% responden yang menjawab tidak setuju dan sangat tidak setuju.

Terhadap pertanyaan peneliti kepada responden mengenai bagaimana perhatian atau peranserta masyarakat di Kota Jantho terhadap program penataan pemukiman yang telah dilaksanakan di Desa Aweek dan Bueng diperoleh jawaban yang hampir bersamaan. Sebagian besar responden sekitar 51,11 persen meragukan kesinambungan program ini dapat berkelanjutan terhadap warga yang telah ditata tersebut. Sebagian lainnya sekitar 28,89 persen setuju menilai bahwa perhatian masyarakat sekitar terhadap pembangunan penataan yang telah dilaksanakan sangat antusias dan mengharapkan program serupa dapat dilanjutkan. Sedangkan selebihnya 11,11 persen menilai sangat setuju adanya pembangunan penataan tersebut dan 4,44 persen menilai sangat tidak mungkin dapat dilanjutkan.

Responden yang meragukan terhadap kesinambungan program penataan, beranggapan kegiatan tersebut hanya diperuntukkan kepada sebagian kecil kaum dhuafa yang ada. Sementara masih banyak kaum dhuafa yang terdapat di desa-desa yang berdekatan dengan kedua desa lokasi studi tidak mendapatkan bantuan sehingga terjadi kecemburuan sosial dan menimbulkan permasalahan baru. Responden sangat mengharapkan untuk masa yang akan datang pemerintah dalam hal ini Dinas Mobilitas Penduduk dapat mengadakan identifikasi lebih mendalam sebelum menentukan lokasi yang akan dilakukan penataan dengan memberikan bantuan serupa walaupun secara bertahap.

Hal ini sebagaimana yang diungkapkan oleh Drs. Hasan Basri, M.Si (54)

Dosen :

"Sepengatahuan saya, program penataan yang telah dilaksanakan oleh pemerintah provinsi di desa Aweek dan Bueng telah mendapat perhatian dari masyarakat sekitar termasuk masyarakat kami yang ada di Desa Jantho Makmur ini. Perhatian yang dimaksud ada yang bernada positif dan negatif. Perhatian yang bernada positif, mereka menganggap program ini telah memberikan kontribusi kepada kesejahteraan masyarakat yang ada di sekitar desa kami

terutama dalam pemenuhan perumahan. Tetapi perhatian yang bernada negatif juga tidak sedikit. Mereka beranggapan program ini dinilai sepihak dan tidak adil, kerana pada saat penentuan lokasi/desa yang akan ditata hendaknya dilakukan identifikasi atau survey terlebih dahulu untuk menentukan desa yang akan ditata. Disamping itu banyak warga desa yang ada di desa sekitar desa Aweek dan Bueng, jauh lebih miskin, mereka lebih butuh bantuan perumahan dan pembinaan lainnya (Wawancara, April 2009).

Pada kesempatan lain, Syamsul, S.Ag (35) Guru SMA memberikan tanggapannya bahwa :

”Program penataan ini saya nilai baik dan perlu dilanjutkan pada tahun-tahun mendatang, karena sangat menyentuh pada kebutuhan akan perumahan masyarakat kaum dhuafa. Apalagi kita ini baru saja terlepas dari masa konflik yang berkepanjangan, dimana semua harta benda masyarakat termasuk rumah yang ikut musnah, jadi dengan adanya program penataan ini telah terpenuhi satu kebutuhan pokok yakni perumahan” (Wawancara, April 2009).

Kesinambungan program pembinaan keterampilan dan bantuan modal usaha terhadap desa yang telah dilakukan pembangunan perumahan harus lebih intensif digerakkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Aceh Besar untuk mempercepat pertumbuhan perekonomian dikawasan tersebut, karena dari hasil wawancara responden mengharapkan agar pemerintah daerah dapat membantu modal usaha dan latihan wirausaha kepada warga agar masyarakat dapat mandiri, maju dan memiliki kemampuan untuk menjadi contoh terhadap desa sekitar.

Pemerintah Kabupaten Aceh Besar dinilai tidak adil dalam mengalokasikan anggaran pembangunan daerah untuk kawasan terpencil dan terisolir sehingga sulit untuk berkembang. Bahkan untuk Kecamatan Kota Jantho yang merupakan pusat Ibu Kota Kabupaten, alokasi anggarannya lebih kecil di bandingkan dengan Kecamatan lain. Hal ini terlihat berdasarkan analisis terhadap APBK Kabupaten Aceh Besar mulai tahun anggaran 2007 hingga 2010 (Serambi Indonesia, 21 Mei 2010 hal. 3).

Kebijakan pembangunan Kabupaten Aceh Besar masih terlihat sentralistik dalam pendekatan kebijakan penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan

belum berjalan secara profesional dan proporsional, sehingga diperlukan konsolidasi internal dengan memperbaiki manajemen tatakelola Pemerintahan dalam mewujudkan kepedulian dan keberpihakan anggaran kepada masyarakat yang lemah dan kurang mampu agar dapat meningkatkan kehidupan ekonomi yang lebih baik.

Perhatian masyarakat dituangkan melalui pernyataan atau penilaian tersebut merupakan jelmaan atas sikap kritis masyarakat dalam memberikan apresiasi terhadap program transmigrasi (baca: penataan pemukiman). Ini menunjukkan bahwa peran serta masyarakat dalam program transmigrasi dapat diwujudkan dalam bentuk tenaga sukarela atau saran tindak lanjut untuk perbaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

b. Perlunya musyawarah dalam setiap program pembangunan

Tabel 4.32
Jawaban responden terhadap Perlunya musyawarah dalam setiap program pembangunan

No.	Jawaban Responden	Jumlah (orang)	Persen (%)
1	Sangat Setuju	23,00	51,11
2	Setuju	11,00	24,45
3	Ragu-ragu	9,00	20,00
4	Kurang Setuju	2,00	4,44
5	Sangat Tidak Setuju	-	-
	Jumlah	45,00	100,00

Sumber: Data Primer diolah, 2009

Tabel 4.32 tersebut menjelaskan bahwa responden sangat setuju terhadap perlunya musyawarah dalam setiap program pembangunan, itu jelas sekali terlihat dari jawaban responden yaitu sebanyak 51,11% responden menjawab sangat setuju, 24,45% responden menjawab setuju, 20,00% responden yang menjawab ragu-ragu dan 4,44% responden menjawab kurang setuju dan tidak ada responden yang menjawab sangat kurang setuju.

Terhadap jawaban responden tentang perlunya dilakukan musyawarah terlebih dahulu sebelum program pembangunan dilaksanakan di suatu lokasi. Ditanggapi secara antusias oleh responden. Dari data yang terhimpun, 97,00 persen responden berpendapat bahwa sangat setuju apabila pemerintah melakukan musyawarah terlebih dahulu dengan masyarakat atau tokoh masyarakat yang ada di Kecamatan Kota Jantho sebelum program penataan ini dilakukan. Bahkan ada beberapa responden menyarankan agar diadakan musyawarah terhadap semua sektor pembangunan yang akan dilakukan di Kota Jantho, sehingga diharapkan muncul rasa memiliki terhadap hasil pembangunan dalam masyarakat. Komentar ini dibenarkan oleh Drs. Faisal Djuned (45) sebagai Tokoh Pemuda yang mengatakan:

”Kalau tidak dimusyawahkan terlebih dahulu rencana pembangunan tersebut hasilnya ya begini ini, masyarakat antipati dengan pembangunan itu. Artinya masyarakat akan duduk manis di suatu sudut, sementara pembangunan duduk di sudut yang lain, tidak sinergis, akhirnya muncul sikap antipati dalam diri masyarakat itu sendiri.” (wawancara, April 2009).

Lebih jauh Drs. Thaib Gani, (45) PNS Kecamatan Kota Jantho, mengatakan :

”Selama program penataan itu berjalan, kami tidak dilibatkan secara langsung baik waktu identifikasi, perencanaan, pelaksanaan program maupun evaluasi program. Sehingga bagaimana kendala permasalahan khususnya terhadap warga sekitar kami juga tidak mengetahuinya. Akibatnya banyak warga yang mengadu kepada kami tentang program tersebut kami tidak mampu memberikan penjelasan. Ini semua karena program penataan tersebut tidak dimusyawahkan terlebih dahulu dengan pihak terkait terutama di tingkat kecamatan” (Wawancara April 2009).

Namun ketika dikonfirmasi hal ini kepada pejabat berwenang pada Dinas Mobilitas Penduduk Provinsi Aceh, Ir. Samsul Kamal (48) menjelaskan bahwa:

”Keterlibatan masyarakat dalam program penataan ini telah diwujudkan dalam rapat perangkat desa dengan pihak kecamatan dan dinarasikan dalam bentuk hasil rembung desa. Sehingga tidak benar kalau masyarakat tidak mengetahui program ini, termasuk camat karena pak camat pun harus hadir atau paling tidak ikut menandatangani hasil rembung desa tersebut untuk selanjutnya dikirimkan ke Bupati dengan tembusan kepada Bappeda Kabupaten dan kami di Provinsi, sesuai tatacara pengajuan atau pengusulan pembangunan kawasan transmigrasi”(Wawancara, April 2009).

Berdasarkan jawaban responden terhadap peranserta masyarakat dalam pembangunan, khususnya pembangunan penataan pemukiman di Desa Aweek dan desa Bueng, selama ini masyarakat dalam kegiatan pembangunan tidak pernah terlibat secara langsung.

Menyikapi keadaan tersebut tentang tidak optimalnya dilibatkan seluruh warga dalam program penataan dapat dipahami sebagai bentuk terbatasnya kemampuan aparatur desa dalam melakukan komunikasi dan menyampaikan informasi secara detail kepada warganya. Munculnya pendapat-pendapat tersebut akibat dari lemahnya sumber daya manusia aparatur pemerintah kecamatan dalam melakukan sosialisasi program kepada desa sekitar kondisi ini menyebabkan dalam proses pembangunan hanya digerakkan oleh beberapa orang saja dari perangkat desa yang memiliki kemampuan berkomunikasi untuk melakukan pendekatan dengan pihak-pihak terkait dalam melakukan terobosan sehingga mampu melahirkan program penataan pemukiman walaupun tidak semua warga mengetahui secara detail.

Peranserta masyarakat secara mutlak sangat diperlukan dalam penyelenggaraan pembangunan transmigrasi sehingga mendorong kelompok masyarakat untuk dapat berpartisipasi aktif terhadap program penyelenggaraan transmigrasi. Oleh karena itu, sosialisasi dan koordinasi setiap kegiatan pembangunan harus selalu melibatkan semua komponen masyarakat agar dapat mengetahui setiap program yang akan dilaksanakan dilingkungan masyarakat desa.

Gunawan. S (2007:42) Peran serta masyarakat dengan prinsip partisipatif musyawarah untuk mufakat, dan kebersamaan dalam lembaga masyarakat lokal dilakukan sesuai kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Program perencanaan



pembangunan dan penggunaan sumber daya yang kurang memperhatikan peran serta masyarakat pada akhirnya mempunyai dampak pada aspek pemerataan antar personal dalam pengambilan keputusan (top down) sehingga sering menimbulkan dampak tidak jarang terjadinya konflik kepentingan sehingga masyarakat kurang rasa memiliki terhadap hasil pembangunan yang telah dilaksanakan.

UNIVERSITAS TERBUKA

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka dalam bab ini menghasilkan beberapa simpulan dan saran sebagai berikut:

A. Simpulan

Sehubungan dengan permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini dan berdasarkan uraian pembahasan hasil penelitian, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Setelah dianalisis bahwa persepsi masyarakat terhadap program penataan pemukiman penduduk di desa Aweek dan desa Bueng adalah sebagai berikut:

Terhadap tujuan program:

- Terhadap tujuan program masyarakat setempat sangat merasakan manfaat dari hasil program penataan penduduk tersebut, namun belum mampu mendistribusikan kesejahteraan terhadap warga sekitar lokasi. Terhadap adanya persatuan dan kesatuan belum menunjukkan suatu jaminan akan adanya rasa kesatuan dan persatuan.

Terhadap kepentingan program

- Terhadap kepentingan program dalam penentuan calon warga yang dimukimkan dapat diterima dengan baik oleh warga, namun terhadap perbandingan calon transmigran lebih diutamakan masyarakat setempat. Penataan rumah belum menunjukkan adanya keserasian baik terhadap

lingkungan maupun terhadap sanitasi dan masyarakat telah mendapatkan status kepemilikan lahan usaha tani dengan sertifikat hak milik.

Terhadap proses program

- Kondisi bangunan yang dibangun dapat diterima dengan baik oleh warga desa, namun kualitas bahan bangunan, kondisi jalan penghubung, jembatan dan fasilitas umum masih kurang baik.

Terhadap efek program

- Dampak yang ditimbulkan dari program penataan pemukiman ini telah menimbulkan kecemburuan sosial antar desa, karena pihak pengambil kebijakan masih belum transparan dalam menentukan calon lokasi yang akan dibangun, namun terhadap keseimbangan calon pemukim belum menunjukkan adanya keterbukaan masyarakat untuk menerima warga dari tempat lain dalam program ini.

Terhadap peran serta masyarakat

- Persepsi masyarakat terhadap peran serta masyarakat dalam program pembangunan ini belum terlihat maksimal karena program ini bersifat proyek oriented sehingga tidak berkesinambungan. Dalam pelaksanaannya belum semua pihak dilibatkan dan program ini bersifat *top down*.
2. Hasil evaluasi terhadap persepsi masyarakat tentang penataan pemukiman penduduk di desa Aweek dan desa Bueng ditanggapi oleh responden bahwa program ini telah berjalan sesuai dengan rencana namun masih diperlukan kesinambungan program untuk menampung keperluan masyarakat yang belum tertampung seperti: bantuan bibit, pupuk, pembinaan keterampilan, bantuan modal usaha dan alat-alat kebutuhan pertanian lainnya.

3. Ditemui beberapa kendala, sehingga program pembangunan penataan pemukiman penduduk di Kecamatan Kota Jantho kurang mendapat respon dari masyarakat disebabkan karena :
 - a. Program pembangunan penataan ini lebih bersifat eksklusif, sentralistik dan berorientasi proyek bukan pemberdayaan masyarakat;
 - b. Masyarakat tidak pernah diikutsertakan secara langsung dalam setiap pengambilan keputusan baik pada saat perencanaan, pelaksanaan maupun evaluasi program sehingga terkesan kurang sosialisasi kepada warga masyarakat di sekitar lokasi program, akhirnya peran serta masyarakat tidak terlihat maksimal;
 - c. Sarana prasarana yang dibangun di lokasi desa penataan dinilai tidak bermutu sehingga sulit dimanfaatkan oleh masyarakat dalam waktu yang lama;
 - d. Tata cara penentuan calon lokasi penataan dalam proses pengambilan keputusan (*top down*) dan cenderung adanya kolusi antara pejabat dengan tokoh masyarakat desa, sehingga kurang tepat sasaran;

B. Saran

1. Pemerintah Kabupaten Aceh Besar disarankan agar melakukan kegiatan pembinaan masyarakat desa secara berkelanjutan dalam bentuk pelatihan keterampilan dan memberikan modal usaha.
2. Program pembangunan penataan pemukiman penduduk ini hendaknya dapat dilanjutkan, dan warga yang dimukimkan diseleksi dari beberapa desa

terdekat sehingga terjadi persaingan secara sehat dalam mengelola lahan usaha tani supaya adanya alih teknologi (berbagi pengalaman).

3. Pemerintah daerah diharapkan sejak awal perlu melakukan sosialisasi kepada warga masyarakat dalam menentukan program, bentuk dan proses suatu kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan, agar tepat sasaran, bermanfaat, berhasil guna dan tepat guna.
4. Masyarakat Aceh memiliki adat dan budaya dalam tindakan sehari-hari tidak terlepas dari ajaran Islam dan selalu terbuka bagi siapa saja, namun akibat konflik yang berkepanjangan menyebabkan masyarakat trauma dan curiga sehingga menyebabkan keterbukaan yang ada menjadi terganggu dan memerlukan pendekatan formal dalam beradaptasi. Hal ini sangat penting diperhatikan dalam melakukan penelitian di daerah tersebut untuk mendapatkan informasi dari masyarakat.
5. Mengingat waktu yang sangat terbatas dan menampung masukan dari berbagai pihak, untuk yang akan datang diperlukan penelitian lanjutan sebagai studi banding terhadap program yang sama dan telah dilaksanakan setelah tsunami Aceh oleh Non Government Organization (NGO) di Desa Teureubeh dan Desa Cucum di Kecamatan Kota Jantho.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku Teks

- Abidin, Said Zainal. (2006). *Kebijakan publik*. Jakarta: Suara Bebas.
- (2006). *Dinamika reformasi dan revitalisasi administrasi publik di indonesia*. Jakarta: Suara Bebas.
- Ahmad Syahriani, Effendi. (2003). *Kajian perkembangan fungsional kawasan sepanjang lintas kalimantan di kota berabai kalimantan selatan*. Thesis, Magister Perencanaan Kota dan Daerah. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada.
- Anderson, James. E. (1969). *Public policy making*. New York: Rinehart and Winston.
- Arikunto, Suharsimi. (2006). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Asdak, C. (1995). *Hidrologi dan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Azwar, S. (1998). *Sikap manusia : teori dan pengukuran*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Daldjoeni, N. (1997) *Geografi baru, organisasi keruangan dalam teori dan praktek*. Bandung: Remaja Karya.
- Dharmesta. (1992) *Metode penelitian sikap dan perilaku konsumen*. *Jurnal Kelola*, 2, 4.
- Dunn, W.N. (1998). *Pengantar analisis kebijakan publik (terjemahan)*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Dye, T.R. (1994). *Understanding public policy (terjemahan) New Jersey*. Yogyakarta: Hanin Dita Graha Widy.
- Easton, David. (1965). *A system analysis of political life*. New York: Wiley.
- Edwards, George C. (1980). *Implementing public policy*. Washington, D.C.: Congressional Quarterly Inc.
- Effendi, Alfian. (2001). *Tuntutan itu masih menyala, delapan indikasi kuat otonomi daerah terancam gagal*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.

- Hadi, Agus Purbathin. (2001). *Hubungan antara komunikasi publik perusahaan dan sikap komunitas setempat (kasus perusahaan pertambangan di Nusa tenggara barat)*. Thesis. Program Pascasarjana. Institut Pertanian Bogor.
- Harrison, David. (1988). *The sociology of modernization and development*. London: Unwin Hyman Ltd.
- Hessel Tangkilisan, N.S. (2005). *Implementasi kebijakan publik transformasi pikiran George Edwards*. Jakarta: Lukman Offset & Yayasan Pembaruan Administrasi Publik Indonesia.
- Hodwood, Briant W, dan Gunn, Lewis A. (1986). *Policy analysis for the real word*. Oxford: Oxford University Press.
- Ibrahim, Amin. (2008). *Pokok-pokok administrasi publik dan implementasinya*. Bandung: Refika Aditama.
- Idrus, Muhammad. (2007). *Metode penelitian ilmu-ilmu sosial (pendekatan kualitatif dan kuantitatif)*. Yogyakarta: UII Press.
- Irawan, Prasetya. (2007). *Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif untuk Ilmu-ilmu Sosial*. Jakarta: Departemen Ilmu Administrasi FISIP UI.
- Issac Stephen and Michael W. (1985). *Handbook in Research and Evaluation*. Edits Publisher.
- Islamy, Irfan. (2001). *Prinsip-prinsip perumusan kebijakan negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- John Ernst. (1994). *Whose Utility?: The Social Impact Of Public Utility Privatization*. Philadelphia: Open University Press.
- Jones, David. (1981). *Reading in community work*. London: George Allen and Unwin Ltd.
- Kartasasmita, Ginandjar. (1996). *Administrasi pembangunan, perkembangan pemikiran dan prakteknya di Indonesia*. Jakarta: LP3ES.
- Koentjaraningrat. (1993). *Metode-metode penelitian masyarakat*. Jakarta: Gramedia.
- Koentjaraningrat. (1990). *Pengantar ilmu antropologi*. Jakarta: Gramedia.
- Koentjaraningrat. (1997). *Kebudayaan, mentalitas dan pembangunan*. Jakarta: Gramedia.
- Leavitt, Harold J. (1978). *Psikologi manajemen*. Jakarta: Erlangga.

- Mayo, Virginia. (1994). *Community work*. in Christopher Hanvey and Terry Philpot (eds). *Practising social work*. London: Routledge.
- Mirwanto, M.(2003). *Mengenal dan memahami transmigrasi*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Muhammad, Arni. (2004). *Komunikasi Organisasi*. Bumi Aksara. Jakarta.
- Muchsin, dan Imam Koeswahyono. (2008). *Aspek kebijaksanaan hukum penatagunaan tanah dan penataan ruang*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Muchlas, Makmuri. (1994) *Perilaku Organisasi (Organizational Behavior)*. Yogyakarta: CV. Banyu Biru.
- Mugniesyah, Siti Sugiah. (2006). *Teknologi Penyuluhan Pertanian*. Bogor : Departemen Komunikasi Pengembangan Masyarakat IPB.
- Moloeng, Lexy. J. (1998). *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Nurdin, M. (1999). *Perkembangan desa-desa di sekitar PIR perkebunan (PIR-BUN), studi kasus di kabupaten pasir, thesis magister perencanaan Kota dan daerah*. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada.
- Osborne, David. (2000). *Mewirusahaakan birokrasi,(reinventing government)*. Jakarta: Pustaka Binaman Pressindo.
- Rakhmat, Jalaludin. (2005). *Psikologi komunikasi*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Riyadi, Suprpto. (2000). *Perencanaan evaluasi publik*. Malang: Universitas Negeri Malang Press.
- (2000). *Evaluasi kebijakan publik suatu pendekatan*. Madang: Universitas Negeri Malang Press.
- Santoso Amir. (1993). *Analisis kebijaksanaan publik:suatu pengantar*. Yakarta: Gramedia.
- Sarwono. (1992). *Dasar-dasar organisasi dan manajemen (revisi)*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Siagian, Sondang P. (1995). *Teori motivasi dan aplikasinya*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sharkanski, Ira. (1972) *Public Administration*. Chichago: Markham Publishing Company.
- Sobur, A. (2003). *Semiotika Komunikasi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

- Sugiyono. (2000) *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Swasono, Sri-Edi, dan Masri, Singarinbun (ed). (1985). *Sepuluh windu transmigrasi di indonesia*. Jakarta: UI-Press.
- Suparno, Erman. (2007). *Paradigma baru transmigrasi*. Jakarta: Depnakertrans RI.
- Suharto, Edi. (2005). *Membangun masyarakat memberdayakan masyarakat; kajian strategis pembangunan kesejahteraan sosial dan pekerja sosial*. Bandung: Refika Aditama.
- Tarigan, Robinson. (2006). *Perencanaan pembangunan wilayah*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Thoha, Miftah. (1983). *Kepemimpinan dalam manajemen*. Jakarta: Rajawali.
- Thoha, Miftah. (2003). *Birokrasi dan politik di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Umar, Husein. (2008). *Desain Penelitian Akuntansi Keperilakuan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Wahab, A. S. (1997). *Kebijakan publik*. Malang: FIA UNIBRAW.
- Wahab, A. S. (1999). *Reformasi pelayanan publik: kajian dari perspektif teori governance*. Pidato Pengukuhan Sebagai Guru besar dalam Ilmu Kebijakan Publik pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
- Wahab, A. S. (2001). *Analisis kebijakan: dari formulasi ke implementasi kebijakan negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Winarno, B. (2002). *Teori dan proses kebijakan publik*. Yogyakarta: Media Presindo.
- Zakaria, Palisungan. (1996). *Interaksi antara transmigran dan penduduk asli: pengaruhnya terhadap perkembangan ruang kawasan. Studi Kasus UPT SP 2 Desa Legare Jaya Kecamatan Napa Kabupaten Nabire Irian Jaya*, Thesis Magister Perencanaan Kota dan Daerah, Yogyakarta: Universitas Gajah Mada,



B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 15 Tahun 1997 Tentang *Ketransmigrasian*.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 22 Tahun 1999 Tentang *Otonomi Daerah*.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 32 Tahun 2004 Tentang *Pemerintahan Daerah*.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 26 Tahun 2007 Tentang Tata Ruang Nasional.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 2 Tahun 1999 tentang *Penyelenggaraan Transmigrasi*

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 7 Tahun 1978.

Keputusan Bupati Aceh Besar Nomor 133 Tahun 2003 *Tentang penetapan calon lokasi pembangunan pemukiman penduduk*.

UNIVERSITAS TERBUKA

DAFTAR PERTANYAAN / KUISIONER

Umur Responden :

Alamat Responden :

PETUNJUK : Pilih salah satu jawaban dibawah ini yang paling sesuai menurut anda dengan memberi tanda silang (X) pada jawabannya.

I. Identitas Responden

1. Kalau boleh diketahui, apa pendidikan tertinggi anda?
 - a. SR/SD/MIN
 - b. SMP/MTsN
 - c. SMA/MAN
 - d. Diploma
 - e. Sarjana Muda
 - f. Sarjana
2. Apa pekerjaan saudara sehari-hari?
 - a. Petani
 - b. Wiraswasta
 - c. Pedagang
 - d. Lain-lain
3. Apakah saudara sudah menetap di Kota Jantho lebih dari 5 tahun?
 - a. Ya
 - b. Tidak

II. Tujuan Program

1. Program transmigrasi/penataan pemukiman penduduk desa Aweek dan desa Bueng Kecamatan Kota Jantho, apakah telah memberikan manfaat dalam mensejahterakan penduduk setempat.
 - a. Sangat Setuju
 - b. Setuju
 - c. Ragu-ragu
 - d. Tidak Setuju
 - e. Sangat Tidak Setuju
2. Program transmigrasi/penataan pemukiman penduduk desa Aweek dan desa Bueng Kecamatan Kota Jantho, telah memberikan manfaat dalam mensejahterakan warga desa sekitar. Bagaimana pendapat saudara?
 - a. Sangat Setuju
 - b. Setuju
 - c. Ragu-ragu
 - d. Tidak Setuju
 - e. Sangat Tidak Setuju

3. Apakah program penataan pemukiman penduduk yang telah berjalan di desa Aweek dan Boeng Kecamatan Kota Jantho telah menumbuhkan rasa persatuan dan kesatuan antar warga desa setempat?
- a. Sangat Setuju b. Setuju c. Ragu-ragu
d. Tidak Setuju e. Sangat Tidak Setuju

III. Kepentingan Program

4. Apakah dengan telah dilakukan program penataan pemukiman penduduk di desa Aweek dan desa Boeng dapat terciptanya keserasian lingkungan yang asri?
- a. Sangat Setuju b. Setuju c. Ragu-ragu
d. Tidak Setuju e. Sangat Tidak Setuju
5. Bagaimana pendapat saudara tentang lahan usaha tani yang telah diprogramkan kepada warga, untuk dilakukan pengakuan hak kepemilikan lahan?
- a. Sangat Setuju b. Setuju c. Ragu-ragu
d. Tidak Setuju e. Sangat Tidak Setuju
6. Dalam penentuan/pemilihan calon pemukiman/transmigrasi yang dilakukan oleh petugas untuk ditempatkan di lokasi penataan desa di Kecamatan Kota Jantho saat penempatan selama konflik yang lalu sudah tepat. Bagaimana pendapat Saudara?
- a. Sangat Setuju b. Setuju c. Ragu-ragu
d. Tidak Setuju e. Sangat Tidak Setuju
7. Perbandingan jumlah penempatan pemukim/transmigrasi asal desa setempat dengan warga desa sekitar sebaiknya 50% : 50%. Bagaimana pendapat Saudara?
- a. Sangat Setuju b. Setuju c. Ragu-ragu
d. Tidak Setuju e. Sangat Tidak Setuju
8. Perbandingan jumlah penempatan pemukim/transmigrasi asal desa setempat dengan warga desa sekitar sebaiknya 25% : 75%. Bagaimana pendapat Saudara?
- a. Sangat Setuju b. Setuju c. Ragu-ragu
d. Tidak Setuju e. Sangat Tidak Setuju

9. Perbandingan jumlah penempatan pemukim/transmigrasi asal desa setempat dengan warga desa sekitar sebaiknya 0% : 100%. Bagaimana pendapat Saudara?
- a. Sangat Setuju
 - b. Setuju
 - c. Ragu-ragu
 - d. Tidak Setuju
 - e. Sangat Tidak Setuju

IV. Proses Program

10. Bagaimana menurut pendapat Saudara kondisi jalan penghubung/jalan poros ke lokasi desa penataan tersebut?
- a. Sangat baik
 - b. Baik
 - c. Kurang Baik
 - d. Sangat Kurang Baik
11. Bagaimana menurut pendapat Saudara kondisi jembatan/gorong-gorong yang dibangun di lokasi penataan desa tersebut?
- a. Sangat baik
 - b. Baik
 - c. Kurang Baik
 - d. Sangat Kurang Baik
12. Bagaimana menurut pendapat Saudara kondisi bangunan rumah yang telah dibangun di lokasi penataan desa tersebut?
- a. Sangat baik
 - b. Baik
 - c. Kurang Baik
 - d. Sangat Kurang Baik
13. Bagaimana menurut pendapat Saudara kondisi bangunan fasilitas umum yang telah dibangun di lokasi penataan desa tersebut?
- a. Sangat baik
 - b. Baik
 - c. Kurang Baik
 - d. Sangat Kurang Baik

V. Efek program

14. Dengan adanya program transmigrasi/penataan pemukiman penduduk yang telah berjalan di desa Aweek dan Boeng Kecamatan Kota Jantho, apakah tidak memberikan pengaruh negatif terhadap kondisi sosial masyarakat setempat dengan warga desa sekitar?
- a. Sangat Setuju
 - b. Setuju
 - c. Ragu-ragu
 - d. Tidak Setuju
 - e. Sangat Tidak Setuju

15. Apakah Saudara pernah berkunjung ke salah satu lokasi Desa Aweek atau Boeng?
- a. Selalu b. Sering c. Kadang-kadang
d. Jarang e. Tidak Pernah
16. Dalam penempatan calon transmigrasi/pemukim di lokasi penataan desa di Kecamatan Kota Jantho hendaknya warga desa asal diperbanyak di bandingkan warga desa lain. Bagaimana pendapat Saudara?
- a. Sangat Setuju b. Setuju c. Ragu-ragu
d. Tidak Setuju e. Sangat Tidak Setuju
17. Dalam penempatan calon transmigrasi/pemukim di lokasi penataan desa tersebut hendaknya warga desa asal harus imbang jumlahnya dengan warga desa sekitar. Bagaimana pendapat Saudara?
- a. Sangat Setuju b. Setuju c. Ragu-ragu
d. Tidak Setuju e. Sangat Tidak Setuju
18. Apakah telah terjadi transformasi SDM dan alih teknologi dalam proses penataan pemukiman di desa Aweek dan desa Bueng? Bagaimana pendapat Saudara?
- a. Sangat Setuju b. Setuju c. Ragu-ragu
d. Tidak Setuju e. Sangat Tidak Setuju

VI. Peran Serta Masyarakat

19. Setelah melihat manfaat dari program penataan pemukiman penduduk yang telah dilaksanakan di Kecamatan Kota Jantho selama ini, maka program penataan pemukiman tersebut masih diperlukan untuk diselenggarakan. Bagaimana pendapat Saudara?
- a. Sangat Setuju b. Setuju c. Ragu-ragu
d. Tidak Setuju e. Sangat Tidak Setuju

Berikan alasan Saudara: _____



20. Sebelum dimulainya pembangunan lokasi penataan/transmigrasi oleh Pemerintah di Kota Jantho, hendaknya dilakukan musyawarah terlebih dahulu dengan tokoh masyarakat setempat tentang rencana tersebut.

- a. Sangat Setuju b. Setuju c. Ragu-ragu
d. Tidak Setuju e. Sangat Tidak Setuju

21. Menurut Saudara, apakah perlu dilakukan musyawarah dengan warga sekitar dan tokoh masyarakat?

- a. Sangat Setuju b. Setuju c. Ragu-ragu
d. Tidak Setuju e. Sangat Tidak Setuju

22. Kalau jawaban Saudara Perlu atau Tidak Perlu, berikan alasan Saudara.

Terima kasih atas bantuan Saudara yang telah ikut memberikan jawabannya, semoga jawaban Saudara dapat memberikan nilai tambah dan mendapat balasan kebajikan dari Allah SWT. Amiiin.....

Lampiran 2. Tabulasi Hasil Uji Coba Instrumen Penelitian Tahun 2009

No.	Uraian	Score					Total (%)
		Sangat Setuju	Setuju	Ragu-ragu	Tidak Setuju	Sangat Tidak Setuju	
Tujuan Program (X1)							
1.	Manfaat program dalam mensejahterakan penduduk setempat (X1 ₁)	7 58,33%	2 16,67%	2 16,67%	-	1 8,33%	12 (100)
2.	Manfaat program dalam mensejahterakan penduduk sekitar (X1 ₂)	1 8,33%	-	2 16,67%	8 66,67%	1 8,33%	12 (100)
3.	Program telah menumbuhkan rasa persatuan dan kesatuan antar warga desa setempat (X1 ₃)	1 8,33%	2 16,67%	8 66,67%	-	1 8,33%	12 (100)
Kepentingan Program (X2)							
4.	Terciptanya keserasian lingkungan (X2 ₁)	2 16,67%	1 8,33%	3 25,00%	4 33,33%	2 16,67%	12 (100)
5.	Kepemilikan lahan (X2 ₂)	7 58,33%	-	3 25,00%	2 16,67%	-	12 (100)
6.	Pendapat tentang penentuan calon transmigran (X2 ₃)	1 8,33%	7 58,33%	2 16,67%	1 8,33%	1 8,33%	12 (100)
7.	Perbandingan penempatan 50% : 50 % (X2 ₄)	2 16,67%	4 33,33%	4 33,33%	2 16,67%	-	12 (100)
8.	Perbandingan penempatan 25% : 75 % (X2 ₅)	2 16,67%	1 8,33%	3 25,00%	3 25,00%	3 25,00%	12 (100)
9.	Perbandingan penempatan 0% : 100 % (X2 ₆)	-	4 33,33%	3 25,00%	2 16,67%	3 25,00%	12 (100)

Sumber: Data Primer Diolah Tahun 2009

Tabulasi Hasil Uji Coba Instrumen Penelitian Tahun 2009

No.	Uraian	Score				Total (%)
		Sangat Baik	Baik	Kurang Baik	Sangat Kurang Baik	
10.	Proses Program (X3) Kondisi jalan penghubung (X3 ₁)	-	-	9 75,00%	3 25,00%	12 (100)
11.	Kondisi jembatan/gorong-gorong (X3 ₂)	-	5 41,67%	3 25,00%	4 33,33%	12 (100)
12.	Kondisi bangunan rumah yang telah dibangun (X3 ₃)	6 50,00%	5 41,67%	2 16,67%	1 8,33%	12 (100)
13.	Kondisi fasilitas umum (X3 ₄)	-	7 58,33%	5 41,67%	-	12 (100)

Sumber: Data Primer Diolah Tahun 2009

UNIVERSITAS TERBUKA

Tabulasi Hasil Uji Coba Instrumen Penelitian Tahun 2009

No.	Uraian	Score					Total (%)
		Sangat Setuju	Setuju	Ragu-ragu	Tidak Setuju	Sangat Tidak Setuju	
14	Efek Program (X4) Program berdampak negatif terhadap sosial masyarakat setempat (X4 ₁)	8 66,67%	-	2 16,67%	2 16,67%	-	12 100%
15	Apakah responden pernah berkunjung kelokasi (X4 ₂)	1 8,33%	10 83,34%	1 8,33%	-	-	12 100%
16	Pendapat tentang penempatan calon (X4 ₃)	2 16,67%	6 50,00%	3 25,00%	-	1 8,33%	12 100%
17	Keseimbangan calon (X4 ₄)	1 8,33%	3 25,00%	6 50,00%	1 8,33%	1 8,33%	12 100%
18	Apakah telah terjadi transformasi SDM (X4 ₅)		-	3 25,00%	8 66,67%	1 8,33%	12 100%
	Peran Serta Masyarakat (X5)						
19	Apakah masih diperlukan kesinambungan program (X5 ₁)	1 8,33%	2 16,67%	7 58,34%	1 8,33%	1 8,33%	12 100%
20	Apakah perlu musyawarah sebelum program dilaksanakan (X5 ₂)	5 41,67%	3 25,00%	4 33,33%	-	-	12 100%
21	Apakah perlu musyawarah dengan warga sekitar dan tokoh masyarakat (X5 ₃)	6 50,00%	2 16,67%	4 33,33%	-	-	12 100%

Sumber: Data Primer Diolah Tahun 2009



Lampiran 3. Print Out Validitas dan Realibilitas Hasil Uji Coba Instrumen Penelitian

Correlations

Correlations

		X11	X12	X13	X1
X11	Pearson Correlation	1	.024	.663	.777
	Sig. (1-tailed)	.	.470	.009	.001
	N	12	12	12	12
X12	Pearson Correlation	.024	1	.525	.613
	Sig. (1-tailed)	.470	.	.040	.017
	N	12	12	12	12
X13	Pearson Correlation	.663	.525	1	.932
	Sig. (1-tailed)	.009	.040	.	.000
	N	12	12	12	12
X1	Pearson Correlation	.777	.613	.932	1
	Sig. (1-tailed)	.001	.017	.000	.
	N	12	12	12	12

Reliability

***** Method 1 (space saver) will be used for this analysis *****

RELIABILITY ANALYSIS - SCALE (ALPHA)

- 1. X11
- 2. X12
- 3. X13

Item-total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Alpha if Item Deleted
X11	5.5000	2.8182	.3846	.6882
X12	7.3333	4.0606	.2596	.7761
X13	6.5000	2.6364	.8362	.0460

Reliability Coefficients

N of Cases = 12.0

N of Items = 3

Alpha = .6450



Correlations

Correlations

		X21	X22	X23	X24	X25	X26	X2
X21	Pearson Correlation	1	.210	.462	.503	-.187	.490	.668
	Sig. (1-tailed)	.	.257	.065	.048	.281	.053	.009
	N	12	12	12	12	12	12	12
X22	Pearson Correlation	.210	1	-.196	.569	.198	.520	.640
	Sig. (1-tailed)	.257	.	.271	.027	.269	.042	.012
	N	12	12	12	12	12	12	12
X23	Pearson Correlation	.462	-.196	1	.251	-.233	.136	.348
	Sig. (1-tailed)	.065	.271	.	.216	.233	.337	.134
	N	12	12	12	12	12	12	12
X24	Pearson Correlation	.503	.569	.251	1	.317	.665	.891
	Sig. (1-tailed)	.048	.027	.216	.	.158	.009	.000
	N	12	12	12	12	12	12	12
X25	Pearson Correlation	-.187	.198	-.233	.317	1	.034	.347
	Sig. (1-tailed)	.281	.269	.233	.158	.	.458	.135
	N	12	12	12	12	12	12	12
X26	Pearson Correlation	.490	.520	.136	.665	.034	1	.771
	Sig. (1-tailed)	.053	.042	.337	.009	.458	.	.002
	N	12	12	12	12	12	12	12
X2	Pearson Correlation	.668	.640	.348	.891	.347	.771	1
	Sig. (1-tailed)	.009	.012	.134	.000	.135	.002	.
	N	12	12	12	12	12	12	12

Reliability

***** Method 1 (space saver) will be used for this analysis *****

```

RELIABILITY ANALYSIS - SCALE (ALPHA)
1. X21
2. X22
3. X23
4. X24
5. X25
6. X26
  
```



Item-total Statistics

	Scale	Scale	Corrected	
	Mean	Variance	Item-	Alpha
	if Item	if Item	Total	if Item
	Deleted	Deleted	Correlation	Deleted
X21	16.3333	13.5152	.4374	.5661
X22	15.0833	14.0833	.4166	.5756
X23	15.5833	17.5379	.1098	.6760
X24	15.5833	12.8106	.8255	.4465
X25	16.4167	17.3561	.0253	.7333
X26	16.4167	12.8106	.6122	.4967

Reliability Coefficients

N of Cases = 12.0 N of Items = 6
Alpha = .6380

UNIVERSITAS TERBUKA

Correlations

Correlations

		X31	X32	X33	X34	X3
X31	Pearson Correlation	1	.655	.679	.683	.826
	Sig. (1-tailed)	.	.010	.008	.007	.000
	N	12	12	12	12	12
X32	Pearson Correlation	.655	1	.593	.703	.908
	Sig. (1-tailed)	.010	.	.021	.005	.000
	N	12	12	12	12	12
X33	Pearson Correlation	.679	.593	1	.530	.794
	Sig. (1-tailed)	.008	.021	.	.038	.001
	N	12	12	12	12	12
X34	Pearson Correlation	.683	.703	.530	1	.863
	Sig. (1-tailed)	.007	.005	.038	.	.000
	N	12	12	12	12	12
X3	Pearson Correlation	.826	.908	.794	.863	1
	Sig. (1-tailed)	.000	.000	.001	.000	.
	N	12	12	12	12	12

Reliability

***** Method 1 (space saver) will be used for this analysis *****

—

RELIABILITY ANALYSIS - SCALE (ALPHA)

1. X31
2. X32
3. X33
4. X34



Item-total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item- Total Correlation	Alpha if Item Deleted
X31	10.0000	8.1818	.7730	.8111
X32	9.2500	4.2045	.7541	.7676
X33	7.4167	6.6288	.6497	.7817
X34	8.5833	5.7197	.7320	.7391

Reliability Coefficients

N of Cases = 12.0 N of Items = 4
Alpha = .8247

UNIVERSITAS TERBUKA



Correlations

Correlations

		X41	X42	X43	X44	X45	X4
X41	Pearson Correlation	1	.505	.713	.325	.580	.813
	Sig. (1-tailed)	.	.047	.005	.151	.024	.001
	N	12	12	12	12	12	12
X42	Pearson Correlation	.505	1	.596	.414	.739	.713
	Sig. (1-tailed)	.047	.	.020	.090	.003	.005
	N	12	12	12	12	12	12
X43	Pearson Correlation	.713	.596	1	.713	.685	.936
	Sig. (1-tailed)	.005	.020	.	.005	.007	.000
	N	12	12	12	12	12	12
X44	Pearson Correlation	.325	.414	.713	1	.561	.754
	Sig. (1-tailed)	.151	.090	.005	.	.029	.002
	N	12	12	12	12	12	12
X45	Pearson Correlation	.580	.739	.685	.561	1	.819
	Sig. (1-tailed)	.024	.003	.007	.029	.	.001
	N	12	12	12	12	12	12
X4	Pearson Correlation	.813	.713	.936	.754	.819	1
	Sig. (1-tailed)	.001	.005	.000	.002	.001	.
	N	12	12	12	12	12	12

Reliability

***** Method 1 (space saver) will be used for this analysis *****

—

R E L I A B I L I T Y A N A L Y S I S - S C A L E (A L P H A)

1. X41
2. X42
3. X43
4. X44
5. X45



Item-total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item- Total Correlation	Alpha if Item Deleted
X41	13.0000	7.0909	.6196	.8205
X42	13.1667	10.8788	.6464	.8245
X43	13.5000	6.8182	.8760	.7111
X44	14.0000	8.3636	.5799	.8116
X45	15.0000	9.8182	.7538	.7901

Reliability Coefficients

N of Cases = 12.0

N of Items = 5

Alpha = .8294

UNIVERSITAS TERBUKA



Correlations

Correlations

		X51	X52	X53	X5
X51	Pearson Correlation	1	.498	.568	.842
	Sig. (1-tailed)	.	.050	.027	.000
	N	12	12	12	12
X52	Pearson Correlation	.498	1	.521	.803
	Sig. (1-tailed)	.050	.	.041	.001
	N	12	12	12	12
X53	Pearson Correlation	.568	.521	1	.840
	Sig. (1-tailed)	.027	.041	.	.000
	N	12	12	12	12
X5	Pearson Correlation	.842	.803	.840	1
	Sig. (1-tailed)	.000	.001	.000	.
	N	12	12	12	12

Reliability

***** Method 1 (space saver) will be used for this analysis *****

—

RELIABILITY ANALYSIS - SCALE (ALPHA)

1. X51
2. X52
3. X53

Item-total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Alpha if Item Deleted
X51	8.2500	2.5682	.6121	.6844
X52	7.2500	2.9318	.5750	.7235
X53	7.1667	2.6970	.6299	.6629

Reliability Coefficients

N of Cases = 12.0 N of Items = 3
 Alpha = .7706

Lampiran 4. Tabulasi Hasil Penelitian Tahun 2009

No.	Uraian	Score					Total (%)
		Sangat Setuju	Setuju	Ragu-ragu	Tidak Setuju	Sangat Tidak Setuju	
Tujuan Program (X1)							
1.	Manfaat program dalam mensejahterakan penduduk setempat (X1 ₁)	20 44,44%	13 28,89%	6 13,33%	3 6,67%	3 6,67%	45 (100)
2.	Manfaat program dalam mensejahterakan penduduk sekitar (X1 ₂)	6 13,33%	5 11,11%	8 17,79%	20 44,44%	6 13,33%	45 (100)
3.	Program telah menumbuhkan rasa persatuan dan kesatuan antar warga desa setempat (X1 ₃)	10 22,22%	8 17,79%	21 46,67%	4 8,89%	2 4,44%	45 (100)
Kepentingan Program (X2)							
4.	Terciptanya keserasian lingkungan (X2 ₁)	2 4,44%	10 22,22%	8 17,79%	20 44,44%	5 11,11%	45 (100)
5.	Kepemilikan lahan (X2 ₂)	27 60,00%	9 20,00%	7 15,56%	2 4,44%	-	45 (100)
6.	Pendapat tentang penentuan calon transmigran (X2 ₃)	5 11,111%	19 42,23%	15 33,33%	4 8,89%	2 4,44%	45 (100)
7.	Perbandingan penempatan 50% : 50 % (X2 ₄)	5 11,11%	20 44,44%	15 33,33%	3 6,67%	2 4,44%	45 (100)
8.	Perbandingan penempatan 25% : 75 % (X2 ₅)	8 17,78%	7 15,56%	13 28,89%	5 11,11%	12 26,66%	45 (100)
9.	Perbandingan penempatan 0% : 100 % (X2 ₆)	-	14 31,11%	9 20,00%	9 20,00%	13 28,89%	45 (100)

Sumber: Data Primer Diolah Tahun 2009

Tabulasi Hasil Penelitian Tahun 2009

No.	Uraian	Score				Total (%)
		Sangat Baik	Baik	Kurang Baik	Sangat Kurang Baik	
10.	Proses Program (X3) Kondisi jalan penghubung (X31)	-	-	27 60,00%	18 40,00%	45 (100)
11.	Kondisi jembatan/gorong-gorong (X32)	-	9 20,00%	14 31,11%	22 48,89%	45 (100)
12.	Kondisi bangunan rumah yang telah dibangun (X33)	20 44,44%	16 35,56%	7 15,56%	2 4,44%	45 (100)
13.	Kondisi fasilitas umum (X34)	-	13 28,89%	32 71,11%	-	45 (100)

Sumber: Data Primer Diolah Tahun 2009

UNIVERSITAS TERBUKA

Tabulasi Hasil Penelitian Tahun 2009

No.	Uraian	Score					Total (%)
		Sangat Setuju	Setuju	Ragu-ragu	Tidak Setuju	Sangat Tidak Setuju	
14	Efek Program (X4) Program berdampak negatif terhadap sosial masyarakat setempat (X4 ₁)	23 51,11%	4 8,89%	11 24,45%	5 11,11%	2 4,44%	45 100%
15	Apakah responden pernah berkunjung kelokasi (X4 ₂)	4 8,89%	35 77,78%	6 13,33%	-	-	45 100%
16	Pendapat tentang penempatan calon (X4 ₃)	9 20,00%	20 44,44%	9 20,00%	5 11,11%	2 4,44%	45 100%
17	Keseimbangan calon (X4 ₄)	11 24,44%	4 8,89%	21 46,67%	5 11,11%	4 8,89%	45 100%
18	Apakah telah terjadi transformasi SDM (X4 ₅)		4 8,89%	11 24,45%	27 60,00%	3 6,67%	45 100%
	Peran Serta Masyarakat (X5)						
19	Apakah masih diperlukan kesinambungan program (X5 ₁)	5 11,11%	13 28,89%	23 51,11%	2 4,44%	2 4,44%	45 100%
20	Apakah perlu musyawarah sebelum program dilaksanakan (X5 ₂)	23 51,11%	11 24,45%	9 20,00%	2 4,44%	-	45 100%
21	Apakah perlu musyawarah dengan warga sekitar dan tokoh masyarakat (X5 ₃)	20 44,44%	9 20,00%	14 31,12%	2 4,44%	-	45 100%

Sumber: Data Primer Diolah Tahun 2009



Lampiran 5. Print out Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Tujuan Program

Correlations

		X11	X12	X13	X1
X11	Pearson Correlation	1	,176	,511	,727
	Sig. (1-tailed)	.	,124	,000	,000
	N	45	45	45	45
X12	Pearson Correlation	,176	1	,520	,739
	Sig. (1-tailed)	,124	.	,000	,000
	N	45	45	45	45
X13	Pearson Correlation	,511	,520	1	,859
	Sig. (1-tailed)	,000	,000	.	,000
	N	45	45	45	45
X1	Pearson Correlation	,727	,739	,859	1
	Sig. (1-tailed)	,000	,000	,000	.
	N	45	45	45	45

Reliability

***** Method 1 (space saver) will be used for this analysis *****

—

RELIABILITY ANALYSIS - SCALE (ALPHA)

Reliability Coefficients

N of Cases = 45,0

N of Items = 3

Alpha = ,6572



Print Out Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Kepentingan Program

Correlations

		X21	X22	X23	X24	X25	X26	X2
X21	Pearson Correlation	1	,062	,225	,247	,244	,334	,598
	Sig. (1-tailed)	.	,344	,068	,051	,053	,012	,000
	N	45	45	45	45	45	45	45
X22	Pearson Correlation	,062	1	-,038	,419	,141	,174	,444
	Sig. (1-tailed)	,344	.	,402	,002	,177	,126	,001
	N	45	45	45	45	45	45	45
X23	Pearson Correlation	,225	-,038	1	,355	,095	,054	,436
	Sig. (1-tailed)	,068	,402	.	,008	,268	,362	,001
	N	45	45	45	45	45	45	45
X24	Pearson Correlation	,247	,419	,355	1	,419	,430	,778
	Sig. (1-tailed)	,051	,002	,008	.	,002	,002	,000
	N	45	45	45	45	45	45	45
X25	Pearson Correlation	,244	,141	,095	,419	1	,223	,658
	Sig. (1-tailed)	,053	,177	,268	,002	.	,070	,000
	N	45	45	45	45	45	45	45
X26	Pearson Correlation	,334	,174	,054	,430	,223	1	,640
	Sig. (1-tailed)	,012	,126	,362	,002	,070	.	,000
	N	45	45	45	45	45	45	45
X2	Pearson Correlation	,598	,444	,436	,778	,658	,640	1
	Sig. (1-tailed)	,000	,001	,001	,000	,000	,000	.
	N	45	45	45	45	45	45	45

Reliability

***** Method 1 (space saver) will be used for this analysis *****

—

RELIABILITY ANALYSIS - SCALE (ALPHA)

Reliability Coefficients

N of Cases = 45,0

N of Items = 6

Alpha = ,6278



Print Out Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Proses Program

Correlations

		X31	X32	X33	X34	X3
X31	Pearson Correlation	1	,377	,449	,220	,558
	Sig. (1-tailed)	.	,005	,001	,073	,000
	N	45	45	45	45	45
X32	Pearson Correlation	,377	1	,470	,786	,874
	Sig. (1-tailed)	,005	.	,001	,000	,000
	N	45	45	45	45	45
X33	Pearson Correlation	,449	,470	1	,445	,796
	Sig. (1-tailed)	,001	,001	.	,001	,000
	N	45	45	45	45	45
X34	Pearson Correlation	,220	,786	,445	1	,822
	Sig. (1-tailed)	,073	,000	,001	.	,000
	N	45	45	45	45	45
X3	Pearson Correlation	,558	,874	,796	,822	1
	Sig. (1-tailed)	,000	,000	,000	,000	.
	N	45	45	45	45	45

Reliability

***** Method 1 (space saver) will be used for this analysis *****

—

RELIABILITY ANALYSIS - SCALE (ALPHA)

Reliability Coefficients

N of Cases = 45,0

N of Items = 4

Alpha = ,7643



Print Out Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Efek Program

Correlations

		X41	X42	X43	X44	X45	X4
X41	Pearson Correlation	1	,256	,693	,617	,178	,839
	Sig. (1-tailed)	.	,045	,000	,000	,121	,000
	N	45	45	45	45	45	45
X42	Pearson Correlation	,256	1	,461	,298	,239	,510
	Sig. (1-tailed)	,045	.	,001	,023	,057	,000
	N	45	45	45	45	45	45
X43	Pearson Correlation	,693	,461	1	,639	,334	,889
	Sig. (1-tailed)	,000	,001	.	,000	,012	,000
	N	45	45	45	45	45	45
X44	Pearson Correlation	,617	,298	,639	1	,160	,819
	Sig. (1-tailed)	,000	,023	,000	.	,147	,000
	N	45	45	45	45	45	45
X45	Pearson Correlation	,178	,239	,334	,160	1	,455
	Sig. (1-tailed)	,121	,057	,012	,147	.	,001
	N	45	45	45	45	45	45
X4	Pearson Correlation	,839	,510	,889	,819	,455	1
	Sig. (1-tailed)	,000	,000	,000	,000	,001	.
	N	45	45	45	45	45	45

Reliability

***** Method 1 (space saver) will be used for this analysis *****

—

RELIABILITY ANALYSIS - SCALE (ALPHA)

Reliability Coefficients

N of Cases = 45,0

N of Items = 5

Alpha = ,7643



Print Out Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Peran Serta Masyarakat

Correlations

		X51	X52	X53	X5
X51	Pearson Correlation	1	,544	,287	,780
	Sig. (1-tailed)	.	,000	,028	,000
	N	45	45	45	45
X52	Pearson Correlation	,544	1	,366	,818
	Sig. (1-tailed)	,000	.	,007	,000
	N	45	45	45	45
X53	Pearson Correlation	,287	,366	1	,725
	Sig. (1-tailed)	,028	,007	.	,000
	N	45	45	45	45
X5	Pearson Correlation	,780	,818	,725	1
	Sig. (1-tailed)	,000	,000	,000	.
	N	45	45	45	45

Reliability

***** Method 1 (space saver) will be used for this analysis *****

—

RELIABILITY ANALYSIS - SCALE (ALPHA)

Reliability Coefficients

N of Cases = 45,0

N of Items = 3

Alpha = ,6628

LAMPIRAN TABULASI HASIL WAWANCARA TAHUN 2009

NO.	INFORMAN/RESPONDEN	PENDAPAT
1.	Drs. Sulaiman Hasan (50) PNS Jantho Makmur	<p>Sebelum penataan rumah yang ada di desa Aweek dan desa Bueng sebelumnya berjauhan dan apa bila terjadi sesuatu kejadian susah dihubungi apa lagi dimalam hari. Setelah ada penataan penduduk sudah memiliki rumah yang layak huni dan pemerintah membantu pengadaan pupuk, bibit tanaman dan bantuan lainnya. Kami mengharapkan bantuan serupa juga dapat diberikan kepada warga desa sekitar yang kondisinya juga kurang lebih dari seperti desa Aweek dan desa Bueng. Kami juga mengharapkan pemerintah dapat membantu membangun sarana dan prasarana seperti jalan dan jembatan serta sekolah untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia di daerah kami.</p>
2.	Idawati Hamid (30) Wanita	<p>Menurut kami pembangunan penataan ini telah mampu membantu masyarakat dengan rumah yang layak sebagai tempat tinggal namun serasa sangat sempit dan terbuat dari papan. Sementara di tempat lain saat ini bantuan rumah diberikan/dibangun oleh pemerintah terbuat secara permanen, hal ini telah membuat sebagian dari kami kaum perempuan cemburu dan tidak adil. Menurut pendapat kami walaupun pemerintah telah membangun rumah tapi masyarakat belum dikatakan sejahtera karena pada saat ini dibangun, kami hanya menerima saja dan kami melihat masyarakat masih trauma dengan konflik, jadi kondisi tersebut membuat masyarakat terpuruk dalam segala bidang. keadaan ini yang sangat merasakan adalah kami sebagai kaum perempuan yang selalu bergelut dengan situasi dan kondisi di desa, dalam kesempatan ini kami mohon kepada pemerintah lebih memberikan perhatian kepada kaum perempuan yang berada di daerah konflik untuk membantu meningkatkan keterampilan dan pengetahuan agar dapat meningkatkan taraf hidup sehingga kami dapat menyekolahkan anak-anak ke jenjang yang lebih tinggi dan kami mohon pemerintah agar dapat membangun 1 unit taman kanak-kanak di daerah kami.</p>

NO.	INFORMAN/RESPONDEN	PENDAPAT
3.	Muhammad Usman (50) Imum Mukim (tokoh Masyarakat)	<p>Kami melihat pemerintah Provinsi memberikan bantuan perumahan jadup dan bantuan lainnya hanya untuk desa Aweek dan desa Bueng sedangkan desa lain yang berdekatan dengan desa tersebut tidak tersentuh dengan bantuan apa pun, padahal mereka termasuk kelompok miskin/dhuafa. Dan program ini telah membuat kecemburuan sosial apa lagi truk-truk yang lewat mengangkut bahan material menghasilkan debu karena kondisi jalan menuju lokasi kondisinya sangat tidak bagus. Untuk masa yang akan datang kami mohon desa sekitar juga mendapatkan bantuan dari pemerintah sehingga secara bertahap diharapkan desa-desa yang terisolir serta pasca konflik dapat meningkatkan taraf hidup dengan bantuan pemerintah melalui pembinaan dan pelatihan keterampilan yang selama ini diberikan kepada desa Aweek dan desa Bueng. Kami juga mengharapkan bantuan untuk pendidikan untuk anak usia dini (PAUD) karena di sekitar desa kami banyak anak-anak balita dan usia sekolah yang perlu mendapatkan perhatian dalam bidang pendidikan disamping itu kami juga mengharapkan bantuan pemerintah untuk memperbaiki kondisi jalan dan jembatan agar dibangun secara permanen untuk menuju ke daerah sentra produksi pertanian dan perkebunan agar memudahkan kami mengangkut hasil komoditi pertanian dan perkebunan.</p>
4	Drs. Idris Harun (54) Wiraswasta	<p>Komentar yang hampir bersamaan juga meminta agar desa sekitar diperhatikan sehingga tidak menimbulkan kesenjangan dan kecemburuan. Hal ini juga mengingatkan warga yang diikutsertakan dalam penataan pemukiman tersebut harus direkrut terlebih dahulu dari desa sekitar lokasi dan diutamakan desa yang bersangkutan terlebih dahulu. Dampak positif dalam pembangunan ini adalah adanya kegiatan warga untuk bekerja sebagai pekerja tenaga harian lepas/buruh sehingga dapat menambah penghasilan mereka untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Untuk yang akan datang kami mohon kepada pemerintah untuk lebih fokus terhadap pembangunan masyarakat desa apa lagi daerah-daerah yang dilanda</p>

NO.	INFORMAN/RESPONDEN	PENDAPAT
		konflik dimana kehidupan warga sangat terpuruk.
5	Ma'un (27) Swasta	Dengan adanya program ini kami sangat beruntung karena kami dapat bekerja sebagai buruh dan kami mohon supaya program ini dapat dilanjutkan agar kami selalu ada kerja selanjutnya kami mohon pemerintah membantu memberikan modal usaha untuk membantu kami warga miskin.
6	Tgk. H. Syafi'I (65) Pemuka Agama Kota Jantho	Kami sedikit kecewa karena pemerintah kurang melakukan sosialisasi kepada desa sekitar sehingga terkesan ada pilih kasih pada hal desa sekitar juga membutuhkan bantuan yang sama sehingga banyak warga desa sekitar mengadu hal ini kepada saya dan saya katakan akan dilakukan pembangunan secara bertahap mengingat keterbatasan anggaran/dana dari pemerintah. Kami harapkan untuk masa yang akan datang perlu dilakukan sosialisasi dan pemerintah benar-benar memperhatikan desa-desa yang terisolir dan dilanda konflik untuk diperhatikan dan dibantu dalam rangka memperkokoh kesatuan dan persatuan di kalangan masyarakat serta mempercepat proses pemerataan pembangunan. Disamping itu juga kami menghimbau agar masyarakat dapat dibantu pengurusan sertifikat hak kepemilikan lahan usaha tani melalui Program Nasional (PRONA) dari Badan Pertanahan Nasional (BPN).
7	Drs. Ismail Tahir (56) PNS	Mengatakan bahwa kesan dari penataan ini belum menunjukkan penataan yang baik dan asri, karena letaknya yang kurang tepat dan tidak memenuhi aturan penataan pemukiman yang baik, kondisi ini mungkin dikarenakan ingin supaya dapat rumah dan bisa berdekatan dengan saudara-saudara yang lain agar memudahkan bila terjadi sesuatu dikarenakan saat rumah ini dibangun warga masih dalam suasana konflik bila kondisinya berjauhan sulit dihubungi apa bila terjadi sesuatu yang tidak diinginkan.
8	Ir. Fakhruddin (52) KABID PSDK	Menjelaskan bahwa tidak terciptanya keserasian tata letak disebabkan karena lahan yang tersedia tidak mencukupi dan hasil musyawarah dengan perangkat desa dan warga

NO.	INFORMAN/RESPONDEN	PENDAPAT
		desa mereka mendesak agar dapat dibangun rumah dan segera diselesaikan pada tahun anggaran itu juga. Dan program ini bukan merupakan program transmigrasi murni ini adalah merupakan program transmigrasi lokal dan dilaksanakan dalam keadaan konflik sehingga disana-sini dirasakan masih banyak kekurangan yang harus disempurnakan dimasa yang akan datang
9	Tgk. H. Ridwan (55) Tokoh Masyarakat	Menurut beliau mengatakan bahwa kondisi bangunan gorong-gorong yang dibangun saat itu hanya bertahan 8 bulan yang pada saat itu dibangun dalam keadaan darurat untuk mengatasi lalu lalangnya lintasan truk untuk melintasi ke desa pembangunan penataan mungkin kualitasnya kurang bagus. Kami mengharapkan untuk yang akan datang dapat dibangun secara permanen dan dilakukan pemerataan pembangunan untuk desa sekitar.
10	Tgk. Rusli Umar (45) Tokoh Agama	Menurut beliau mengatakan bahwa rumah yang dibangun oleh dinas Mobduk Provinsi NAD sudah memadai dan layak huni karena memang sebelumnya masyarakat disana belum memiliki rumah yang layak, dengan adanya bantuan tersebut diharapkan masyarakat bersyukur serta merawat dengan baik agar bisa dipergunakan dalam waktu yang lama. Untuk yang akan datang kami mohon pemerintah lebih memperhatikan daerah-daerah yang terisolir dalam pembangunan masyarakat desa melalui instansi lintas sektoral. Dan lebih adil seta memperhatikan skala prioritas.
11	Ibu Rukiyah (43) Ibu Rumah Tangga	Menjelaskan bahwa rumah yang diberikan kepada kami kurang bagus, papan tipis dan papan kurang bagus kemudian bangunannya pun kurang kokoh takut kami kalau angin kencang roboh. Kami mohon pemerintah untuk yang akan datang agar kami dibuat rumah yang permanen agar dapat bertahan lama seperti yang diberikan kepada masyarakat desa Teureubeh dan Cucum melalui bantuan IOM kami juga mengharapkan agar adanya pembinaan yang kontinu sehingga kami bisa diberikan keterampilan kerajinan ukiran kayu karena daerah kami mudah mendapatkan kayu dan bila diolah akan memberi dampak nilai

NO.	INFORMAN/RESPONDEN	PENDAPAT
		tambah.
12	Abdullah Daud (45) Pemuda	Kualitas bangunannya sudah lumayan dibandingkan dengan rumah yang lama, hanya saja penataannya yang tidak asri dan rapi dan juga tertata dengan baik dan kami juga mengharapkan pemerintah untuk yang akan datang dapat membantu desa sekitar.
13	Ir. T. Bahagia (47) Kabid Program Mobduk	Sebenarnya program penataan desa Aweek dan desa Bueng sudah di bahas secara matang mulai dari awal hingga saat pembangunan namun mengingat masa itu konflik, sehingga ada beberapa kebijakan yang bergeser dari porosnya, namun secara umum program ini telah selesai dengan baik dan kami minta agar masyarakat menjaga dan merawat rumah tersebut agar dapat bertahan lama. Pembinaan lanjutan terhadap desa Aweek dan desa Bueng telah diserahkan kepada pemerintah Kabupaten Aceh Besar untuk dilakukan pembinaan secara kontinu karena program tersebut bukan program transmigrasi murni.
14	Amiruddin Ismail (56) Imam Desa Bueng	Saya selaku Imam sangat berterima kasih kepada pemerintah yang telah membangun tempat peribadatan di tempat kami mudah-mudahan untuk yang akan datang dapat dibantu lagi dan dapat terus dilakukan pembinaan, kami juga mohon agar dapat dibantu perlengkapan shalat dan kitab-kitab dan buku-buku agama.
15	Nurdin (58) Pensiunan PNS	Saya melihat bahwa setelah program ini dilakukan telah terjadi kecemburuan sosial dengan masyarakat sekitar, dan untuk yang akan datang agar program ini dapat dilanjutkan untuk membantu warga sekitar melalui program yang serupa namun di fokuskan untuk bantuan perumahan dan pendidikan serta pelatihan keterampilan dengan disediakan modal usaha agar mempercepat proses peningkatan ekonomi kerakyatan.
16	Drs. Bustami (54) PNS	Rumah yang dibangun di lokasi tersebut tidak mencerminkan penataan yang baik, banyak rumah yang dibangun di sudut-sudut rumah yang telah ada dan terkesan kumuh, keadaan ini membuat situasi pemukiman yang tidak sehat dan terkesan asal jadi yang berorientasi pada proyek semata dan untuk yang akan datang agar konsep perencanaan lebih baik.

NO.	INFORMAN/RESPONDEN	PENDAPAT
17	Ridwan Usman, SH (53) PNS	Rumah warga yang ditata tidak memenuhi rumah yang sehat, kami berharap agar kedepan dinas Mobduk berpedoman kepada aturan penataan rumah sesuai dengan aturan dari dinas Kimpraswil, jangan asal buat dan terkesan berorientasi untuk menyelesaikan pekerjaan proyek, tidak mengikuti kaidah-kaidah yang berlaku dalam penataan ruang dan pemanfaatan ruang.
18	Ir. Ismail (35) Swasta	Mengatakan bahwa penataan rumah yang dibangun sudah baik dan kualitas bangunannya pun sudah lumayan, saya khawatir apakah masyarakat mampu merawat rumah tersebut karena mereka termasuk kaum miskin/dhuafa jangankan merawat rumah untuk kebutuhan hidup sehari-hari saja susah maka perlu perhatian pemerintah untuk membina dan membantu agar mereka dapat hidup mandiri melalui pelatihan keterampilan dengan diberikan modal usaha.
19	Junaidi (56) PNS Pegawai Kecamatan	Sulit rasanya terjadi transformasi sumber daya manusia dan alih teknologi di lokasi desa Aweek dan desa Bueng karena umumnya mereka yang diberikan bantuan berasal dari desa itu sendiri bukan warga desa lain. Berbeda halnya dengan program yang dilakukan penataan pemukiman terhadap desa Teureubeh dan desa Cucum yang dibangun oleh IOM dimana mereka direkrut dari tenda-tenda darurat di seputaran kota Banda Aceh, Aceh Jaya dan Aceh Besar dengan berbagai macam keterampilan dan karakteristik di satukan dalam satu lokasi dengan membawa berbagai macam pengalaman sehingga sangat dinamis. Lokasi tersebut saat ini sangat berkembang dan bangunan rumah yang diberikan permanen serta ditunjang dengan bermacam sarana pendukung untuk membantu warga yang umumnya adalah masyarakat korban tsunami.
20	Drs. Hasan Basri, M.Si (54) Dosen	Sepengetahuan saya program yang dilaksanakan oleh pemerintah tersebut telah mendapatkan perhatian dari masyarakat sekitar yaitu masyarakat desa Jantho Makmur, ada yang positif ada yang negatif, yang positif telah memberikan kesejahteraan kepada desanya dan memberikan terhadap desa sekitar tetapi juga

NO.	INFORMAN/RESPONDEN	PENDAPAT
		ada yang negatif karena dianggap pemerintah tidak adil, hal ini disebabkan desa disekitar juga termasuk miskin warganya. Kondisi ril dapat digambarkan adalah bagaimana sikap warga yang memperoleh bantuan dari pemerintah dan mereka memberikan apresiasi yang baik terhadap kondisi itu, kita sadari bahwa memang disana-sini masih ada kekurangan yang perlu perbaikan untuk masa yang akan datang karena sulit dibayangkan pada masa itu pembangunan dilakukan pada saat konflik, jadi wajar saja kalau disana sini masih ada kekurangan.
21	Syamsul, S.Ag (35) Guru SMA	Program penataan ini baik dan perlu dilanjutkan untuk yang akan datang dan program ini sangat menyentuh pada kebutuhan masyarakat yaitu sebagai kebutuhan primer yang tidak dapat diabaikan karena pada masa konflik semua harta benda masyarakat banyak yang musnah terbakar sehingga program ini sangat bermanfaat dalam rangka meningkatkan harkat dan martabat masyarakat kaum dhuafa.
22	Drs. Faisal Djuned (45) Tokoh Pemuda	Memang dalam pembangunan tersebut kami tidak dimusyawarahkan sehingga pada saat muncul masalah kami tidak tahu sehingga untuk yang akan datang sebaiknya pemerintah perlu melakukan sosialisasi dengan membuat skala prioritas dan program ini perlu dilanjutkan.
23	Drs. Thaib Gani (45) Pegawai Camat	Program ini sudah berjalan dengan baik dan kami tidak dilibatkan secara langsung dan apa bila terjadi masalah kami tidak tahu banyak tentang hal itu, ini semua karena tidak dimusyawarahkan dengan pihak terkait saat dilakukan perencanaan. Dan program ini bagus untuk dilanjutkan dan untuk yang akan datang perlu dilakukan sosialisasi dan di musyawarahkan.
24	Ir. Samsul kamal (48) Kasie PSDK	Menjelaskan bahwa keterlibatan masyarakat dalam program ini telah diwujudkan melalui rapat perangkat desa dengan kecamatan, sehingga menghasilkan rembuk desa selanjutnya dikirim ke Bupati tembusan untuk Bappeda lalu dikirim ke Provinsi untuk pembangunan kawasan transmigrasi, begitulah tata cara melahirkan suatu program. Dan disana



NO.	INFORMAN/RESPONDEN	PENDAPAT
		sini kami sadari masih banyak kekurangan dan perlu dan harus disempurnakan untuk masa yang akan datang agar terwujud suatu program yang lebih baik.

UNIVERSITAS TERBUKA



PENGANTAR

Perihal : **Permohonan Pengisian Angket/Kuisisioner**
Lampiran : 1 (satu) berkas
Kepada Yth : Tgk./Bapak/Sdr. Warga Desa Aweek dan Desa Bueng

Assalamu'likum Warahmatullah Wabarakatu
Dengan hormat,

Dalam rangka penulisan tesis saya yang berjudul **“Persepsi Masyarakat Kecamatan Kota Jantho Kabupaten Aceh Besar Terhadap Program Penataan Pemukiman Penduduk Di Desa Aweek Dan Desa Bueng (Studi Evaluasi Kebijakan Berdasarkan Keputusan Bupati Aceh Besar Nomor 133 Tahun 2002 Tentang Penetapan Calon Lokasi Pembangunan Pemukiman Penduduk)”**, maka saya mohon dengan hormat kepada Tgk./Bapak/Sdr. Warga Desa Aweek dan Desa Bueng berkenan menjawab beberapa pertanyaan angket/kuisisioner yang telah disediakan jawaban dari Tgk./Bapak/Sdr. Seobjektif mungkin, artinya dijawab dengan kata hati dari Tgk./Bapak/Sdr. yang budiman.

Angket ini tidak ada hubungannya dengan politik dan jawabannyapun dijamin tidak ada hubungan dengan pelanggaran hukum, maka Tgk./Bapak/Sdr. tidak perlu merasa takut atau ragu-ragu dalam memberikan jawaban secara jujur dan benar, data dan identitas Tgk./Bapak/Sdr. akan dijamin kerahasiaannya.

Demikianlah pengantar ini dibuat atas perhatian, bantuan dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

Banda Aceh, Mei 2010
Hormat saya,

Setia Budi